

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK  
MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN  
SADDAM HUSSEIN DI IRAK**

**SKRIPSI**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Acc: Hadiah  
Pembelian  
Terima: 16 DEC 2003  
No. Ind: 8/1

Klasifikasi:  
Klasifikasi: 327.1  
SAB  
k e.1

Oleh :

*I Jro Saba*

NIM : 990910101005

Dosen Pembimbing

Drs. A. HABIBULLAH, M.Si.  
NIP. 131 953 242

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Jro Saba

NIM : 990910101005

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah asli hasil tulisan saya sendiri, dengan keabsahan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jember, 26 Juni 2003



I Jro Saba

990910101005

**MOTTO**

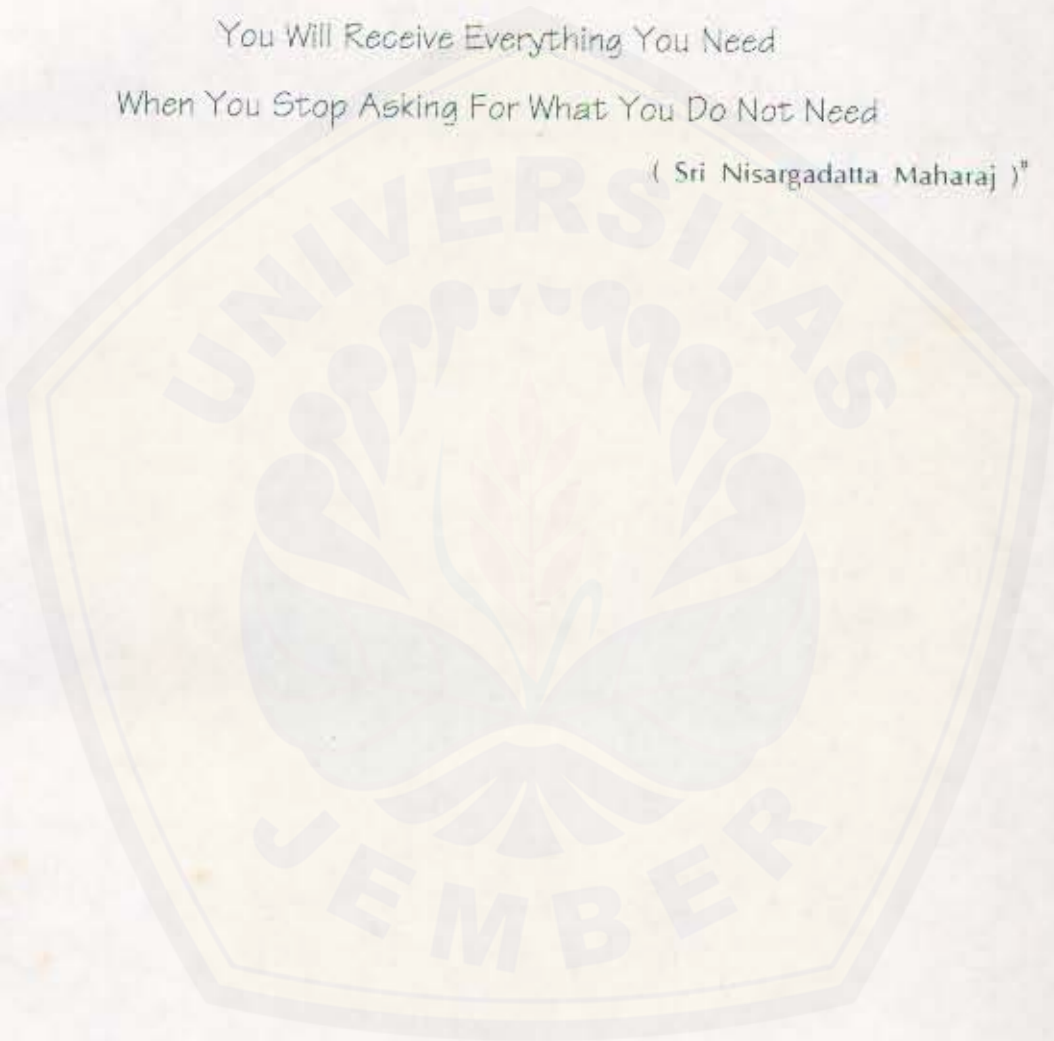
“Plain Living, High Thinking”

( I Jro Saba )

*You Will Receive Everything You Need*

*When You Stop Asking For What You Do Not Need*

( Sri Nisargadatta Maharaj )<sup>\*</sup>



---

<sup>\*</sup> Majalah *Raditya*, No. 66 Januari 2003, hal. 62

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Bapak, *I Nyoman Tegeg (alm.)*
- Ibu, *Ni Kubayan Lama*
- *Srini* tersayang yang telah banyak berkorban.



PENGESAHAN

Diterima oleh Tim Penguji Fakultas Ilmu Politik Universitas Jember  
Guna Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Dipertahankan Di muka Tim Penguji

Hari : Selasa  
Tanggal : 8 Juli 2003  
Jam : 09:00 WIB

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

  
(Drs. Asrial Aziz)

  
(Drs. A. Habibullah, M.Si.)

Anggota Tim Penguji

1. Drs. Asrial Aziz
2. Drs. A. Habibullah, M.Si.
3. Drs. Supriyadi, M.Si.
4. Drs. Nur Hasan, M.Hum.

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

## KATA PENGANTAR

Timur Tengah bukan hanya pernah sebagai pusat peradaban dunia, tapi sejalan dengan perkembangan dunia, Timur Tengah pun hadir sebagai sebuah pusat kekuatan ekonomi dan politik dunia yang menjadi ancaman negara besar lain. Akan tetapi, itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan bahkan negara – negara Teluk tercabik – cabik dan saling berseteru di tengah kemewahan yang ada.

Barat dan Amerika mengerti betul posisi strategis tersebut. Segala cara akan digunakan untuk menancapkan pengaruhnya di sana, termasuk dengan jalan perang. Apalagi, negara – negara seperti Arab Saudi, Irak dan Iran memiliki cadangan minyak yang sangat besar, sedangkan Amerika Serikat sebagai negara industri maju sangat membutuhkannya.

Irak, sosok negara yang tidak pernah lepas dari kontroversial, memiliki cadangan minyak terbesar ke- 2 di dunia. Irak termasuk negara yang tergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries* ( OPEC ) yang mempunyai pengaruh dan peran besar dalam menentukan kebijakan produksi serta harga minyak mentah dunia. Namun, karena sanksi Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) masih berlaku, produksi minyak Irak dibatasi hanya 2,5 juta barel per hari.

Dalam tulisan ini, dijelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah ( Irak ). Kepentingan apa yang menjadi latar belakang Amerika Serikat berambisi menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan itu pun lebih pada faktor politik dan ekonomi politik.

Karena tulisan ini jauh dari sempurna, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan. Begitu juga, karena kejadian perang Irak itu adalah kejadian yang *up to date* maka data dan informasi yang mendalam pun relatif sulit.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya kerja sama serta bantuan materi dan dorongan yang sangat berguna bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. A. Habibillah, Msi, selaku Dosen Pembimbing Terima kasih atas kesabaran dan wakt yang Bapak berikan.
2. Drs. Nuruddin M. Y, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Drs. Abubakar Eby Hara, MA, PhD, selaku Dosen Wali.
5. Seluruh Dosen Fisip, staff akademik dan segenap civitas akademika Universitas Jember.
6. Serta semua pihak yang telah membantu proses berilmu dan berpengetahuan penulis.

Jember, 26 Juni 2003

I Jro Saba

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Asli .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	6
1.3 Rumusan Permasalahan.....	6
1.4 Kerangka Konsep dan Teori.....	7
1.5 Hipotesis.....	17
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	18
1.6.2 Metode Analisa Data.....	18
1.7 Pendekatan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TIMUR TENGAH</b>	
2.1 Gambaran Situasi Timur Tengah .....	21
2.2 Politik dan Pemerintahan Irak.....	32
2.3 Arti Irak Bagi Amerika Serikat .....	36
<b>BAB III KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH</b>	
3.1 Bidang Politik.....	42
3.1.1 Strategis.....	43
3.1.2 Israel .....	46



3.2 Bidang Ekonomi.....	49
3.2.1 Minyak.....	50
3.2.2 Penjualan Senjata .....	53
3.3 Bidang Militer .....	57
3.4 Strategi Keamanan .....	62
3.5 Saddam Hussein Sebagai Penghambat Kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.....	70
3.6 Upaya Amerika Serikat Untuk Menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein .....	73
<b>BAB IV FAKTOR – FAKTOR AMERIKA SERIKAT MENGGULING- KAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN</b>	
4.1 Faktor Politik.....	77
4.1.1 Menjaga Eksistensi dan Keamanan Negara Zionis Israel..	
4.1.2 Penataan Ulang Wilayah Arab .....	85
4.1.3 Demokratisasi Di Irak .....	90
4.2 Faktor Ekonomi.....	95
4.2.1 Menguasai Industri Minyak Dunia.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

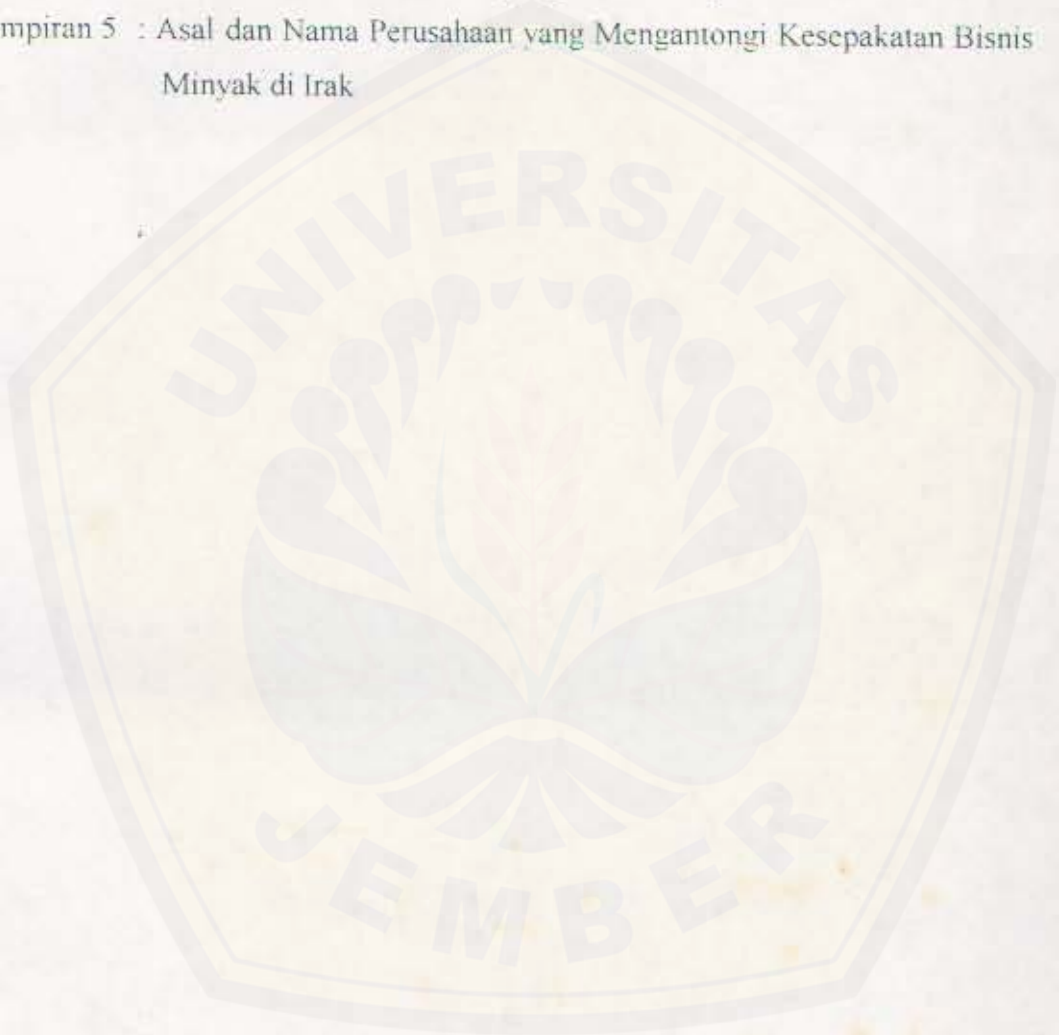
DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Cadangan Minyak Dunia..... 96



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Peta Irak
- Lampiran 2 : Profile Iraq
- Lampiran 3 : Data Pengekspor Minyak ke USA
- Lampiran 4 : Nama – Nama Perusahaan yang Bisnis Minyak di Irak
- Lampiran 5 : Asal dan Nama Perusahaan yang Mengantongi Kesepakatan Bisnis Minyak di Irak





## PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dalam dinamika hubungan internasional, Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki peranan besar. Kemampuan Amerika Serikat dalam berbagai bidang baik militer, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan Amerika Serikat sebagai hegemon dunia yang memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di berbagai kawasan.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adidaya yang masih disegani dan paling mendapat kepercayaan karena ia memiliki kombinasi kekuatan militer, ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi perangai negara-negara lain di dunia.<sup>1</sup> Berakhirnya Perang Dingin, pada satu sisi menurunkan secara drastis tingkat persaingan global di wilayah Teluk Parsi, yang pada tahap berikutnya mempengaruhi pola konflik di kawasan itu. Hal ini dapat dimengerti, karena untuk jangka waktu yang lama, terutama pada masa memuncaknya Perang Dingin kawasan ini menjadi ajang persaingan kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Irak merupakan suatu negara dengan wilayah yang selalu menjadi lintasan berbagai kekuatan baik dari Timur maupun Barat. Ini disebabkan karena Irak tidak mempunyai batas wilayah alami yang jelas. Masalah ketidakjelasan perbatasan antar-negara, khususnya di kawasan Teluk Parsi menjadi potensi konflik yang abadi.<sup>2</sup> Batas alami yang tidak dimiliki Irak menyebabkan sukar mempertahankan diri terhadap penduduk bangsa lain yang salah satu diantaranya adalah Inggris. Dengan menyalahgunakan mandat Liga Bangsa - Bangsa untuk

<sup>1</sup>Edy Prasetyono, "Peningkatan Kekuatan Militer Negara - Negara Asia Pasifik dan Implikasinya Terhadap Keamanan Regional", *Analisis CSIS*, Tahun XXIII, No. 6, November - Desember, 1994, hal. 504.

<sup>2</sup>M. Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1993, hal. 75.

menyiapkan Irak sebagai negara merdeka, Inggris melakukan pendudukan dengan pandangan bahwa Irak adalah daerah yang sangat strategis baginya dalam upaya untuk menguasai imperium – imperium di Timur, terlebih lagi dengan komoditi minyak Irak yang sangat komersial.

Saat ini, Irak tetap merupakan negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Kemudian selama di bawah ideologi Baathisme, Irak telah tampil sebagai negara yang revolusioner dengan Pan Arab-nya yang ingin mempersatukan negara – negara Arab. Keaktifannya dalam GNB ( Gerakan Non Blok ) dan perannya di OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries* ) juga merupakan nilai tambah bagi kuatnya pengaruh Irak di kawasan tersebut.

Dalam tatanan dunia internasional, Irak menjadi salah satu negara yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan politik internasional. Dengan semakin menyatunya tatanan dunia global menjadikan satu negara tidak dapat memisahkan dirinya dari pengaruh negara lain. Demikian juga dengan Irak yang telah berhasil mewarnai percaturan politik internasional dengan berbagai gebrakannya yang sangat berani menantang kekuatan negara – negara Barat terutama negara *super power* dunia yaitu Amerika Serikat. Irak dengan segala hal yang menarik tentangnya telah mengalami fluktuasi perkembangan di bawah kepemimpinan Saddam. Jika kita telaah lebih jauh, kita akan menemukan beberapa hal yang menarik dalam model pemerintahan Saddam yang telah membawa Irak menuju kemajuan perannya dalam percaturan politik global.

Hegemoni<sup>3</sup> merupakan dasar kekuatan Saddam untuk memerintah Irak. Salah satu sebab kesuksesan ini adalah berhasilnya dimunculkan wacana “ musuh bersama ”<sup>4</sup> yang oleh Saddam selama ini dipakai untuk membangkitkan emosi rakyat Irak agar bersatu mendukungnya. Rakyat menjadi sibuk memberi dukungan kepada pemerintahan Saddam dalam memerangi musuh bersama

---

<sup>3</sup> Hegemoni dalam hal ini memakai konsep hegemoni menurut Gramsci. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas – kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan memindahkan kepemimpinan politik dan ideologis. Untuk lebih lanjut, lihat Roger Simon, *Gagasan – Gagasan Politik Gramsci*, INSIST bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 19-20.

<sup>4</sup> Sihbudi, *Op.cit.*, hal. 50.

tersebut, sehingga rakyat tidak lagi memikirkan apakah tindakan pemerintah itu benar atau salah. Latar belakang Saddam yang sedemikian berpengaruhlah membuat Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap Irak baik secara regional maupun global.

Di bawah kepemimpinan George W. Bush, Amerika Serikat gencar mengadakan serangan militer ke Irak, walaupun mendapat kecaman dari dunia internasional, Bush tidak menghiraukan opini dunia yang menentang serangan tersebut.<sup>5</sup> Kecaman terhadap Amerika Serikat mengadakan serangan terhadap Irak, juga datang dari Paus Yohanes Paulus II sebagai pimpinan tertinggi negara Vatikan. Dalam pidato 13 Januari 2003, di hadapan korps diplomatik negara-negara sahabatnya, Paus mengecam rencana perang itu dan menuntut tetap dihormatinya Deklarasi PBB dan Hukum Internasional.<sup>6</sup> Ancaman Amerika Serikat tersebut mengundang banyak pertanyaan, mengapa Amerika Serikat berbuat demikian terhadap Irak, sedangkan Israel yang mengembangkan senjata pemusnah massal juga, bahkan lebih maju dibandingkan Irak, justru dibiarkan. Apalagi Amerika Serikat sendiri merupakan pusat pengembangan sistem senjata pemusnah massal terbesar yang tak tertandingi di dunia.<sup>7</sup>

Sangat menarik adanya serangan Amerika Serikat terhadap Irak, karena serangan itu justru berlawanan dengan opini internasional, serangan itu terjadi di tengah kegelisahan jutaan orang yang menentang perang terhadap Irak, sedangkan Amerika Serikat justru menebar ancaman nyata di sana - sini untuk menggempur Irak apapun alasannya. Ketika sebagian besar menyerukan perdamaian, Amerika Serikat justru mengadakan perang, aksi unjuk rasa di berbagai kota di Amerika Serikat, reservasi sikap dan upaya untuk mengulur perang terhadap Irak, dari manapun datangnya sama sekali tidak digubris. Alasan-alasan kemanusiaan diabaikan begitu saja oleh Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat mempertaruhkan harga dirinya dalam menyerang Irak. Amerika Serikat seakan tidak peduli dimusuhi seluruh dunia. Meski serangan sepihak ditentang keras PBB

<sup>5</sup> I Basis Susilo, "Di Balik Rencana Bush Menyerang Irak", *Kompas*, 5 Februari 2003, hal. 4.

<sup>6</sup> Baskara T Wardaya, "Bush, Vatikan, dan Irak", *Kompas*, 13 Februari 2003, hal. 4.

<sup>7</sup> Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri : Mereka Melawan Amerika*, Pustaka Zaman, Jakarta, 2003, hal. 9.

( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), Amerika Serikat tetap saja melaksanakan ancamannya. Bukankah secara opini Amerika Serikat dan Inggris sebenarnya mengalami kekalahan.

Amerika Serikat beranggapan rezim Saddam Hussein harus dijatuhkan karena dianggap sebagai penghalang utama bagi Amerika Serikat untuk masuk ke dalam eksploitasi minyak Irak sebagai bisnis menggiurkan, namun tanpa perlu masuk ke dalam bisnis perminyakan Irak, Amerika Serikat sesungguhnya sudah menikmati kejayaannya sekarang ini, sebagai negara adidaya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Cadangan minyak Amerika Serikat pun tidak sedikit. Dengan berbagai cara, Amerika Serikat gampang pula menyusup masuk ke dalam bisnis eksplorasi minyak Irak.<sup>8</sup>

Alasan - alasan yang dilontarkan Amerika Serikat untuk melegitimasi serangan tersebut, dipandang skeptis oleh dunia. Irak dituduh mempunyai senjata pemusnah massal, namun ketika Irak telah membuka akses kepada tim inspeksi persenjataan PBB sejak 27 Nopember 2002, ternyata Irak tidak terbukti seperti yang dituduhkan tersebut. Kegagalan serupa dialami tim PBB setelah melakukan pemeriksaan selama tujuh tahun ( 1991 – 1998 ).<sup>9</sup>

Alasan lain Amerika Serikat adalah dianggapnya Saddam sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia karena dituduh memiliki senjata nuklir. Namun ketekatan Bush mengadakan serangan ke Irak, justru menunjukkan bahwa Irak sampai kini belum memiliki senjata nuklir. Karena itu, ia berusaha keras mencegahnya. Strategi *Preemptive Strike* ( serangan yang mendahului ) dan *Defensive Intervention* ( intervensi defensif ), dalam doktrinnya bisa memfasilitasi niatnya menyerang Irak secara fisik.

Menurut Roger Hill, komisi khusus PBB di Irak, senjata pemusnah massal Irak telah dimusnahkan oleh komisi khusus PBB ( 1991 – 1998 ) yang mencapai 95 %, dan diperkirakan hanya tinggal 5 %. Bahkan, lokasi senjata pemusnah massal pun ikut dimusnahkan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Tajuk Rencana, *Kompas*, 28 Maret 2003, hal. 4.

<sup>9</sup> *Kompas*, 13 Pebruari 2003, hal. 4.

<sup>10</sup> Wawancara Roger Hill dengan majalah *Tempo*, 30 Maret 2003, hal. 43.

Satu – satunya jenis senjata yang dianggap berbahaya dan ditemukan Hans Blix adalah rudal jarak dekat Al Samoud 2 yang konon punya jelajah lebih dari 150 km. Kepada tim PBB, Saddam berjanji tidak akan menggunakan Al Samoud untuk menyerang negara manapun termasuk Israel. Berkat permintaan Amerika Serikat, Inggris, dan PBB serta bujukan dari Prancis, Jerman, dan Rusia, Saddam akhirnya mengalah dan menghancurkan rudalnya itu menjelang akhir Pebruari 2003.<sup>11</sup>

Kondisi – kondisi semacam itu tidak membuat Bush mengurungkan niatnya mengadakan serangan ke Irak, namun justru membuktikan keinginannya untuk tetap menyerang Irak yaitu pada tanggal 20 Maret 2003. Menjadi pertanyaan, kepentingan apakah yang mendasari kebijakan Bush tersebut ? Mengapa Amerika Serikat begitu ambisi menguasai Irak.

Selain soal nuklir, soal minyak mempengaruhi pandangan dan sikap tentang Irak. Irak mempunyai posisi amat strategis, karena menyimpan cadangan minyak terbesar kedua dan belum sepenuhnya dieksploitasi ( cadangan Irak 112,5 miliar barel dengan produksi 8,8 juta barel per hari ). Bush adalah politisi asal Texas, negara bagian di Amerika Serikat yang mempunyai banyak perusahaan minyak, sehingga pasti tahu dan biasa berurusan dengan energi yang paling penting untuk menopang mesin industri dan kehidupan manusia saat ini.<sup>12</sup>

Dalam mencapai kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Irak, Amerika Serikat membuat doktrin pertahanan bagi negaranya yang diumumkan Juni 2002 dimana merupakan perubahan sangat mendasar dari doktrin sebelumnya dari defensif menjadi ofensif.

Ke dalam doktrinnya itu, dimasukkan unsur baru, yaitu strategi *preemptive strike* dan *defensive intervention*. Sebagai pembuat doktrin, Bush tentu akan mencoba merealisasikan doktrinnya tersebut. Ia sudah mencobakan di Afganistan dan kini mencobakannya di Irak.

Dengan doktrin keamanan baru itu, Amerika Serikat akan merasa leluasa menyerang individu atau organisasi atau negara yang dipersepsikan sebagai

<sup>11</sup> “ Membedik Minyak Menggempur Saddam ”, *Republika*, 23 Maret 2003.

<sup>12</sup> Susilo, *Op. Cit.*, hal. 4.



teroris atau musuh yang memiliki senjata nuklir, biologi dan kimia. Dalam pengertian klasik, bahaya utama sebuah negara selalu diidentifikasi sebagai kekuatan bangsa asing atau negara lain.

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Suatu tulisan ilmiah harus dibatasi jangkauan dan kajian guna mempertajam analisa serta mudah memahami permasalahan. Pembatasan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. *Pembatasan Materi*

Yaitu menyangkut penjelasan mengapa Amerika Serikat berambisi menggulingkan Saddam Hussein, dikaitkan dengan kepentingan dan motivasi yang menjadi latar belakang invasi Amerika Serikat ke Irak serta keinginan Amerika Serikat menjadi dominan di kawasan Timur Tengah.

### b. *Pembatasan Waktu*

Dalam tulisan ini akan dibatasi waktunya, yakni sejak George W. Bush naik menjadi presiden ( tahun 2001 ) sampai tahun 2003. Hal ini dipilih karena dengan naiknya Bush menjadi presiden terjadi perubahan doktrin keamanan, yaitu dari defensif ke ofensif, serta ayahnya adalah presiden Amerika Serikat yang gempar ingin menggulingkan Saddam Hussein, namun sampai akhir masa jabatannya Saddam mampu bertahan. Tahun 2003 dipilih, karena pada tanggal 20 Maret 2003, Amerika Serikat dan koalisinya mengadakan serangan ke Irak.

## 1.3 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang atau alasan pemilihan judul, timbul suatu pertanyaan mengapa Amerika Serikat begitu ingin menyerang Irak secara militer, apakah *hidden agenda* yang melatarbelakangi atau mengapa tidak dengan jalan diplomasi, bukankah jalan kekerasan akan jauh lebih merugikan dunia secara keseluruhan?

Gelombang anti perang di seantero dunia cenderung melihat usaha penguasaan minyak sebagai alasan invasi Amerika Serikat terhadap Irak. Seorang pujangga prolifika Amerika Serikat, Gore Vidal, menuding ambisi penguasaan

adanya minyak yang berlimpah di sekitar laut Kaspia, Vidal juga memandang invasi tersebut sebagai cermin *totalitarian minded* dari Bush dan Cheney.

Barangkali pandangan demikian ada benarnya. Namun, masih ada hal yang belum terjawab. Bagaimana mungkin invasi ke Irak semata demi minyak, jika Irak secara diam – diam telah menyelundupkan minyak ke Amerika Serikat dan jika Amerika Serikat menghendaki pasokan yang lebih banyak bukankah tinggal mencabut sanksi ekonomi dan militer terhadap Irak.<sup>13</sup>

Dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin timbul, maka timbul permasalahan **Mengapa Amerika Serikat sangat berambisi menggulingkan Saddam Hussein?**

#### 1.4 Kerangka Konsep dan Teori

Ada kecenderunagn kuat bahwa saat ini demokrasi diartikan dalam kaitannya dengan sistem perwakilan. Apakah demokrasi berarti *representative institutions*?<sup>14</sup> Keputusan tidak dicapai atas hasil suara keseluruhan penduduk, tapi atas wakil – wakil rakyat yang terpilih.<sup>15</sup> Ini mengisyaratkan bahwa pemilihan seharusnya dilakukan oleh warga negara dengan rasa bebas tanpa intimidasi.<sup>16</sup> Selain itu, demokrasi juga menekankan jaminan kebebasan sipil yang meliputi : kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi yang dilindungi undang – undang.

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi dapat ditelusuri kembali ke abad kelima Maschi, yaitu ketika orang – orang Yunani menciptakan *polis* ( negara kota atau masyarakat kota ) dan berusaha menjawab pertanyaan tentang sistem politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sistematisasi dan perluasan teori demokrasi dapat dikatakan muncul pada abad kesembilan belas, khususnya melalui karya Thomas Jefferson, Abraham

<sup>13</sup> Yudi Latif, " Bush dan 'Yahudi Radikal " , *Republika*, 31 Maret 2003, hal. 5.

<sup>14</sup> Lihat C. W. Cassinelli, *The Politics of Freedom : An Analysis of the Modern Democratic State*, University of Washington Press, Seattle, 1961, dalam *Jurnal Ilmu Politik* No.14, Kerja sama AIPI dan LIPI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 32.

<sup>15</sup> *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Untuk pembahasan yang lebih mendalam, lihat *Loc. Cit.*.

Lincoln, John Stuart Mill, dan Alexis de Tocquille.<sup>17</sup> Namun baru setelah Perang Dunia Kedua demokrasi menjadi suatu sistem politik yang menarik perhatian banyak pemimpin negara terutama akibat kegagalan fasisme dan nazisme.<sup>18</sup>

Ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi.

**Pertama**, demokrasi bukan hanya merupakan bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara.<sup>19</sup> Asumsi ini banyak mendapat dukungan Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai model demokrasi modern.

**Kedua**, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah sejak jaman Romawi Kuno, dan sebagai bentuk “ ideal ” ( untuk tidak menyebut sistem yang ideal ) bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik yang penuh dengan gejolak.<sup>20</sup>

**Ketiga**, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang “ natural ”, dalam arti bahwa jika rakyat di mana pun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politik mereka, besar kemungkinannya mereka akan memilih demokrasi.<sup>21</sup>

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cerminan demokrasi, antara lain :<sup>22</sup>

1. kebebasan membentuk dan bergabung dalam berorganisasi ( berserikat dan berkumpul );
2. kebebasan berekspresi ( mengeluarkan pendapat );
3. hak memilih dan dipilih;
4. kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan publik;

<sup>17</sup> Lihat Henry B. Mayo, “ An Introduction to Democratic Theory ”, Oxford University Press, New York, 1960, seperti dikutip, dalam *Ibid.*, hal. 30.

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Lihat antara lain Samuel P. Huntington, *The Third Wave*, University of Oklahoma Press, Norman, 1991; “ Will More Countries Become Democratic ? ”, *Political Science Quarterly*, Vol 99, No. 2, 1984, dalam *Ibid.*, hal. 32.

<sup>20</sup> *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Robert Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven, 1971, p. 7. seperti dikutip dalam Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 3 - 4.

5. hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan;
6. alternatif sumber – sumber informasi;
7. pemilu yang bebas dan adil;
8. pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara – cara lain yang sejenis.

Selama ini, kajian mengenai demokratisasi lebih banyak menekankan aspek – aspek internal<sup>23</sup> sedangkan faktor – faktor eksternal sebagai faktor penjelas berhasil tidaknya demokratisasi, diakui masih langka. Pemahaman konteks internasional guna menjelaskan demokratisasi juga sangat diperlukan terutama variabel internasional yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional<sup>24</sup>. Adapun Samuel P. Huntington menyatakan :

*“Demokratisasi suatu negeri mungkin dipengaruhi atau barangkali ditentukan oleh tindakan – tindakan pemerintah dan lembaga – lembaga yang berada di luar negeri ...Jelaslah bahwa pelaku asing boleh jadi juga menggulingkan rejim – rejim demokrasi atau mencegah negeri – negeri yang semestinya sudah menjadi demokrasi untuk mewujudkan demokrasi. Aktor luar negeri barangkali dapat dianggap sebagai faktor atau menghalangi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial terhadap demokratisasi.”<sup>25</sup>*

Dalam tulisan ini, Teori Demokrasi dianggap relevan untuk mengkaji atau menjelaskan apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Saddam ( Irak ), yaitu keinginan Amerika Serikat menggulingkan Saddam Hussein yang diktator untuk diganti dengan pemerintahan yang menghargai demokrasi.

Empat macam interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi yaitu : (1) pola transformasi, dimana elit penguasa mengambil prakarsa

<sup>23</sup> Aspek internal yang dimaksud seperti kultural, struktural, militer atau *civil society*.

<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat, Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal 113 – 122.

<sup>25</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991, hal 103 – 104.

memimpin upaya demokratisasi, seperti yang terjadi di Spanyol dan Brazil; (2) pola *replacement* dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi, seperti di Argentina, Jerman Timur, dan Portugal; (3) pola *transplacement* dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi, seperti di Polandia, Nicaragua, Bolivia; (4) pola intervensi, yang jarang terjadi, yaitu dimana lembaga – lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar, seperti di Grenada dan Panama.<sup>26</sup>

Pada transformasi, pihak – pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem demokratis.<sup>27</sup> Kasus – kasus yang menjadi prototipe transformasi adalah Spanyol, Brasil, dan di antara rezim – rezim komunis prototipenya adalah Hongaria.<sup>28</sup>

Proses *replacement* sangat berbeda dengan proses transformasi. Singkat kata, proses *replacement* terdiri dari tiga fase yang berbeda : perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim, dan perjuangan setelah tumbangnya rezim. Dalam proses ini, kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim ini. Unsur – unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah makin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan.<sup>29</sup>

Dalam *replacement*, tidak ada penekanan pada kesinambungan prosedur dan legitimasi ke masa lalu seperti yang terdapat dalam transformasi. Mereka yang menggantikan penguasa otoriter mendasarkan pemerintahan mereka pada “ legitimasi ke masa depan ”, sesuatu yang akan mereka wujudkan di masa datang dan kurangnya keterlibatan mereka atau hubungan mereka dengan rezim terdahulu.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Samuel P. Huntington, dalam *Ibid.*, hal. 20.

<sup>27</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, ( Terjemahan ), PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991, hal. 158.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 159.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 180.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.186.

Pada *transplacement*, demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Ini bisa terjadi karena ada keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sehingga pemerintah bersedia merundingkan tapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana dominasi kelompok konservatif menimbulkan *replacement*.<sup>31</sup>

Dalam fenomena serangan Amerika Serikat ke Irak yang dimulai tanggal 20 Maret 2003 dengan tujuan menggulingkan Saddam, lalu mengadakan pergantian rezim, dari sisi politik, relevan dipahami dengan konsep yang ditawarkan Huntington ini. Namun yang perlu digaris bawahi adalah adanya keterlibatan asing dalam proses transisi tersebut.

Amerika mengadakan intervensi dalam perubahan rezim tersebut perlu dipertanyakan, sehingga dalam mengadakan analisa terhadap serangan Amerika terhadap Irak, menurut penulis, kurang bisa dipahami jika hanya memakai pisau analisa atau konsep demokrasi seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu adanya teori ekonomi politik dalam mendekati motivasi<sup>32</sup> Amerika Serikat dalam aksinya itu.

Istilah ekonomi politik dalam konteks hubungan internasional menjadi konsep atau teori yang bisa kita pakai dalam memahami hubungan antara aspek politik dan aspek ekonomi. Atau untuk lebih tegasnya, hubungan tersebut<sup>33</sup> adalah merupakan *trespass* antara bidang politik dan ekonomi.

Ekonomi politik mempelajari proses – proses sosial dan institusional dimana kelompok – kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber – sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>32</sup> Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Menurut Lindzey, Hall dan Thomson ( 1975 ), motif adalah sesuatu yang menimbulkan tingkah laku. Lebih lanjut lihat, H. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 191.

<sup>33</sup> Aalbert O. Hirschman, *Essays in Trespassing : Economics to Politics and beyond*, Cambridge University Press, New York, 1981, hal. V, dalam tulisan Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "Pendekatan Politik Ekonomi ( Political-Economy ) : Jembatan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik, " dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 8, kerja sama AIPI dan LIPI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 14.

untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, ilmu ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi, dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.<sup>34</sup>

Dalam tulisan ini, teori ekonomi politik yang digunakan adalah teori Dependensia ( Ketergantungan )<sup>35</sup> yang merupakan bagian dari teori struktural. Teori Struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terdapat di negara- negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, dimana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah, maka, surplus dari negara – negara Dunia Ketiga beralih ke negara – negara industri maju.<sup>36</sup>

Teori ini menekankan lingkungan material manusia, yakni organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan – imbalan material yang diberikannya, perubahan – perubahan pada lingkungan material manusia termasuk perubahan – perubahan teknologi. Lingkungan material ini dianggap sebagai faktor yang lebih penting dari pada keadaan psikologi dan nilai – nilai kemasyarakatan yang ada dalam mempengaruhi tingkah laku manusia.<sup>37</sup>

Teori Struktural seringkali dianggap bersumber pada teori yang dilontarkan oleh Karl Marx, terutama teorinya tentang *bangunan bawah* atau *base*, dan *bangunan atas* atau *superstructure*. Marx menyatakan bahwa kondisi material manusia merupakan sumber dari kesadaran dan tingkah laku manusia. Kondisi material yang ada dalam sebuah masyarakat nyata antara lain adalah sistem produksi dan distribusi sumber alam yang ada. Kondisi material ini

---

<sup>34</sup> Michael P. Todaro, *Economic Development in the Third World*, Longman Inc., New York, 1987, hal.7, dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 10.

<sup>35</sup> Pada dasarnya, teori ini hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara – negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Sementara teoritis modernisasi menduga bahwa penyebab kemunduran itu bersifat internal dan kultur ( seperti kurangnya " motivasi berprestasi, " despotisme, korupsi dan sebagainya ), teoritis *Dependensia* hendak menunjukkan bahwa penyebab itu bersifat eksternal dan struktural. Tetapi, teoritis ini juga berbeda dengan teoritis imperialisme; sementara teoritis imperialisme melihat hubungan antara negara kuat dan lemah itu dari perspektif negara penjajah ( Eropa dan Amerika Utara ), teoritis *Dependensia* memandang persoalannya dari perspektif negara terjajah.

<sup>36</sup> Lebih lanjut lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal.41.

<sup>37</sup> Arief Budiman, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1989, dalam *Ibid.*, hal. 42.

menentukan sistem sosial, sistem politik, sistem budaya manusia, yang pertama adalah bangunan bawah, yang kedua adalah bangunan atas. Bangunan bawah adalah aspek material dari kehidupan manusia, bangunan atas adalah non materialnya. Kalau bangunan bawahnya berubah, bangunan atas juga akan mengikutinya, maka, dalam teori ini, aspek materi menjadi lebih penting daripada aspek ide. Filsafat materialisme memang menjadi dasar dari teori Marx.

Teori Ketergantungan lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal : Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teori – teori Marxis tentang imperialisme dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran.

Menurut Teori Ketergantungan, keterbelakangan Dunia Ketiga sebagai negara pinggiran terjadi akibat adanya faktor eksternal, maka, Theotonio Dos Santos memberikan definisi sebagai berikut :

*Yang dimaksud dengan ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara – negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara – negara lain, dimana negara – negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling tergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistem – sistem ekonomi ini dengan perdagangan lain, menjadi hubungan ketergantungan bila ekonomi beberapa negara ( yang dominan ) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara – negara lainnya ( yang tergantung ) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.<sup>38</sup>*

Oleh para ahli yang menganut paham liberal, hubungan antara negara – negara pusat dan pinggiran dikatakan sebagai hubungan saling ketergantungan, dimana kedua belah pihak ada dalam posisi saling membutuhkan. Negara – negara pusat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya, sedangkan negara – negara pinggiran membutuhkan barang – barang industri untuk pembangunannya. Karena itu, tidak bisa dikatakan yang satu mendominasi yang lainnya.

<sup>38</sup> Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence," *American Economic Review*, Vol. 60 (2), May, 1970, Dalam *Ibid.*, hal. 63.



Definisi Dos Santos tersebut merupakan definisi yang moderat atau lunak dari Teori Ketergantungan. Pada definisi tersebut, masih diakui bahwa negara – negara pinggiran, setelah mengadakan hubungan dengan negara – negara pusat, masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang bila negara – negara pusat tersebut sedang mengalami perkembangan. Memang, perkembangan di negara – negara pinggiran merupakan perkembangan dalam ketergantungan, tetapi bagaimana pun juga Dos Santos dan beberapa penganut Teori Ketergantungan lainnya, masih mengakui kemungkinan bagi negara – negara pinggiran tersebut berkembang.

Dalam konteks hubungan antara Amerika Serikat – Irak, Irak dengan Saddam Hussein-nya memang merupakan negara yang diktator dan cenderung mengabaikan paham demokrasi yang oleh banyak negara adalah merupakan suatu sistem yang paling ideal dalam sistem pemerintahan modern karena adanya penghargaan yang tinggi terhadap hak – hak azasi manusia. Amerika Serikat sebagai negara yang mengaku sebagai kampium demokrasi sering memakai demokrasi sebagai kedok untuk mengadakan semacam intervensi terhadap kedaulatan negara lain, baik dalam mengganti pemerintahan atau pun mengadakan kritik terhadap kinerja pemerintahan suatu negara.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam penggantian rezim pemerintahan di Irak adalah merupakan cara yang dipakai untuk memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat terutama di Timur Tengah. Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, sebetulnya “ dibungkus ” dalam bentuk demokrasi. Namun kepentingan yang ada jauh lebih dari itu.

Dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks, fenomena hubungan Amerika Serikat mengintervensi kedaulatan Irak, adalah sebagai wujud penciptaan hubungan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju, sehingga Amerika Serikat mengadakan intervensi terhadap penggulingan pemerintahan Saddam Hussein bertujuan untuk menguasai negara berkembang.

Berangkat dari fenomena itu, penulis memakai pisau analisa konsep demokrasi dan ekonomi politik khususnya dependensia dalam memahami hubungan Amerika Serikat – Irak, sehingga, akan diperoleh suatu pemahaman

yang memadai dan mendalam tentang kebijakan Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak.

Untuk menganalisa dan memahami lebih lanjut setelah terjadi pemahaman akan motivasi Amerika Serikat menyerang Irak untuk menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein, dalam hal ini digunakan juga konsep *Power*. Dengan menggunakan konsep *Power* diharapkan didapat pengertian yang lebih mendalam tentang kemampuan yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun Irak baik sebagai latar belakang serangan maupun sebagai tujuan dari serangan itu dilakukan. Amerika Serikat berasumsi bahwa Amerika Serikat berada di atas Irak dalam hal kekuatan baik militer maupun ekonomi. Begitu juga serangan itu dipakai untuk menambah kekuatan Amerika Serikat setelah Irak dan kawasan Timur Tengah dapat dikuasai.

Kautilya, tokoh negarawan India Kuno yang menulis karya besar pada abad ke 4 SM, menafsirkan *Power* sebagai “ pemilikan kekuatan “ ( yaitu, suatu atribut ) yang berasal dari tiga unsur : pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.<sup>39</sup> Hans Morgenthau memilih mendefinisikan *Power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik di mana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B. Jadi, *Power*, menurut Morgenthau,

*“ bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain ( dan itu ) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan ( pengendalian ) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain. “*<sup>40</sup>

Tentang isu pertama, Couloumbis dan Wolf mengajukan pendapat bahwa cara terbaik untuk memahami konsep *Power* adalah dengan memandangnya sebagai suatu hubungan antara aktor – aktor dengan kehendak yang berbeda. Sebaliknya, cara terbaik untuk mendefinisikan secara operasional dan mengukur

<sup>39</sup> Lebih lanjut lihat Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.116 – 117.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 117.

kemampuan suatu negara untuk menerapkan kekuasaan adalah dengan memusatkan perhatian pada atribut – atribut spesifik negara itu yang dapat diukur. Tentang isu kedua, mereka memilih memandang konsep *Power* sebagai campuran dari berbagai unsur penerapan pengaruh. Ini mulai dari tindakan yang paling keras, yaitu paksaan militer, ke pemaksaan ekonomis, sampai ke solidaritas ideologis dan persuasi moral. Mereka tidak setuju dengan pendapat yang menyamakan power dengan daya paksa, karena itu berarti mengabaikan kenyataan bahwa politik juga meliputi dimensi lain yang mencerminkan kerjasama, kompromi, solidaritas, dan keuntungan timbal balik.<sup>41</sup>

Power, pengaruh, daya paksa, wewenang ( *authority* ), penindasan, cinta, benci, diskriminasi, agresi, konflik, dan damai adalah konsep – konsep yang kompleks dan subyektif, dan karena itu sulit didefinisikan secara operasional sehingga bisa diterima semua orang.

Oleh karena itu, Couloumbis dan Wolfe mengusulkan pendefinisian power secara luas. Di sini power merujuk pada apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. dalam hal ini *power* bisa dilihat dalam tiga unsur penting. *Pertama*, adalah daya paksa ( *force* ), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Unsur *kedua* adalah pengaruh ( *influence* ), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat – alat persuasi ( tanpa kekerasan ) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. unsur *ketiga* adalah wewenang ( *authority* ), yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan ( nasehat, perintah ) yang diberikan oleh aktor A.<sup>42</sup>

Konsep *Power* tidak bisa dipandang sebagai suatu hubungan yang statik, berlangsung satu kali dan satu arah. *Power* harus dilihat sebagai hubungan yang dinamis, berlangsung terus – menerus, dan dua arah. Misalnya, kalau hari ini A mengendalikan perilaku B dalam satu isu, tiga bulan atau tiga tahun lagi perimbangan kekuatan itu bisa berubah sehingga B mengendalikan perilaku A

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 118 - 119

dalam isu yang sama. Situasi itu menjadi jauh lebih rumit ketika kita memperhatikan bahwa hubungan kekuasaan antara dua negara bisa berbeda – beda dari satu isu ke isu yang lain, dan tergantung pada kemampuan, kepentingan, dan kemauan para pemimpin untuk menerapkan *power* dan unsur – unsurnya demi mencapai tujuan –tujuan mereka. Maka dari itu, *power* itu bisa aktual dan potensial. *Power* aktual adalah kekuatan yang sudah tersedia, sedangkan *power* potensial adalah kekuatan yang bisa diciptakan kalau ada kebutuhan, misalnya karena timbulnya suatu krisis.<sup>43</sup>

James Lee Ray, mencoba untuk membuat definisi tentang *power* yang membedakannya dari pengaruh. Ray mendefinisikan *power* sebagai kemampuan relatif untuk menghancurkan barang dan membunuh orang.<sup>44</sup> Berdasar definisi ini, ia menyatakan bahwa walaupun *power* (kekuatan) biasanya menghasilkan *influence* (pengaruh), tetapi tidak selalu mesti demikian. Kenyataan bahwa negara A lebih kuat (dalam pengertian kedua ini) daripada negara B tidaklah berarti bahwa negara A akan selalu berhasil dalam upaya mempengaruhi negara B.

Dalam fenomena Amerika Serikat - Irak, walaupun Amerika Serikat memiliki kekuatan militer lebih kuat, Irak sulit untuk dipengaruhi dengan cara persuasi atau diplomasi. Maka yang dipakai Amerika Serikat adalah kekuatan militer dengan cara perang untuk menguasai Irak. Untuk memahami fenomena ini maka dalam tulisan ini diperlukan konsep *power* untuk mengadakan pemahaman yang mendalam.

## 1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara suatu masalah penelitian.<sup>45</sup> Dalam rangka penulisan ilmiah, hipotesis sangat diperlukan karena akan menjadi ukuran bagi penelitian itu sendiri dan untuk memperoleh kesimpulan yang sesungguhnya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 119 – 120.

<sup>44</sup> Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hal. 125.

<sup>45</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 90.

Jadi, ambisi Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein disebabkan oleh faktor politik yakni perubahan rezim menuju rezim yang lebih kooperatif, menjaga keamanan dan kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah, penataan ulang wilayah Arab, dan faktor ekonomi yakni menguasai industri minyak dunia, sehingga kepentingan strategis Amerika Serikat dapat terwujud serta ingin dominannya Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Berhubung tulisan ini bersifat studi pustaka, maka data yang dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung dari sumber data. Data sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku – buku literatur yang ada kaitannya dengan judul yang diambil,
2. Surat kabar, jurnal ilmiah, hasil seminar dan sebagainya,
3. Internet, yaitu situs yang berkaitan dengan judul, dan lain sebagainya.

Tempat penelitian :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember

### 1.6.2 Metode Analisa Data

Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung maka dalam penelitian ini data diolah secara deduktif kualitatif. Deduksi merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>46</sup> Penggunaan analisa deduktif kualitatif ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang diteliti. Sehingga sangat dimungkinkan pengembangan ide – ide baru.

---

<sup>46</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 48.

## 1.7 Pendekatan

Berakhirnya Perang Dingin yang dibarengi dengan munculnya isu global terutama isu ekonomi politik dimana dimensi militer dipakai sebagai cara untuk mencapai kepentingan yang lainnya, serta adanya keinginan Amerika Serikat untuk dominan di kawasan Timur Tengah dalam konteks hubungan internasional yang anarkis, akan lebih relevan dijelaskan atau didekati dengan pendekatan **Neo-realism**.

Paduan teori sistem dan teori realisme klasik adalah Neorealisme atau sering disebut realisme struktural. Prinsip Dasar Neorealisme adalah :

1. Sistem internasional adalah anarkis,
2. Negara –negara di dalam sistem tersebut adalah aktor uniter dan rasional,
3. Hirauan utama adalah survival.<sup>47</sup>

Neorealisme muncul pada tahun 1970-an, sebagai kritik terhadap realisme klasik. Dua kritik utama dari neorealisme sekaligus dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena rencana agresi militer atau pelengseran Saddam Hussein adalah:

### 1. Interdependensi

Neorealisme memandang bahwa negara tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara selalu bergantung satu sama lain. Jika suatu negara berubah pasti berdampak pada negara lain. Oleh karena itu jika suatu negara yang ingin mengambil langkah ia harus memperhitungkan negara - negara lain.

### 2. Isu ekonomi politik internasional

**Robert Gilpin** dan **Krasner** menyatakan bahwa fenomena hubungan internasional yang utama bukan hanya politik, tetapi juga harus memperhitungkan ekonomi. Jadi isu utama neorealisme adalah ekonomi politik internasional.

Menurut pendekatan Neorealisme, indikator sistem adalah otomatisasi, keberulangan dan batas – batas yang jelas. Di dalam fenomena hubungan internasional, terkandung sistem. Maka untuk memahami di dalam sistem ada

<sup>47</sup> Steven L. Spiegel, *World Politics In The New Era*, Los Angeles, College Publisher, Harcourt Bacra, UCLA, 1995, Glossary, b-2.

kondisi yang anarkis. Kondisi tersebut menimbulkan *Balance of Power* di dalam sistem dengan kata lain setiap negara berlomba – lomba untuk memaksimalkan power-nya (*Power Maximazing Agent*). Neorealisme juga mengakui bahwa ada usaha untuk meningkatkan power lewat ekonomi. Caranya adalah dengan *embodiment of structural power*. Jadi maksudnya dalam suatu sistem internasional ada rezim yang memungkinkan suatu negara untuk mengontrol agenda internasional. Mekanisme pembentukannya adalah stabilitas hegemonik, yaitu jika suatu kekuatan ekonomi dapat mempertahankan stabilitas hegemonik yang membuat negara –negara lain bekerja sama dengannya. Stabilitas akan berlanjut dalam bentuk rezim yang kemudian akan mempromosikan kepentingan ekonomi dari negara hegemonik.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Yulius P. Hermawan, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional : Karakteristik Interdisipliner dan Eurosentris dalam Disiplin Hubungan Internasional*, PACIS, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.15.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TIMUR TENGAH

#### 2.1 Gambaran Situasi Timur Tengah

Timur Tengah adalah terjemahan dari “ *Middle East* ”, suatu istilah yang sejak Perang Dunia II digunakan orang – orang Inggris dan Amerika untuk menyebutkan kawasan yang sebagian besar terletak di Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut dan merupakan jembatan antara Eropa, Asia dan Afrika. Istilah itu berasal dari perluasan wilayah komando militer Inggris yang mula – mula mencakup negeri – negeri di sebelah Timur Terusan Suez, sebagai persiapan perang. Sampai sekarang, sebenarnya tidak ada kata sepakat tentang negeri – negeri mana yang termasuk Timur Tengah.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa wilayah Timur Tengah adalah negara – negara Arab non- Afrika ditambah Iran dan Israel. Dengan definisi ini, negara – negara Arab yang terletak di Afrika Utara, seperti Mesir, Libya, Maroko, dan Aljazair tidak dapat dimasukkan dalam kategori wilayah Timur Tengah. Pemahaman seperti ini misalnya dianut oleh David E. Long dan Bernard Reich.

Pedapat kedua mengartikan Timur Tengah sebagai negara – negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambah Iran, Israel, dan Turki. Pandangan ini antara lain dianut oleh Roy R. Anderson, Robert F. Seibert, Jon G. Wagner, dan Robert O. Freddman. Sedangkan pandangan ketiga adalah yang memasukkan negara – negara seperti Afganistan, Pakistan, bahkan negara – negara Asia Tengah bekas Sovyet, ke dalam wilayah timur Tengah. Hal ini terlihat antara lain pada majalah *The Middle East* ( terbitan Inggris ) dan *The Middle East Journal* ( terbitan Amerika Serikat ).

Dalam tulisan ini, mengikuti definisi yang paling umum, dimana pengertian Timur Tengah mengikuti negeri – negeri berikut : di Eropa – Turki bagian Eropa, di Asia – Turki bagian Asia, Iran, Irak, Israel, Suriah, Jordania, Arab Saudi, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait, di Afrika – Mesir, Sudan, dan Libya. Berdasarkan



pertimbangan kebudayaan dan politik, Tunisia, Aljasair, dan Maroko termasuk pula dalam pembatasan Timur Tengah. Ketiga negara terakhir ini adalah bagian Barat dunia Arab yang disebut "Jazirat al Maghreb " atau Maghreb.<sup>1</sup>

Kawasan Timur Tengah cukup luas dan sebenarnya mencakup dua sub-kawasan, yaitu sub-kawasan Asia Barat dan Maghribi di Afrika Utara. Sub-kawasan Asia Barat, mencakup negara- negara seperti Iran, Turki, Irak, Suriah, Jordania, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan negara – negara kecil lainnya di Teluk Persia. Israel termasuk pula dalam sub-kawasan ini. Sedangkan sub-kawasan Maghribi adalah Mesir, Sudan, Libya, Aljazair, Tunisia dan Maroko.<sup>2</sup>

Secara garis besar, Timur Tengah<sup>3</sup> dapat dibagi menjadi dua, yaitu dunia Arab dan dunia bukan Arab. Israel, Iran, Siprus dan Turki adalah dunia yang bukan Arab. Sedangkan yang lainnya adalah merupakan dunia Arab.

Dunia Arab, walaupun memiliki kesatuan linguistik dan kultural, bukanlah sesuatu yang seragam. Bahkan dapat dikatakan salah satu cirinya adalah keanekaragaman, yang sampai kini menghambat gerakan persatuan Arab. Apa yang disebut Pan Arabisme masih merupakan suatu cita – cita daripada kenyataan dan masih merupakan suatu obsesi yang menjadi persaingan para pemimpin Arab dalam memperjuangkannya.

Selain adanya persaingan untuk menjadi pemimpin Arab yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan, juga terdapat perpecahan antara negara – negara yang konservatif dan revolusioner, yang pro Barat dan anti Barat, yang kaya dan yang miskin, yang fanatik Islam dan yang terbuka untuk modernisasi dan pembaharuan. Sampai kini, sejarah Liga Arab yang dibentuk sebagai alat pemersatu sebagian besar adalah sejarah perselisihan dan perpecahan, karena perbedaan kepentingan dan pandangan para anggota yang sulit untuk disatukan.

---

<sup>1</sup> Pengertian ini seperti apa yang dipakai dalam, *Skripsi*, Aminah Kusuma, "Faktor – Faktor Penyebab Hadirnya Pasukan Amerika Serikat ( Multinasional ) di Arab Saudi Sehubungan dengan Invasi Irak ke Kuwait", Unej, Jember, 1992, hal. 24 - 25.

<sup>2</sup> Teuku May Rudi, "Kekerasan di Timur Tengah", *Media Indonesia*, 29 April 1996, hal. 6.

<sup>3</sup> Semua negara – negara di Timur Tengah berpenduduk mayoritas Islam, kecuali Israel. Bahkan, kawasan Timur Tengah ini, khususnya oleh negara – negara Barat, lazim diidentikkan dengan dunia Islam. Selain dengan Pan-Arabisme, negara – negara di Timur Tengah erat kaitannya dengan Pan-Islamisme.

Jika kita tinjau dari segi perkembangan sejarah, maka wilayah – wilayah di kawasan Timur Tengah ini pernah bersatu dalam kekuasaan Turki Ustmaniyah ( *Ottoman Empire* ). Ini berlangsung abad XV – XIX. Lalu, dalam akhir abad XIX mulai masuk pengaruh dan intervensi negara – negara Barat.<sup>4</sup>

Setelah Perang Dunia II, negara – negara di kawasan Timur Tengah berangsur – angsur memperoleh kemerdekaannya kembali. Tetapi ada beberapa perubahan dari masa sebelum berlangsungnya campur tangan negara – negara *Old Powers* ( Eropa ) di kawasan itu, khususnya mengenai pembagian wilayah atau penetapan garis perbatasan. Hal inilah, yang pada umumnya menjadi pemicu konflik – konflik regional di Timur Tengah di antara sesama negara Arab. Selain itu, keberadaan suatu negara non-Arab di kawasan itu, yaitu Israel menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Kawasan Timur Tengah telah sejak lama dikenal sebagai salah satu *trouble spot* di dunia. Berbagai kejadian di kawasan tersebut mulai dari konflik internal suatu negara, konflik antar negara sampai konflik yang melibatkan negara – negara luar yang mempunyai kepentingan di kawasan Timur Tengah, membuat setiap persoalan yang muncul di kawasan menjadi isu internasional yang sulit dicari penyelesaiannya.<sup>6</sup> Penyebab konflik di kawasan Timur Tengah antara lain adalah nasionalisme, agama, politik perimbangan kekuatan dan ambisi pribadi. Konflik Arab – Israel, Perang Irak – Iran, konflik antar Arab adalah contoh konflik yang bersumber pada faktor – faktor di atas.<sup>7</sup> Pola konflik kawasan tersebut juga diwarnai oleh adanya motivasi untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak dan air.

Hubungan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah demikian kompleks, sehingga orang sering mengalami kesulitan dalam memahami pola – pola hubungan dan interaksi di kawasan Timur Tengah. Salah satu faktornya adalah banyaknya aktor regional yang memiliki kepentingan yang saling

<sup>4</sup> Rudi, *Op. Cit.*, hal. 6.

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Bantarto Bandoro, editor, "Timur Tengah Pasca Perang Teluk, Dimensi Internal dan Eksternal", CSIS, Jakarta, 1991, hal. 1.

<sup>7</sup> Bantarto Bandoro, "Struktur Keamanan Kooperatif di Kawasan Timur Tengah", dalam *Analisis CSIS* XXIV, Mei – Juni, No. 3, Jakarta, 1995, hal. 200.

bertentangan, di samping sumber konflik regional. Selain itu, tingkat kerawanan strategis di antara negara – negara regional cukup tinggi dan kerawanan demikian ini dapat mengundang intervensi kekuatan - kekuatan eksternal. Sebagai akibat hubungan yang kompleks ini, perimbangan sub-kawasan, misalnya di kawasan Teluk, dan kawasan konflik Arab-Israel, akan sangat dipengaruhi oleh perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Misalnya, akuisisi secara masif senjata – senjata konvensional, proliferasi senjata pemusnah massal dan pertumbuhan dalam kemampuan industri militer.<sup>8</sup> Hubungan kekuatan ( *power relations* ) antar negara di Timur Tengah yang dibentuk oleh faktor – faktor tersebut begitu tajam sehingga dapat menimbulkan kecurigaan pihak yang satu terhadap lainnya.<sup>9</sup>

Konflik Teluk yang bermula dari invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 dan meledak jadi Perang Teluk pada awal tahun 1991 antara Irak dan negara – negara Sekutu pimpinan Amerika Serikat telah merubah drastis peta politik dan militer Timur Tengah. Setelah Irak mengalami kehancuran militer total, Israel menjadi *super power* regional di Timur Tengah sendirian, tanpa pesaing.

Perang Teluk yang berlangsung enam minggu mampu membuat wajah baru Timur Tengah di luar dugaan Saddam Hussein sendiri, dan bahkan di luar perhitungan George Bush. Wajah baru Timur Tengah itu tercermin dalam berbagai perubahan.<sup>10</sup> **Pertama**, Irak kembali menjadi negara terkuat di Teluk, setelah sebelumnya tampak berada di bawah Iran, terutama karena yang terakhir ini selama perang delapan tahun melawan Irak berhasil membangun angkatan bersenjata yang cukup disegani. Di tengah berlangsungnya Perang Teluk antara Irak dengan negara – negara sekutu pimpinan Amerika Serikat, Irak terpaksa minta damai pada Iran dengan kesanggupan memenuhi semua syarat Iran.

**Kedua**, seperti disebut di muka, Israel merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam Perang Teluk. Ancaman militer Irak sudah lenyap sama sekali

<sup>8</sup> Ringkasan mengenai perdagangan senjata regional dapat ditemukan dalam Yezid Sayigh, "Arab Military Industry : Capability, Performance, and Impact", Brassey's, London, 1992, dalam *Ibid.*, hal. 201.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 201-202.

<sup>10</sup> M. Amien Rais, " Arah Perkembangan Timur Tengah ", dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 12 AIPI dan LIPI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 19.

dan Israel tidak kehilangan serdadu satu pun, karena Amerika Serikat-lah yang menghancurkan mesin Perang Irak. Israel bahkan memperoleh keuntungan – keuntungan yang didapat selama dan sesudah perang, antara lain sejumlah rudal – anti - rudal patriot dan senjata – senjata canggih Amerika Serikat yang dipindahkan ke Israel dari negara – negara Arab - anti- Irak. Senjata – senjata super canggih yang digunakan Amerika Serikat selama Perang Teluk banyak diberikan ke Israel. Dengan kata lain, Israel yang sudah kuat menjadi lebih kuat lagi dengan adanya tambahan senjata – senjata canggih itu.

**Ketiga**, Syria yang selamanya bersikap anti Amerika Serikat atau paling tidak, sangat kritis pada AS, secara tiba – tiba menjadi teman Amerika Serikat. Sebelum Perang Teluk, Syria sering dituduh oleh Washington sebagai negara pelindung kaum Teroris dan dianggap sebagai agen Sovyet ( sekarang Rusia ) yang sangat setia. Namun sikap Amerika Serikat segera berubah setelah Syria di bawah Hafiz Assad bersedia menjadi peserta koalisi anti Irak. Persepsi Amerika Serikat berubah dengan cepat, bahkan George Bush maupun James Baker memberi pujian pada Hafiz Assad sebagai tokoh bijaksana dan realis.

**Keempat**, Arab Saudi, Kuwait, dan negara – negara Arab Teluk lainnya seperti Unu Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain semakin dalam jatuh ke pelukan Amerika Serikat. Negara – negara ini, terutama Arab Saudi dan Kuwait, merasa berhutang budi pada Amerika Serikat karena Amerika Serikat telah melenyapkan ancaman Saddam dan khusus bagi Kuwait, Amerika Serikat adalah sang pembebas. Walaupun sebagian besar ongkos perang ditanggung oleh Arab Saudi dan Kuwait, tetapi kedua negara ini merasa bahwa George Bush adalah Pahlawan mereka. Untuk masa – masa mendatang agak sulit dibayangkan Saudi dan Kuwait dapat melepaskan diri dari genggaman Amerika Serikat.

**Kelima**, Jordania yang sebelum Perang Teluk selalu berada dalam hubungan baik dengan Amerika Serikat, kemudian mengalami ketegangan serius dengan Washington karena Jordan melakukan pemihakan pada Irak. Raja Hussein tidak mungkin mengambil posisi selain pro Saddam, karena mayoritas rakyat Jordan adalah bangsa Palestina yang begitu antusias mendukung Saddam. Oleh Karena itu, Jordan harus menerima dampak negatif kekalahan Irak, termasuk

hubungannya yang memburuk dengan negara – negara Arab anti Irak, terutama Arab Saudi dan Kuwait.

**Keenam**, pamor dan citra PLO melorot berbarengan dengan kekalahan Irak yang benar- benar fatal. Memang sulit dibayangkan Yasser Arafat mengambil keputusan berbeda dari kemauan arus bawah rakyat Palestina. Selama Konflik Teluk berlangsung, rakyat Palestina di Tepi Barat, Gaza dan di kerajaan Jordan memihak Saddam secara sangat mencolok. Saddam menadi satu – satunya harapan Palestina untuk menekan Israel agar berhenti dari politik penindasannya atas bangsa Palestina. Bahkan tinggal Saddam saja di kalangan pemimpin Arab yang masih punya nyali untuk menentang Israel. Dengan kata lain, Saddam lantas menjadi pahlawan Palestina. Karena itu tidak sukar memahami bahwa kekalahan Irak juga merupakan kekalahan PLO.

**Ketujuh**, Amerika Serikat sekarang menganggap sebagian besar Timur Tengah adalah wilayah pengaruhnya ( *sphere of influence*). Di samping Israel yang menjadi semacam agen langsung kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, negara – negara Arab kunci seperti Mesir, Arab Saudi, dan Syria kini makin jauh lagi jatuh dalam pengaruh Amerika Serikat. Kairo, Riyadh, dan Damaskus bukan saja dapat memahami tetapi juga sekaligus melayani apa yang diinginkan oleh Washington. Terutama Saudi dan Mesir dapat dikatakan sudah masuk ke dalam kantong Amerika Serikat.

**Kedelapan**, Amerika Serikat hadir secara militer di berbagai tempat di kawasan Timur Tengah, terutama di kawasan Kuwait dan Arab Saudi. Beberapa armada berkeliaran di kawasan Teluk dalam rangka berpatroli “mengamankan” Teluk. Kehadiran militer itu sudah tentu tidak sangat mencolok seperti selama Perang Teluk, tetapi fenomena militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu sama sekali baru dan merupakan akibat kemenangan Amerika Serikat yang demikian mutlak.

Konflik utama di kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia II, adalah negara – negara Arab dengan Israel yang secara lebih khusus adalah konflik antara Palestina dengan Israel dimana telah berlangsung sejak berdirinya negara Israel di tanah bangsa Palestina pada Mei 1948.

Masalah yang merupakan ganjalan dan mungkin bisa memicu konflik secara terbuka hingga dewasa ini adalah mengenai hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat penuh atas ( sebagian ) wilayah Palestina yang diduduki Israel dan wilayah Suriah ( Dataran Tinggi Golan ) yang disebut Israel dalam perang pada tahun 1973.

Penyebab utama konflik di kawasan Timur Tengah yang kini telah menjadi gumpalan “ batu keras ” tidak lain adalah politik Dunia Barat yang memecah belah dan membagi - bagi Dunia Arab ke dalam daerah pengaruh mereka masing - masing, menyerahkan Palestina ke tangan Zionis dan meremehkan ajaran Islam. Semua itu dilakukan demi kepentingan mereka untuk menguasai kawasan yang memiliki nilai vital dan strategis itu.<sup>11</sup>

Keberadaan Israel sendiri dengan luas wilayahnya di tengah negara - negara Arab, telah menjadi *dispute* berkepanjangan yang hingga hari ini belum ada kesepakatan yang pasti. Secara historis, emperium - emperium yang pernah berkuasa di Timur Tengah, baik Mesir, Persia, maupun Romawi dan bahkan emperium Ottoman Turki, belum pernah berhasil menyepakati tapal batas yang jelas bagi keberadaan wilayah Israel.<sup>12</sup>

Konflik yang semula berakar dari kepentingan Israel untuk memiliki *national territory* bagi bangunan *national home*-nya itu, kini telah berkembang demikian rumit dan runyam dengan semakin kuatnya posisi Israel dan terus terjepitnya posisi Arab untuk menggolkan usulan - usulan perdamaian serta masuknya konsep perdamaian hasil rekayasa pihak - pihak yang berkepentingan. Konflik ini telah berkembang menjadi konflik multi-dimensional.<sup>13</sup>

Sebagaimana hal ini juga diakui oleh pemimpin - pemimpin Arab khususnya Gamal Abdul Nasser, setiap *move* politik atau perang dalam konteks

<sup>11</sup> H. Ruslan Abdulgani, “Gagasan Orde Arab Baru Seusai Perang Teluk”, *Merdeka*, 22 Pebruari 1991, hal. 5, dalam M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 1.

<sup>12</sup> John Keegan & Andrew Wheatcroft, “Zones of Conflict : An Atlas of Future Wars”, Jonathan Cape Bedford Square, London, 1986, hal. 29, dalam *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Mohammad Shoelhi, “Babak Baru Perundingan Timur Tengah”, *Kompas*, 12 Agustus 1991, hal. 4, dalam *Loc. Cit.*

Timur Tengah merupakan hasil rancangan bersama antara Israel dan Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Di satu sisi, sulitnya penyelesaian konflik ini secara mendasar disebabkan tidak terdapatnya titik temu dalam sikap masing – masing pihak yang bertikai, yaitu Arab dan Zionis Israel. Arab kukuh tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai Israel, dan Israel bersikeras untuk sementara tidak akan mengubah batas wilayahnya seperti saat ditinggalkan Inggris pada tahun 1948 atau pun menyerahkan wilayah pendudukan tanpa suatu imbalan.<sup>15</sup>

Sementara itu, keterlibatan kekuatan luar – sebutlah Dunia Barat atau lebih eksplisit lagi Amerika Serikat yang tidak netral untuk ikut memainkan peran dalam konflik ini sulit dibendung dan hanya kian memperkeruh situasi karena lingkungan eksternal itu mendomplengkan kepentingan – kepentingannya. Inilah antara lain yang telah mendorong Israel untuk menjadi kian arogan dalam mengekspresikan sikap dan niat dalam upayanya untuk menganggangi Arab dan mempertahankan “hak”-nya atas tanah Palestina.<sup>16</sup>

Walaupun tidak memiliki jumlah penduduk yang besar dan tidak memiliki sumber – sumber minyak bumi, Israel merupakan sekutu yang penting bagi Amerika Serikat karena kekuatan militer serta integritas nasionalnya yang kuat. Karena begitu pentingnya Israel bagi Amerika Serikat, dalam suatu perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut Amerika Serikat menyatakan Israel sebagai “ sekutu non-NATO yang terpenting bagi Amerika Serikat “. Sebagai konsekuensinya Israel mendapatkan perlakuan khusus dalam pembelian peralatan militer buatan Amerika Serikat.

Hubungan erat antara Amerika Serikat dengan Israel tidak disukai oleh sekutu – sekutu Amerika Serikat di kalangan negara – negara Arab. Sebaliknya, Israel mencurigai setiap tindakan pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat

---

<sup>14</sup> Lihat Pidato Gamal Abdul Nasser di Universitas Kairo, “The Most Severe Crisis”, Kairo, 23 Juli 1967, Walter Lagueur & Barry Rubin, *The Israel – Arab*, Penguin Books, London-England, 1984, dalam *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Mohammad Shoelhi, *Visi Periferal dalam Konflik Arab – Israel*, Kompas 18 Maret 1992, hal. 4, dalam *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Mohammad Shoelhi, “Visi Periferal dalam Konflik Arab – Israel,” *Kompas*, 18 Maret 1992, hal. 4, dalam *Ibid.*, Hal. 3.

terhadap negara – negara Arab. Friksi antara Israel dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Reagan mengambil keputusan untuk menjual pesawat AWACS dan sejumlah rudal ke Saudi Arabia. Israel memprotes keras keputusan ini karena dianggap akan membahayakan keamanan Israel.

Walaupun peran lobi Israel di Amerika Serikat sering dianggap sebagai penyebab utama kebijaksanaan Amerika Serikat yang mendukung Israel, namun lobi ini tidak selalu mengambil posisi yang sama dengan Israel. AIPAC ( *American – Israel Political Action Committee* ) yang merupakan lobi Israel di Amerika Serikat, berulang kali menentang keinginan perdana menteri Israel. Hal ini pernah terjadi ketika Perdana Menteri Shamir dianggap terlalu konservatif dan menghambat proses perdamaian. Selain itu, Israel dianggap terlalu sering menggunakan kekerasan untuk memadamkan kegiatan intifada oleh masyarakat Palestina.

Di lain pihak, Amerika Serikat selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan hubungannya dengan negara – negara penting di Timur Tengah yang sekaligus dapat menjamin tercapainya tujuan utama Amerika Serikat di wilayah tersebut. Saudi Arabia dan negara – negara Teluk merupakan sekutu Amerika Serikat yang penting karena kekayaan minyak dan gas alam mereka. Hubungan seperti itu juga dipakai Amerika Serikat dalam hal pemasokan senjata.

Pentingnya arti Timur Tengah juga tercermin dalam jumlah bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk negara – negara di kawasan tersebut. Lebih dari 40 % bantuan luar negeri Amerika Serikat dipusatkan untuk Israel, Mesir dan Turki. Sebagian besar dari bantuan ini adalah dalam bentuk bantuan keamanan atau *Security Assistance*.<sup>17</sup>

Ada dua pendapat berkenaan dengan keterlibatan pihak – pihak di lingkungan eksternal dalam konflik ini. Pertama, keterlibatan itu didasarkan atas kepentingan yang ingin diraihnya. Pendapat kedua menyatakan bahwa keterlibatan itu disebabkan konflik yang semakin bergolak ini menampilkan

---

<sup>17</sup> Untuk lebih lanjut lihat, Harry Q. Nowels, *Foreign Aid : Budget, Policy & Reform*, Congressional Research Service, Washington D. C., 1989, hal. 10 – 11, dalam Smita Notosusanto, " Krisis Teluk dan Politik Luar Negeri AS Pasca perang Dingin ", *Global*, Jurnal Politik Internasional No. 2, Kerja Sama UI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal.46.



ancaman terhadapnya. Sebagian kalangan mengikuti pendapat kedua, seperti dijelaskan J. B. Kelly bahwa Timur Tengah sekarang ini sangat bergejolak dan sangat tidak stabil seperti lazimnya sejak dulu dan ketidakstabilan inilah yang menampilkan ancaman terbesar terhadap kepentingan Barat di kawasan ini.<sup>18</sup>

Melihat setting yang terbentuk pada tataran sistem politik di Timur Tengah, secara sederhana dapat disimpulkan betapa posisi Israel yang merupakan minoritas di kawasan tersebut mampu memantapkan posisinya sedemikian rupa. Sedangkan di sisi lain, mayoritas negara – negara Arab berada dalam posisi tidak menguntungkan sehingga secara keseluruhan tidak mampu merespon untuk mewujudkan keseimbangan kekuatan yang dapat mengatasi keperkasaan minoritas Israel.

Negara – negara Arab tampaknya malah lebih mengutamakan kepentingan “nasional”-nya sendiri – sendiri dan mempertahankan *status quo* ketimbang kepentingan bersama bagi berdirinya Palestina merdeka. Para pemimpin Arab ini tidak kondusif untuk mengusung nilai – nilai persatuan dan musyawarah mufakat yang pernah mereka perjuangkan seperti tercermin pada nilai – nilai Pan Arabisme yang kini sudah mulai terkelupas. Bangsa Arab mundur kembali ke permusuhan lama di antara mereka. Buktinya, pada umumnya mereka belum pernah benar – benar bersatu dalam menentukan sikap terhadap Israel. Kalau toh mereka pernah bersatu, persatuan itu sifatnya hanya temporal saja seperti pada era Nasser.

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kehadiran Israel dan keikutsertaan Amerika Serikat yang melakukan “ campur tangan ” untuk menata kehidupan politik negara – negara Timur Tengah pada kenyataannya telah memberikan korelasi positif terhadap tumbuhnya peperangan, pertikaian dan perpecahan di antara negara – negara Arab tersebut.

Selain itu, terdapat pula beberapa konflik lainnya secara sporadik. Misalnya, Perang Irak – Iran ( 1980-1988 ). Konflik di Kuwait ( 1991 ) yang masih berlanjut dengan ketegangan dan permusuhan Irak – Amerika Serikat serta negara

---

<sup>18</sup> J. B. Kelly, *Arabia, the Gulf and the West*, Basic Books, London, 1980, page vii, dalam *Ibid.*, hal. 4

– negara Arab monarki. Pertikaian mengenai pulau – pulau kecil di Teluk Persia antara Iran dengan negara – negara kecil di sekitar Teluk Persia itu ( UEA, Qatar, Bahrain ). Pernah pula antara lain berlangsung konflik di Teluk Sidra antara Libya – Amerika Serikat ( 1985 ). Konflik Irak – Jordania ( 1995 ) sehubungan dengan pembelotan panglima angkatan bersenjata Irak yang juga menantu Presiden Saddam Hussein ke Jordania ( 1995 ).<sup>19</sup> Pada tahun 2003 ( 20 Maret 2003 ), Amerika Serikat dengan pasukan koalisinya kembali menyerang Irak sehingga terjadi konstelasi politik baru dalam konteks hubungan internasional.

Oleh berbagai kalangan, faktor minyak dan Israel tidak bisa dilepaskan dari aksi invasi Amerika Serikat ke Irak tersebut. Timur Tengah memang bukan hanya hamparan padang pasir yang luas. Jauh di bawah tanah tersimpan setidaknya 70 % cadangan minyak dunia. Dari catatan terakhir OPEC, cadangan minyak yang ada di Timur Tengah sedikitnya ada 800 miliar barel dan tersebar hanya di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab ( UEA ), dan Qatar.<sup>20</sup> Cadangan minyak terbesar di dunia ada di Arab Saudi, yakni sebesar 262, 64 miliar barel. Rata – rata produksi minyak Saudi 7,9 juta barel per hari ( bph ), di mana sekitar 6 juta barel lainnya diekspor, diantaranya ke Amerika.<sup>21</sup> Irak, hingga akhir Maret 2003 memiliki cadangan minyak sebesar 112,5 miliar barel yang merupakan cadangan terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi.<sup>22</sup> Sebelum embargo dan sanksi PBB diberlakukan, produksi rata – rata minyak Irak per harinya mencapai 3,5 juta bph. Sejak sanksi PBB keluar, Irak hanya memproduksi minyak sebesar 2,2 juta bph. Itu pun diperuntukkan bagi program kesehatan dan pendidikan anak – anak Irak atau dikenal sebagai “ *Oil For Food* “. Sejumlah analis minyak Barat memperkirakan, jika kapasitas produksi minyak Irak berjalan dengan baik, negeri seribu satu malam itu, mampu memproduksi minyak hingga 5,5 juta bph.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Rudi, *Op. Cit.*, hal. 6.

<sup>20</sup> Elba Damhuri, *Di Balik Invasi AS ke Irak*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003, hal. 12.

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

Mengingat cadangan minyak yang sedemikian besar, Timur Tengah sangat wajar menjadi perebutan bagi negara – negara industri terutama Amerika Serikat dan Eropa. Begitu juga, Jepang, Rusia dan Cina. Perhatian negara besar terhadap kawasan Teluk, sesungguhnya tidak bermula dari saat penemuan minyak di kawasan tersebut, tetapi sudah jauh sebelumnya, mengingat letak kawasan itu yang sangat strategis.

Jalur Timur Tengah dipakai oleh Amerika Serikat sebagai jalur pengiriman minyak dari Asia Tengah, sehingga untuk memenuhi kepentingan strategis Amerika di kawasan Timur Tengah, Amerika berkepentingan untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Sesudah Perang Dingin, Amerika Serikat adalah pelaku utama dalam pentas kekuasaan dunia. Tahun – tahun terakhir perlombaan terkonsentrasi pada masalah : dimana dapat dibangun instalasi pipa minyak untuk mentransportasikan minyak bumi dari Baku ( Azerbaijan ) ke negara – negara Barat.

Arti strategis kawasan Timur Tengah telah menjadikan kawasan itu menjadi perhatian dunia internasional dan memunculkan berbagai pola konflik dan pola hubungan. Konflik yang muncul kadang bersifat kronis dan sangat sulit diselesaikan akibat memiliki banyak dimensi dan bersifat kompleks.

## 2.2 Politik dan Pemerintahan Irak

Dalam kilasan sejarah,<sup>24</sup> Irak merupakan salah satu pusat peradaban manusia yang tertua di dunia. Semenjak sebelum tahun 3000 S.M. telah terdapat di sana orang Sumeria yang pernah mendirikan sebuah masyarakat yang maju berdasarkan pertanian yang beririgasi. Setelah itu, terdapat pula orang Akadia, yaitu suatu ras Semitis yang tinggal di daerah sekitar Babylonia. Mereka juga pernah mendirikan negara yang jangkauan daerahnya mencapai Laut Tengah. Raja Hammurabi, sekitar 2100 S. M., yang terkenal dengan undang – undangya itu, juga memerintah dari daerah Irak bagian Selatan. Di bawah Nebukadnezzar ( 604 – 562 S. M. ), Irak menjadi pusat daripada sebuah negara Babylonia yang baru,

<sup>24</sup> Penulis banyak mengambil atau meringkas materi ini dari, Riza Sihbudi ( et.al. ), Profil Negara – Negara Timur Tengah, Buku Satu, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 48.

yang menguasai sebagian besar kawasan yang terkenal dengan nama Bulan Sabit Subur (*Fertile Crescent*).

Khalifah IV dari Khulafa-ur-Rasyidun, yaitu Ali bin Abi Thalib telah memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah di Irak. Tampaknya ia terpaksa melakukan itu, karena sebagian besar pendukungnya berada di sana.

Di bawah Dinasti Bani Umayyah, kekuasaan Islam berkembang sehingga membentang mulai dari pantai Atlantik dan Prancis Selatan sampai ke perbatasan Cina. Dengan demikian, Irak hanyalah merupakan sebuah provinsi saja. Namun dalam pada itu Irak telah menjadi pusat sebuah gerakan oposisi terhadap Dinasti Bani Umayyah, yaitu gerakan Syiah dan gerakan Bani Abbas. Kemudian Bani Abbas memindahkan pusat pemerintahan Dunia Islam ke kota Baghdad di Irak.

Ketika Irak hidup dalam kekacauan yang tidak menentu, Irak bagian Utara pada umumnya dihuni oleh bangsa Arab dan bangsa Kurdi yang bermazhab Sunni. Irak bagian Selatan pada umumnya dihuni oleh penduduk Islam yang bermazhab Syiah. Kenyataan perbedaan antara Arab dan non-Arab, serta perbedaan antara golongan Sunnah dan Syiah ini, telah menjadi sumber ketegangan di dalam negeri Irak.

Pada akhirnya Irak menjadi bagian dari Kerajaan Usmani. Kerajaan Islam yang besar ini untuk waktu yang cukup lama telah merupakan lambang dari kekuasaan Islam di dunia. Ia juga telah berhasil membawa agama Islam sampai ke pusat – pusat Benua Eropa.

Dalam beberapa Abad terakhir, bangsa Barat telah bangkit sebagai bangsa yang agresif dan berupaya untuk menundukkan seluruh bagian dunia yang lain untuk kepentingannya. Dalam hubungannya dengan Irak, maka dalam Perang Dunia I daerah itu diduduki Inggris. Irak dalam pandangan Inggris adalah daerah yang sangat strategis untuk menguasai daerah – daerah jajahannya di Timur terutama India.

Namun Inggris menghadapi beberapa kendala. Pemberontakan tahun 1920 di Irak terhadap Inggris menyadarkan bahwa penjajahan tidak bisa dipertahankan

terhadap Irak. Apalagi jika diingat bahwa tugas yang diberikan kepada Inggris adalah mempersiapkan Irak untuk menjadi sebuah negara yang merdeka.

Pada akhirnya tahun 1921, mereka memilih Raja Faisal dari keluarga Hasyim untuk menjadi raja Irak. Keluarga Hasyim itu adalah pendukung Inggris yang loyal dalam Perang Dunia I, terutama dalam menghadapi Turki Usmani.

Dinasti Hasyimiah runtuh ketika gabungan kekuatan nasionalis, sosialis dan komunis dibawah pimpinan Abd al - Karim Kassim menggulingkan pemerintahan Nuri al - Said dan membunuh keluarga kerajaan pada tahun 1958. Selama satu dasa warsa berikutnya pemerintah Irak ditandai dengan suasana Praetorian. Pada 1968 stabilitas politik tercapai di Irak dengan naiknya Ahmad Hassan al - Bakr sebagai presiden dan tokoh - tokoh Partai Baath menjadi tokoh - tokoh pemerintahan.

Ghazi ( 1933 - 1939 ) adalah pengganti Raja Faisal I. Dalam pemerintahannya, Ghazi digulingkan oleh pihak militer, yaitu pada tahun 1936. ini adalah kudeta pertama dan kudeta untuk selanjutnya sering terjadi terutama oleh pihak militer. Namun, biasanya dilakukan untuk menjatuhkan kabinet, bukan menentang pribadi penguasa.

Setelah Perang Dunia II, ada lima partai politik yang mendapat izin dari pemerintah, namun pada tahun 1956 semua partai politik yang ada telah dilarang. Penguasa ketika itu ( Nuri ) sangat bengis dan sangat dibenci oleh rakyat Irak. Tindakan Nuri ini menjadikan banyak tokoh politik yang masuk penjara.

Sejak semula, terutama setelah dibebaskannya semua tahanan politik itu, telah terdapat tanda - tanda bahwa dunia politik Irak terbagi menjadi empat faksi. Yakni kaum Komunis, Nasionalis, Kurdi, Nasionalis Moderat.

Dari proses suksesi yang pernah terjadi di Irak, yang menarik dan banyak berkaitan dengan mengapa Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Irak adalah pemerintahan Saddam Hussein yang baru naik menjadi Presiden Irak pada tahun 1979 yang sebelumnya hanya kuat dibelakang layar.

Saddam yang merupakan pengganti Bakr, merupakan presiden yang sebenarnya banyak membawa perubahan baik terhadap dimensi dalam negeri maupun luar negeri. Politik dan pemerintahan Irak di bawah Saddam Hussein

memang agak stabil, namun tidak memperhatikan nilai – nilai kemanusiaan dan kebebasan, sehingga pemimpin diktator tersebut menjadi kecaman dunia internasional dan sering mengalami ancaman.

Rezim Baghdad selalu cenderung untuk menolak pemberian otonomi bagi bangsa Kurdi dan pemberontakan permanen mereka terhadap Baghdad telah menyedot kekuatan ekonomi, militer dan meminta korban jiwa cukup banyak rakyat Irak sendiri. Baru pada tahun 1975 pemberontakan Kurdi mereda berkat kesediaan Syiah Iran untuk menarik bantuannya bagi bangsa Kurdi di Irak sebagai imbalan konsesi Shat al – Arab yang diberikan Saddam Hussein kepada Irak. Nampaknya, sejak 1975, persoalan Kurdi bagi rezim Baghdad bukan lagi merupakan persoalan berat terutama sesudah Baghdad memberikan otonomi pendidikan, pemerintahan dan keleluasaan pengelolaan ekonomi daerah Kurdistan Irak.

Rezim Saddam Hussein relatif berhasil mengatasi masalah minoritas Kurdi, tetapi tidak berarti bahwa tidak ada masalah – masalah nasional penting lainnya yang harus dihadapi oleh Saddam dalam memantapkan legitimasi politiknya.

Masalah – masalah itu antara lain adalah, pertama, stabilitas politik Irak di bawah Saddam dicapai dengan ongkos yang mahal dengan digunakannya teror dan intimidasi bagi lawan – lawan politik pemerintah. Masalahnya ialah dalam jangka panjang model pemerintahan semacam ini akan menimbulkan letusan sosial politik yang tidak saja akan mendestabilisasi rezim Baghdad, tapi juga akan mampu meruntuhkan rezim itu sendiri, baik dari dalam negeri sendiri atau terjadi intervensi asing.

Kedua, identitas nasional bangsa Irak sampai kini boleh dikatakan belum mantap, mengingat kesetiaan rakyat Irak yang sebagian bersifat subnasional dan sebagian lagi bersifat supra nasional. Pan- Arabisme sejak dipropagandakan oleh Nasser menjadi populer di kalangan rakyat Sunni, yang dominan secara politik, tetapi tidak di kalangan kaum Syiah yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum Sunni.

Ketiga, seperti halnya Suriah, Irak juga menghadapi isolasi. Pertentangan dan persaingan Irak dengan Suriah dan Saudi Arabia, serta kekhawatiran negara – negara Arab Teluk, terutama Kuwait terhadap Irak menjadikan Irak dan Pan-Arah suatu “ *contradictio in terminis* “. Di satu pihak salah satu “ *raison d’etre* “ partai Baath adalah keinginan untuk mewujudkan Pan-Arab, namun di lain pihak, rezim Irak yang sepenuhnya dikuasai oleh tokoh – tokoh Baath melancarkan politik yang bersifat disintegratif terhadap Pan-Arab.

Dalam hal politik luar negeri, Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein turut menggunakan sikap non – blok. Akan tetapi apabila ditilik lebih jauh sebenarnya politik luar negeri Irak khususnya dalam konsep internasional tidak terlalu banyak mendapat sorotan. Partai Baath yang mendominasi percaturan politik di negeri Irak, lebih ditujukan kepada masalah regional antar negara Arab yaitu masalah keinginan untuk mempersatukan bangsa Arab seperti yang telah terjadi di masa lalu.

Kebijakan luar negeri Irak dibuat oleh Dewan Komando Revolusi dengan Presiden sebagai pembuat keputusan utamanya. Hal ini disebabkan posisi konstitusionalnya yang sangat penting. Meskipun demikian, Saddam Hussein menegaskan bahwa informasi yang tepat dari para duta besarnya di luar negeri mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang benar.

### 2.3 Arti Irak Bagi Amerika Serikat

Irak terletak di suatu segitiga pegunungan, padang pasir, dan lembah sungai subur, berbatasan dengan Iran ( di Timur ), Turki ( Utara ), Syria dan Jordania ( di Barat ), serta Arab Saudi dan Kuwait ( di Selatan ). Luas Irak kurang lebih  $2 \times$  Idaho.<sup>25</sup> Irak merupakan suatu negara yang selalu menjadi lintasan berbagai kekuatan baik dari Timur maupun Barat. Ini disebabkan karena Irak tidak mempunyai batas wilayah alami yang jelas.

Teritorial Irak banyak memiliki situs yang berhubungan dengan kehidupan bangsa Yahudi kuno mulai dari Ur, yang dianggap sebagai tempat kelahiran

<sup>25</sup> Untuk informasi lebih lanjut mengenai profil Irak lihat lampiran 2.

ibrahim (Abraham ), hingga Babilonia yang menjadi tempat perbudakan bangsa Yahudi di bawah Nebukadnezzar ( 500 SM ), serta Sungai Efrat yang menjadi batas timur Eretz Israel.

Kebanyakan dari penduduk Irak terdiri dari bangsa Arab yang menganut agama Islam dari sekte Syiah dan Sunni, serta di bagian Utara bangsa Kurdi yang beragama Islam Sunni. Kaum Syiah yang merupakan golongan terbesar tinggal di bagian Tenggara dari negara itu. Namun, pemerintahan dan militer biasanya didominasi oleh bangsa Arab yang bermazhab Sunni ( Andersen, Seibert, and Wagner 1987, 302 ).<sup>26</sup>

Irak adalah negeri dengan sejarah peradaban yang panjang, jauh lebih tua dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jaman dahulu Irak dikenal dengan nama Mesopotamia ( artinya : tanah di antara sungai – sungai ). Irak telah mencapai peradaban maju pada tahun 4000 SM. Suatu saat setelah tahun 2000 SM, daratan itu menjadi pusat kerajaan Masyur, Babilonia dan Assyria. Mesopotamia ditaklukan oleh *Cyrus The Great* dari Persia pada tahun 538 SM dan Alexander Agung pada tahun 331 SM. Setelah fase penaklukan Arab pada tahun 637 SM sampai dengan tahun 40 Baghdad dijadikan ibukota oleh khalifah yang berkuasa. Negeri ini dirampas melalui suatu penaklukan yang kejam oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, dan sepanjang abad XVI – XVIII menjadi sasaran persaingan kekuasaan bangsa Turki dan Persia.

Setelah Perang Dunia I usai, Irak diperintah oleh kerajaan Inggris. Walaupun Irak telah merdeka pada tahun 1923 akan tetapi Irak tetap dibawah kendali Inggris hingga tahun 1958. kemudian terjadi revolusi yang menggulingkan kerajaan yang didukung Inggris. Sejak itu Irak dipimpin oleh pemerintah militer selama sepuluh tahun.

Pada tahun 1968, Partai Baath mengambil alih kekuasaan. Partai ini menekankan nasionalisme arab, sosialisme Arab. Pada kenyataannya Irak mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan partai ini. Kemakmuran tersebut didukung dengan meningkatnya devisa dari minyak sebagai komoditi

---

<sup>26</sup> Riza Sihbudi, et al., *Profil Negara – Negara Timur Tengah*, Buku Satu, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 54.



utama. Oleh karena itu, Irak mulai melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Proyek pembangunan itu dilaksanakan di berbagai sektor, baik ekonomi, fasilitas umum serta untuk memperkuat fasilitas militernya. Sehingga tidak mengherankan ketika memasuki tahun 1980-an, Irak merupakan salah satu negara Arab yang terkuat.

Pada tahun yang bersamaan, Iran yang merupakan negara tetangga Irak tengah gencar melancarkan revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, pemimpin keagamaan Syiah yang menumbangkan monarkhi Shah Pahlevi. Situasi ini mengkhawatirkan negara – negara Arab termasuk Irak. Mereka khawatir, Iran akan menyebarluaskan ajaran Syiah kepada mereka yang mayoritas menganut ajaran Sunni. Bagi Irak, revolusi itu tidak hanya akan mengancam pemerintahan Baath, akan tetapi juga menghancurkan konsep nasionalisme Arab yang telah dirintis Irak sejak awal. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka Irak dengan dukungan negara – negara Arab lainnya menyerbu Iran pada September 1980 yang kemudian berlanjut menjadi perang delapan tahun yang kemudian dikenal dengan **Perang Teluk I**.

Perang Irak – Iran ini mempunyai arti khusus bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap bahwa apabila Irak kalah dalam perang tersebut, maka akan merusak peta politik Teluk Parsia, Timur Tengah, dan Laut Tengah. Irak akan dipimpin oleh orang – orang Syiah yang sangat tidak dikhendaki Amerika Serikat. Oleh karena itu Amerika Serikat turut membantu Irak dengan memasok persenjataan militer beserta perlengkapannya. Bahkan dukungan Amerika Serikat terhadap Irak seolah – olah terlibat langsung dalam konflik.

Pasca Perang Irak – Iran, membuat Irak menjadi kekuatan terkuat di bidang militer. Kekuatannya hanya dapat ditandingi oleh Iran, Turki dan Israel. Di sini, nampak hubungan Amerika Serikat – Irak cukup baik, walaupun di balik itu terdapat tujuan lain yang menyangkut kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada umumnya dan Irak pada khususnya.

Dengan mundurnya Iran sebagai surrogat Amerika Serikat di wilayah Teluk, Amerika Serikat harus segera menentukan langkah yang tepat guna mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Irak diperkirakan mula – mula

akan menggantikan Iran di jaman Syah, karena secara teoritis, Irak mempunyai kemampuan ke arah itu. Di antara kekuatan Irak adalah : **pertama**, ia mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas konsep partai Baath tentang sosialisme, Pan Arabisme, dan anti imperealisme ; **kedua**, kemampuan militer Irak terus nampak meningkat yang diorganisir menjadi 12 batalyon dan merupakan kekuatan militer terbesar di dunia Arab setelah Mesir; **ketiga**, kekuatan ekonomi makin berkembang dan pemerintah Baath kelihatan mengalokasikan petrodolarnya untuk pembangunan nasionalnya. Walaupun telah ada embargo ekonomi terhadap Irak, Amerika Serikat tetap menganggap Irak sebagai negara yang merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat.

Sekarang, Irak adalah merupakan negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Selama di bawah ideologi Baathisme, Irak telah menjadi negara yang revolusioner dengan Pan Arab-nya. Keaktifannya dalam GNB ( Gerakan Non Blok ) dan OPEC ( *Organization of Petroleum Exporting Countries* ) juga merupakan nilai tambah bagi kuatnya pengaruh Irak di kawasan tersebut.

Dalam tatanan dunia internasional, Irak menjadi salah satu negara yang mempunyai pengaruh cukup signifikan bagi perkembangan politik internasional dan telah berhasil mewarnai percaturan politik internasional dengan berbagai gebrakannya yang sangat berani menentang kekuatan negara – negara Barat terutama negara *super power* dunia yaitu Amerika Serikat.

Hubungan Irak dengan Amerika Serikat pada umumnya memperlihatkan permusuhan, disebabkan oleh ideologi Baath dan Israel. Namun, mulai tahun 1980-an terdapat tanda – tanda perbaikan. Pejabat Amerika menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang fundamental antara Irak dan Amerika Serikat.<sup>27</sup>

Namun pada tanggal 2 Agustus 1990, tentara Irak melakukan invasi terhadap Kuwait dan mendudukinya. Pemerintah Irak percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur tangan dalam pertikaian masalah perbatasan ini. Namun peristiwa ini telah mencetuskan suatu peperangan yang terkenal dengan nama **Perang Teluk II**. Irak diserang secara besar- besaran oleh tentara Sekutu

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 71.

akan menggantikan Iran di jaman Syah, karena secara teoritis, Irak mempunyai kemampuan ke arah itu. Di antara kekuatan Irak adalah : **pertama**, ia mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas konsep partai Baath tentang sosialisme, Pan Arabisme, dan anti imperealisme ; **kedua**, kemampuan militer Irak terus nampak meningkat yang diorganisir menjadi 12 batalyon dan merupakan kekuatan militer terbesar di dunia Arab setelah Mesir; **ketiga**, kekuatan ekonomi makin berkembang dan pemerintah Baath kelihatan mengalokasikan petrodolarnya untuk pembangunan nasionalnya. Walaupun telah ada embargo ekonomi terhadap Irak, Amerika Serikat tetap menganggap Irak sebagai negara yang merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat.

Sekarang, Irak adalah merupakan negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Selama di bawah ideologi Baathisme, Irak telah menjadi negara yang revolusioner dengan Pan Arab-nya. Keaktifannya dalam GNB ( Gerakan Non Blok ) dan OPEC ( *Organization of Petroleum Exporting Countries* ) juga merupakan nilai tambah bagi kuatnya pengaruh Irak di kawasan tersebut.

Dalam tatanan dunia internasional, Irak menjadi salah satu negara yang mempunyai pengaruh cukup signifikan bagi perkembangan politik internasional dan telah berhasil mewarnai percaturan politik internasional dengan berbagai gebrakannya yang sangat berani menentang kekuatan negara – negara Barat terutama negara *super power* dunia yaitu Amerika Serikat.

Hubungan Irak dengan Amerika Serikat pada umumnya memperlihatkan permusuhan, disebabkan oleh ideologi Baath dan Israel. Namun, mulai tahun 1980-an terdapat tanda – tanda perbaikan. Pejabat Amerika menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang fundamental antara Irak dan Amerika Serikat.<sup>27</sup>

Namun pada tanggal 2 Agustus 1990, tentara Irak melakukan invasi terhadap Kuwait dan mendudukinya. Pemerintah Irak percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur tangan dalam pertikaian masalah perbatasan ini. Namun peristiwa ini telah mencetuskan suatu peperangan yang terkenal dengan nama **Perang Teluk II**. Irak diserang secara besar- besaran oleh tentara Sekutu

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 71.

yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan berhasil dipukul mundur pada tahun 1991.<sup>28</sup>

Bagi kalangan negara industri khususnya Amerika Serikat, Irak adalah negara yang sangat penting artinya dan mempunyai banyak arti strategis dan merupakan negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Cadangan minyak Irak, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat, sampai akhir Maret 2003 sebesar 112,5 miliar barel. Bahkan, hasil studi *US Energy Information Administration* menyebutkan cadangan minyak Irak mencapai lebih dari 200 miliar barel. Yang menarik, ongkos produksi minyak mentah Irak adalah termurah di dunia.<sup>29</sup>

Studi ini juga menunjukkan kebutuhan minyak dunia akan mencapai 112 juta barel per hari pada tahun 2020. Amerika Serikat merupakan konsumen terbesar minyak dunia. Setiap warga Amerika Serikat mengkonsumsi 28 barel per tahun, padahal warga Cina hanya 2 barel per tahun.<sup>30</sup> Irak adalah negara penghasil minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, posisi ini amat penting sehingga masuk akal bila Amerika Serikat ingin menguasai Irak.

Akibat ketergantungan akan energi, menjadikan wilayah Timur Tengah dan Teluk Persia sebagai *vital concern* Amerika Serikat. Tidak aneh bila Amerika Serikat akan berbuat dengan cara apa pun untuk menjamin mengalirnya minyak ke Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya.

Bahkan, Presiden Jimmy Carter yang “penganut kuat” hak – hak asasi manusia dan yang *non interventionist* sekalipun, pernah mengancam akan menggunakan kekuatan militer bila aliran minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia terganggu. Apalagi bagi seorang yang oleh banyak pihak dijuluki sebagai *hawkish* seperti George W. Bush.<sup>31</sup>

Irak dengan Saddam Hussein-nya yang agresif dan sangat berambisi untuk menjadi pemimpin di kawasan sangat anti Barat terutama Amerika dan tidak mau bekerja sama ( tunduk ) dengan Amerika Serikat membuat Amerika Serikat

<sup>28</sup> *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> “Pentingnya Minyak Irak Bagi AS ( 1 )”, dalam *Surya*, 25 April 2003, hal. 10.

<sup>30</sup> *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> A A Kustia, “Siapa Setelah Irak ?”, *Kompas*, 26 April 2003, hal. 4.

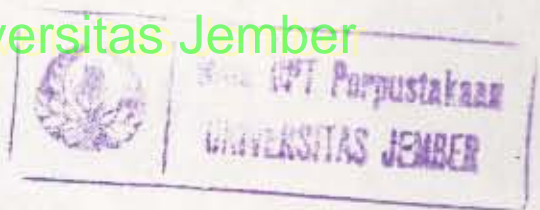
menginginkan pemerintahan Irak tidak dipimpin oleh Saddam Hussein. Selama ini, Irak ( Saddam Hussein ) adalah yang paling ditakuti oleh Israel di dunia Arab. Hal ini akibat kemampuan militer Irak dan corak kepemimpinan Saddam Hussein yang diktator dan tidak mau kompromi serta cenderung menjadi penghalang bagi tercapainya kepentingan Amerika Serikat maupun Israel. Bahkan kontras dengan logika kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Dalam diskusi tingkat tinggi tentang tujuan strategis Amerika Serikat, Irak menempati tempat utama. Dari sisi tertentu, Perang Teluk yang dilakukan dianggapnya terlalu pagi beberapa bulan. Pada Januari dan Pebruari 1991, saat nasib Uni Sovyet belum bisa dipastikan, pemerintah Bush Senior menganggap terlalu berisiko melanggar mandat PBB dan secara sepihak menggulingkan Saddam Hussein. Tetapi, begitu perang berakhir, para elit penguasa Amerika Serikat, merasa telah kehilangan kesempatan emas.

Dalam sebuah strategi pencapaian tujuan baru, untuk menghindari naiknya kekuatan baru atau kombinasi kekuatan lain yang bisa menyaingi kedudukan Amerika Serikat sebagai kekuatan adidaya tunggal merebut Irak menjadi tujuan strategis yang menentukan. Dalam berbagai tulisan, para politisi, *hardliner* ( kanan ) secara terbuka mengatakan, penggusuran Saddam Hussein dari tampuk kekuasaan Irak memungkinkan Amerika Serikat untuk memegang kendali atas minyak, sebuah bahan baku yang amat penting bagi pesaing ekonominya di Eropa dan Jepang. Minyak membuat Teluk Persia tidak sekadar isu regional, tetapi menjadi 'pusat' ekonomi global. Kontrol atas kawasan ini akan membuka peluang bagi AS menggapai kekuasaan tak terhingga di tataran dunia. Bila tidak, yaitu dengan membiarkan kekuata regional seperti Irak atau Iran memantapkan kekuatan ini, maka kesempatan pun akan hilang, kecuali bila Amerika Serikat siap untuk melakukan perang daratan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> George Friedman dan Meredith Lebart, dalam, Ivan A Hadar, " Militerisme Amerika Serikat ", *Kompas*, 31 Maret 2003, hal. 4.



### BAB III

## KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT

### DI TIMUR TENGAH

Dalam mengkaji kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, tidak terlepas dari prinsip – prinsip politik luar negeri Amerika Serikat yang telah mengalami perjalanan panjang. Secara garis besar, prinsip – prinsip utama yang mendasari kebijakan Amerika Serikat pada dekade 1990-an, sebagaimana diutarakan Menlu Warren Christopher adalah sebagai berikut : Pertama, mempertahankan kepemimpinan global Amerika Serikat baik bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Kepemimpinan global merupakan hal yang esensial bagi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional dalam upaya menciptakan tata dunia baru. Kedua, mempertahankan pola interaksi yang konstruktif dengan negara – negara kuat lainnya, seperti dengan negara – negara di Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Prinsip ini terutama mengacu pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat terhadap negara – negara di kawasan tersebut. Ketiga, memperkuat berbagai institusi internasional secara damai. Keempat, memperluas penyebaran nilai – nilai demokrasi di seluruh dunia sebagai prasyarat terciptanya perdamaian internasional.<sup>1</sup>

#### 3.1 Bidang Politik

Talam tataran teoritis, politik luar negeri yang ideal adalah politik luar negeri yang senantiasa bersifat responsif dan fleksibel terhadap perkembangan – perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan internasional. Sementara itu, isu demokratisasi dunia menempati pula posisi penting dalam kebijakan politik luar

<sup>1</sup> Anak Agung Banyu Perwita, " Politik Luar Negeri AS Pasca Pemilu 1996 : Kontinuitas atau Perubahan ? ", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXVI, No. 6, November – Desember, Jakarta 1997, hal.575.

negeri Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diutarakan Bill Clinton,

*"No national security ( foreign policy ) is more urgent than securing democracy's triumph around the world and it is the time for America to lead a global alliance for democracy as united and steadfast as the global alliance that defeated communism".<sup>2</sup>*

Walaupun Amerika Serikat sering dianggap melakukan *double standard* dalam politik luar negerinya yang berhubungan dengan isu demokratisasi, namun tampak bahwa nuansa humanisme tetap mewarnai agenda dan formulasi politik luar negeri Amerika Serikat, minimal sebagai suatu alasan terhadap kebijakan yang diambil.

Dalam memahami kebijakan suatu negara terhadap negara atau kawasan lain, maka tidak akan terlepas dari kepentingan nasional dari negara bersangkutan. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang berkepentingan dengan kawasan Timur Tengah. Kepentingan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dalam hal ini ditinjau dari aspek politik.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah ditinjau dari aspek politik dapat dibagi dua hal, yaitu kedudukan strategis dan posisi geografis Timur Tengah, serta adanya lobi Yahudi Israel.

### 3.1.1 Strategis

Timur Tengah memiliki arti vital dan strategis bagi Amerika Serikat. Hal ini tampak dari pidato mantan Presiden G. Ford di San Fransisco pada bulan Oktober 1975 yang masih relevan sampai sekarang :

*"American concern for Middle East is not a matter of choice; it is a matter of vital necessity. It is a strategic part of the world and the source of a significant and drowning portion*

<sup>2</sup> *Kompas*, 27 Januari 1998; lihat juga Paul D. Wolfowitz, " Clinton 's First Year " dalam *Foreign Affairs*, Vol. 73 No. 1, January/February, 1994 seperti dikutip dalam Perwita Op. Cit., hal. 576.

*of our energy resources and those of Western Europe and Japan*”.<sup>3</sup>

Penegasan dimensi strategis Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk ini juga nampak dari pernyataan pidato mantan Presiden Jimmy Carter dalam *State of Union Address* tanggal 23 Januari 1980 :

*“ Suatu usaha oleh kekuatan luar dengan cara kekerasan untuk menguasai kawasan Teluk Persia akan dianggap suatu serangan atas kepentingan vital Amerika Serikat. Dan serangan serupa itu akan dilawan dengan segala cara, termasuk kekuatan militer”*.<sup>4</sup>

Berkat letaknya, kawasan Timur Tengah sejak dahulu mempunyai arti yang penting. Penemuan cadangan minyak yang luar biasa dan meningkatnya produksi minyak telah meningkatkan arti Timur Tengah di mata dunia. Dengan digunakannya minyak Arab secara efektif oleh negara – negara Arab untuk menekan negara industri pendukung Israel dan merubah hubungan tak adil antara negara – negara yang sedang berkembang, kawasan itu muncul dalam percaturan politik dunia sebagai kekuatan baru yang harus diperhatikan dan diajak bicara mengenai masalah – masalah dunia.

Siapa pun yang mampu menguasai kawasan Timur Tengah, maka akan mempunyai kedudukan strategis di dunia. Hal ini disebabkan letaknya pada pertemuan Eropa, Asia dan Afrika. Kawasan tersebut menguasai jalan masuk ketiga benua tersebut. Timur Tengah berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspi, Teluk Parsi dan Samudera Hindia. Baik melalui daratan maupun perairan, kawasan Timur Tengah memandang ke banyak penjuru, dan sejak dulu sejarah keunikan geostrateginya tersebut diakui oleh negara – negara besar dunia. Dalam dunia modern, muncul faktor lain yang menambah arti Timur Tengah, yaitu lalu lintas udara.

<sup>3</sup> Weekly Compilation Presidential Document, 1975, hal. 1219, seperti dikutip dalam Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 155.

<sup>4</sup> Kirdi D., dalam *Loc. Cit.*



Dunia memandang Timur Tengah sebagai kawasan yang vital dan harus dikuasai demi terpeliharanya kepentingan strategis dari masing – masing negara. Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan nasional yang sangat vital di kawasan ini. Maka Amerika Serikat, seperti apa yang telah disinggung di atas, ingin menguasai Timur Tengah, yang pada akhirnya untuk menguasai dunia secara global.

Pada dasarnya, kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah berkisar pada hal – hal sebagai berikut :

- a. Mengusahakan agar sumber – sumber alam di Timur Tengah tidak dikuasai oleh kekuatan musuh,
- b. Memelihara kemampuan destruksi unsur – unsur regional dari kekuatan – kekuatan strategi Amerika Serikat,
- c. Menjamin tersalurnya sumber – sumber alam yang penting bagi industri dan militer Amerika Serikat,
- d. Menjamin suplai sumber – sumber alam Timur Tengah bagi sekutu – sekutu Amerika Serikat, agar mereka tetap kuat secara ekonomi dan militer,
- e. Memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan invasi dan usaha – usaha komersial Amerika Serikat,
- f. Menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen – komitmen Amerika Serikat di Timur Tengah,
- g. Meneruskan hak transit dan “ *over flight* ” bagi pesawat – pesawat udara dan kapal laut Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Mudah dipahami jika Amerika Serikat melihat Timur Tengah sebagai kawasan penting dan khusus, oleh karena kepentingan Amerika Serikat di Teluk Persia, Samudera India dan Afrika banyak ditentukan oleh kekuatan posisinya di Timur Tengah.

---

<sup>5</sup> Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hal. 138.

### 3.1.2 Israel

Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel sebagai negara yang berdiri sendiri pada tahun 1948. Dukungan terhadap Israel didasarkan pada simpati terhadap perjuangan bangsa Israel untuk memperoleh tanah airnya sendiri, terutama setelah bangsa Yahudi mengalami politik "genocide" semasa Hitler berkuasa di Jerman.<sup>6</sup>

Perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam memperjuangkan berdirinya negara Israel dan perebutan tanah leluhur, Israel mengalami konflik yang sangat kompleks dan multidimensional. Karena adanya banyak persamaan dan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Israel, maka Amerika Serikat memperlakukan Israel secara tidak obyektif dan cenderung membela eksistensi dan kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah.

Peran lingkungan eksternal selama ini terus menguntungkan posisi Israel seperti tercermin dari perilaku politik AS dan konsesi basa – basi terhadap mayoritas negara – negara Arab. Perilaku politik AS tersebut tidak terlepas dari kuatnya lobi atau pengaruh orang – orang Yahudi di dalam pengambilan kebijakan Amerika sendiri.

Menurut Roeslan Abdulgani, pengaruh lobi Zionis sangat kuat dalam membentuk opini publik masyarakat Amerika Serikat khususnya berkaitan dengan persoalan Timur Tengah. Mereka menguasai jaringan bisnis perbankan, media cetak, televisi, radio, film, dan perguruan tinggi dan menengah. Padahal, jumlah orang Yahudi hanya 2 % dari seluruh penduduk Amerika Serikat atau sekitar 6 juta jiwa.<sup>7</sup>

Dua organisasi utama Zionis yang mempunyai koneksi dengan sebagian anggota Kongres adalah *B'nai B'rith* dan *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*. Lobi Israel cukup mempunyai pengaruh di Kongres sehingga beberapa UU yang menyangkut hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah selalu menguntungkan Israel.

<sup>6</sup> Aminah Kusuma, ( *Skripsi* ), Faktor – Faktor Penyebab Hadirnya Pasukan AS ( Multinasional ) di Arab Saudi Sehubungan dengan Invasi Irak ke Kuwait, Unej, Jember, 1992, hal. 57.

<sup>7</sup> Sulvi Indriati, ( *Skripsi* ), Politik Luar Negeri AS Pasca Perang Teluk II ( 1991 ), Unej, Jember, 1999, hal. 28.

Setiap analisa tentang mekanisme peranan dan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah kurang lengkap kiranya jika tidak membahas, walaupun secara sepintas, Lobi Israel di Washington. Sebab, pertimbangan – pertimbangan politik domestik sangat mempengaruhi formulasi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Menurut Michael C. Hudson, Direktur *Centre for Contemporary Arab Studies*, Georgetown University, terdapat dua aliran pemikiran di kalangan intelektual dan politisi Amerika Serikat perihal politik Washington terhadap kawasan Timur Tengah. Pertama, aliran yang membela apa yang disebut sebagai doktrin “*Israel - First*”. Kedua, aliran yang menghendaki agar Amerika Serikat bersikap “*lebih adil*” di Timur Tengah. Oleh Hudson, yang kedua ini disebut sebagai aliran “*even handed*”<sup>8</sup>

Bagi pendukung doktrin “*Israel - First*”, kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah akan sangat terjamin jika Washington meneruskan dukungannya terhadap posisi dominan Israel di kawasan ini. Oleh sebab itu, mereka mendukung kontinuitas bantuan Amerika Serikat kepada Israel yang setiap tahunnya tidak kurang dari 3 milyar dolar.

Doktrin “*Israel - First*” memandang Israel tidak hanya sebagai sebuah aset strategis, tetapi juga sebagai yang pantas didukung penuh atas “*dasar – dasar moral*” (*moral grounds*) – bentuk pemerintahannya yang “*demokratis*”, norma – norma budaya Baratnya, dan di atas segalanya, fungsi Israel sebagai tempat perlindungan dan “*pengganti kerugian*” bagi orang – orang Yahudi yang telah mengalami “*penderitaan historis*”.

Sebaliknya, bagi pengikut aliran “*even handed*”, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam bentuknya seperti sekarang, tidak menjamin sejumlah kepentingan vital Amerika Serikat di Timur Tengah dan Dunia Islam. Menurut mereka, doktrin “*Israel - First*”, justru menyulitkan posisi rezim – rezim Arab “*moderat*” yang selama ini bergantung pada bantuan militer dan ekonomi Amerika Serikat. Juga, doktrin “*Israel - First*”, menurut pengikut

---

<sup>8</sup> Hudson, “*Current History*” (February 1986), dalam M. Riza Sihbudi, “*Ekstistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*”, Mizan, 1992, hal. 23.

aliran “ *even handed* “, justru menumbuhkan gerakan – gerakan “ fundamentalis Islam radikal “ yang mengancam keamanan warga Amerika Serikat di kawasan ini.

Bagaimanapun juga, nampaknya pengaruh lobi Yahudi sangat besar terhadap kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Maka untuk melihat dan memahami kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah Israel tidak bisa dilupakan.

Panjangnya proses perdamaian konflik Arab – Israel tidak terlepas dari peran dan kebijakan Amerika Serikat yang tidak adil dan bahkan cenderung memperkeruh suasana. Hal ini dapat dilihat, tidak adanya jaminan apa pun yang diberikan oleh Amerika Serikat pada pihak Palestina, sedangkan jaminan untuk Israel cukup jelas, yakni Amerika Serikat tidak akan pernah menjatuhkan sanksi apa pun untuk memaksa Israel menghentikan pembangunan permukiman baru di daerah pendudukan. James Baker menjelaskan pada tokoh – tokoh Palestina bahwa Amerika Serikat hanya dapat melakukan tekanan politik pada Israel, dan bukan sanksi. Dalam kenyataan tekanan politik itu pun tidak pernah ada, mengingat Amerika Serikat terus mengalirkan dana untuk pembangunan permukiman baru di daerah pendudukan, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.<sup>9</sup>

Sebaliknya, Amerika Serikat menekan dan menakut – nakuti Palestina agar mau bergabung dalam proses perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat. Tapi, tetap tidak ada jaminan Palestina akan memperoleh kembali wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338.<sup>10</sup>

Jaminan Amerika Serikat terhadap Israel memang tidak kepalang tanggung. Amerika Serikat akan menggunakan hak veto bila ada usulan Dewan Keamanan PBB yang dapat mengganggu proses perdamaian. Jadi Israel benar – benar berada di atas angin.<sup>11</sup>

Dalam pada itu, seluruh langkah Amerika Serikat dalam usulan “ mencapai perdamaian “ itu selalu berwajah ganda atau hipokrit. Misalnya,

<sup>9</sup> M. Amien Rais, “ Arah Perkembangan Timur Tengah “, dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 12, kerja Sama AIPI dan LIPI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 22.

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

Amerika Serikat mendorong perdamaian, tetapi pembangunan permukiman Yahudi di daerah pendudukan yang terang – terangan melanggar moralitas dan hukum internasional serta ketentuan – ketentuan Konvensi Genewa, dibiarkan jalan terus. Alasannya sangat ganjil, yaitu pembangunan adalah urusan kemanusiaan yang tidak usah dihubungkan dengan urusan politik.<sup>12</sup>

Namun, terkadang pula lobi Israel tidak mampu mencegah Amerika Serikat untuk tidak bertindak menghukum Israel. Selama masa administrasi pertama Presiden Reagan, Amerika Serikat telah menghukum Israel sebanyak tiga kali pada tahun 1981, yaitu setelah Israel membom reaktor nuklir Irak, Amerika Serikat menghentikan pengiriman bantuan sejumlah F – 16 untuk Israel. Juga setelah Israel membom penimbunan peralatan PLO di stasiun kota Beirut, Amerika Serikat juga menghentikan pengiriman sejumlah F – 16; dan setelah Israel menganeksasi Dataran Tinggi Golan yang dirampasnya dalam perang tahun 1967, Presiden Reagan menandatangani *Memorandum of Understanding* mengenai kerja sama strategis kedua negara.

### 3.2 Bidang Ekonomi

Dalam mencapai suatu tujuan, suatu negara akan menggunakan suatu cara untuk mencapai tujuan itu. Serangan militer Amerika Serikat ke Irak adalah merupakan cara dalam pencapaian tujuan Amerika Serikat baik di kawasan maupun dalam tingkat global. Motif serangan Amerika Serikat tersebut juga tidak terlepas dari motif ekonomi. Amerika Serikat berharap, dengan membantu menumbangkan Saddam, Amerika Serikat bisa mendikte pemerintahan baru Irak dalam soal minyak. Dengan demikian, Amerika Serikat masih punya kekuatan untuk mengendalikan ekonomi global, termasuk dalam menghadapi mata uang Euro.

Kebijakan Amerika Serikat dalam bidang atau aspek ekonomi biasanya tidak bersifat “vulgar” ekonomi dan biasanya dikemas dalam bentuk kebijakan politik atau militer. Sehingga untuk lebih memahami tujuan atau pun motif yang

---

<sup>12</sup> *Loc. Cit.*

ada dalam sebuah kebijakan harus dicari target yang sebetulnya dengan cara melakukan analisa yang cermat dan mendalam.

### 3.2.1 Minyak

Timur Tengah dianggap memiliki posisi strategis dalam pemikiran politik luar negeri Amerika Serikat karena peranan minyak dan gas alam yang menjadi kian penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi Barat sejak Perang Dunia II. Keuntungan yang diperoleh perusahaan – perusahaan Amerika Serikat dalam eksploitasi minyak di Timur Tengah merupakan suatu factor yang menstabilkan ekonomi Amerika Serikat. Sejak sebelum Perang Dunia II, lima perusahaan raksasa Amerika Serikat ( Exxon, Mobil, Texaco, Socal dan Gulf ) telah menguasai mulai dari produksi dan pemasaran minyak Timur Tengah, walaupun akhir – akhir ini peranan mereka agak menurun akibat nasionalisasi parsial yang dilakukan oleh negara Arab produsen minyak.

Kebijakan impor minyak Amerika Serikat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengakibatkan industri dan ekonomi Amerika Serikat banyak ditentukan oleh kelancaran mengalirnya minyak dari Timur Tengah. Pada tahun 1976 Amerika Serikat mengimpor 47 % dari seluruh suplai minyaknya, tahun 1977 mengimpor lebih dari 50 %. Sekitar 84 % dari impor minyak itu berasal dari negara – negara OPEC. Pada tahun 1970, Amerika Serikat mengimpor minyak dari Arab Saudi sekitar 1,3 juta barel per hari, kemudian melonjak menjadi 9,5 juta barel pada tahun 1977. kenyataan makin tergantungnya Amerika Serikat pada minyak Timur Tengah itu membawa implikasi politik yang cukup jauh, sebagaimana dikatakan oleh Henry Kissinger :

*“For the first time in our history, a small group of nations controlling a scarce resource could overtime tempted to pressure us into foreign policy decisions, not dictated by our national interests”<sup>13</sup>*

<sup>13</sup> Congressional Quarterly, “ The Middle East : US Policy Israel, Oil and the Arabs “, Washington, D.C., 1977, hal. 142.

Kebutuhan mutlak Amerika Serikat akan minyak Arab, membuat sikap Amerika Serikat melunak terhadap politik luar negeri Arab ( pada tahun 1978 ) dan menjalin kerja sama yang erat. Hal ini dibuktikan dengan kalahnya usaha lobi Israel dalam hal penjualan enam puluh pesawat F – 15 oleh pemerintah Carter untuk Saudi Arabia. Kekalahan tersebut oleh banyak pengamat dianggap mempunyai nuansa baru dalam politik Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kerja sama di bidang ekonomi antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terutama berkisar pada masalah minyak. Kerja sama tersebut dimulai 1933, ketika perusahaan minyak *Standard Oil Co.* dari California iberi konsesi pencairan minyak di Saudi Arabia. Kemudian dibentuk *Arabian – American Oil Company* sebagai perusahaan pelaksana eksplorasi. Lima tahun kemudian, minyak mulai mengalir dan memberikan keuntungan komersial. Langkah ini segera diikuti oleh perusahaan – perusahaan minyak Amerika Serikat lainnya.

Hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Saudi Arabia dengan Amerika Serikat yang telah terbina bertahun – tahun akan mempunyai nilai strategis jika tetap adanya saling pengertian antar negara bersangkutan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak mengherankan ketegangan bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kawasan sekitarnya.

Sejak jaman Nixon – Kissinger, Amerika Serikat telah menyatakan ancaman – ancaman terselubung terhadap negara – negara OPEC. Kissinger misalnya, pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan intervensi militer di Timur Tengah jika negara – negara Arab menggunakan minyak sebagai senjata sehingga dapat mencekik negara – negara industri Barat. Awalnya , apa yang diungkapkan Kissinger tersebut oleh banyak pengamat sebagai “ *diplomatic bluff* “ belaka. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya Jimmy Carter membentuk *Rapid Deployment Joint Task Force ( RDF )* yang sewaktu – waktu dapat digunakan untuk mengamankan ladang – ladang minyak di wilayah Teluk.

Sekilas, nampaknya, pengiriman RDF ke Teluk untuk menguasai ladang – ladang minyak merupakan sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, jika kita ingat bahwa suatu negara besar cenderung melakukan intervensi dan invasi militer jika

kepentingan vitalnya sudah terancam, maka pengiriman RDF bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Dalam hal menjaga kepentingan Amerika Serikat akan minyak dari kawasan Teluk, maka Amerika Serikat berusaha menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di kawasan Teluk. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat merupakan negara industri maju yang mengandalkan minyak bagi proses produksinya.

Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah tentang minyak pada tahun 1996, yang dikenal dengan UU anti Iran dan Libya atau apa yang dinamakan *D' Amato Bill*. Isinya adalah memberi sanksi atas perusahaan non- Amerika yang berinvestasi senilai 40 juta dolar AS atau lebih dalam setahun pada proyek perminyakan dan gas di Iran dan Libya.<sup>14</sup>

Sebagaimana negara Timur Tengah produsen minyak lain, sekitar 90 % pendapatan luar negeri Iran dan Libya berasal dari ekspor minyak dan gas bumi. Ketika itu, Iran telah mengajukan 11 proyek besar senilai 7 milyar dolar AS ke tender internasional untuk memperluas sumber pendapatannya. Mempertahankan pendapatan dari sektor ini merupakan hal vital untuk memungkinkannya membayar utang luar negerinya yang tahun sebelumnya tercatat sebesar 45 milyar dolar AS. Libya dan Italia telah menandatangani kontrak pembangunan pipa minyak dari Libya ke Italia. Dengan adanya UU tersebut, Gedung Putih memperkirakan pemerintah Teheran dan Tripoli akan lumpuh kecuali mereka menyesuaikan diri dengan kepentingan AS.<sup>15</sup>

Bagi AS, minyak adalah masalah hidup dan mati. Bukan hanya minyak Irak. Irak hanyalah langkah pertama dan akan diikuti negara – negara Timur Tengah lainnya. Iran memiliki 65 % dari seluruh cadangan minyak dunia. Ini mungkin salah satu alasan mengapa AS menyerang Irak. Perlu dicatat bahwa

---

<sup>14</sup> Smith Alhadar, " D' Amato Bill dan Politik Amerika ", dalam *Kompas*, 6 September 1996, hal. 4.

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*



pemerintah AS sekarang, agendanya, adalah mendirikan sebuah kerajaan AS baru yang mendominasi dunia.<sup>16</sup>

Bahkan, perusahaan minyak AS mulai melakukan eksplorasi di Kuwait sejak tahun 1938, yakni operasi gabungan perusahaan minyak *Gulf Oil* ( milik AS ) dengan perusahaan minyak Inggris *British Petroleum Company* dalam bentuk *Kuwait Oil Company* ( *KOC* ). Selain itu, *Aminoil* dan *Oil Co.* ( dua perusahaan minyak AS lainnya ) juga diberi konsesi di wilayah perbatasan Kuwait - Saudi oleh pemerintah Kuwait.<sup>17</sup>

Dalam agresi militer AS ke Irak 2003, salah satu target AS dan koalisinya adalah untuk menguasai ( swastanisasi ) minyak Irak. Hal ini dapat buktikan dengan tidak dijatuhinya bom – bom pada kilang – kilang minyak di Basra maupun di Mosul dan Kirkuk. Semua itu dijaga ketat oleh tentara Amerika. Kantor – kantor lannya dibiarkan dibom dan musea – musea dibiarkan dirampas oleh kaum penjarah.<sup>18</sup>

Keinginan Amerika Serikat untuk menguasai minyak Irak juga terlihat dari kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat agar Irak tetap berada di dalam OPEC ( kelompok negara pengekspor minyak ), juga sudah diputuskan agar Irak tidak dibatasi produksinya karena tidak memiliki kuota. Hal ini tidak akan menjadi masalah bagi OPEC hingga Irak mampu memproduksi minyak sebanyak 3,5 juta barel per hari.<sup>19</sup>

### 3.2.2 Penjualan Senjata

Amerika Serikat merupakan eksportir terbesar persenjataan di dunia. Kesepakatan penjualan persenjataan baru tahun 2001 mencapai lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat, dan total nilai senjata yang sudah diserahkan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Hasil wawancara Al Jazeera dengan DR. Abdul Hay Zallom, seperti dikutip *Surya*, " Pentingnya Minyak Irak Bagi AS ( 1 ) ", 25 April 2003, hal. 10.

<sup>17</sup> Kusuma, *Op. Cit.*, hal. 56

<sup>18</sup> H. Roeslan Abdulgani, " Melindungi Zionisme dan Merebut Minyak ", *Pelita*, 25 Maret 2003, hal 1 & 11.

<sup>19</sup> " Perusahaan AS Ambisius dan Tak sabar ", *Kompas*, 13 April 2003, hal. 32.

<sup>20</sup> " Amerika Serikat Eksportir Persenjataan Terbesar di Dunia ", *Kompas*, 27 Mei 2003, hal. 34.

Ada dua cara penjualan persenjataan itu, masing – masing lewat program penjualan senjata pemerintahan ke pemerintahan ( *foreign military sales /FMS* ) dan lewat sistem pemberian ijin penjualan senjata secara komersial oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan swasta Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Data yang diumumkan oleh Amerika Serikat per Juni 2002 menunjukkan bahwa penjualan senjata yang dinegosiasikan Pentagon anjlok pada periode 2000 – 2001. Namun, penjualan senjata komersial ( swasta ) meningkat dua kali lipat pada periode yang sama.<sup>22</sup>

Meski perekonomian dunia melemah, tren penjualan senjata Amerika Serikat menunjukkan peningkatan, berdasarkan data penjualan senjata tahun 2002. Alokasi anggaran untuk pembiayaan penjualan senjata naik dari 3, 57 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2001 menjadi 4, 11 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2003.<sup>23</sup>

Hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan negara – negara Timur Tengah yang paling utama, selain minyak, adalah hubungan penjualan persenjataan yang dikenal melalui lobi *Military Industrial Complex ( MIC )*. Misalnya pada tahun 1970-an hingga 1981, Amerika Serikat telah menjadi eksportir senjata terbesar di dunia sebagaimana telah diungkapkan Andrew J. Piere dalam artikelnya yang berjudul :” *Arms Sales : The New Diplomacy* ”<sup>24</sup>

“ *Arm transfer worldwide have more than doubled in the past decade from \$ 9,4 billion 1969 to over 20 billion in 1980 ( in constant 1997 dollars ).*”

---

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Charles W. Kegley, jr., and Eugene R. Wittkopf, *The Global Agenda, Issues and Perspective*, Random House, New York, 1984, hal. 30, dalam Jatmika, *Op. Cit.*, hal.169.

Pada tahun 1992, Amerika Serikat memasok 56,8 % dari seluruh pangsa pasar penjualan senjata.<sup>25</sup> Meskipun ekspor senjata ini terutama dilakukan oleh pemerintah AS, tetapi sesungguhnya yang lebih banyak bermain adalah kelompok industri senjata yang populer dengan nama *Military Industrial Complex (MIC)* yang merupakan salah satu kelompok kepentingan yang sangat berpengaruh dan didefinisikan sebagai “ *powerful domestic groups within the major states that have vested interest in military and international tension* ”<sup>26</sup>

Adanya kelompok lobi semacam itu, kebijakan misalnya perang atau kebijakan lain yang bernuansa ketegangan, sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan seperti itu. Kepentingan yang mereka mainkan adalah bagaimana kebijakan itu menguntungkan perusahaannya. Jadi, apa yang menjadi pilihan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah merupakan hasil dari berbagai pilihan dan pengaruh yang bermuara pada penjualan alat – alat perang dan perlengkapannya. Dalam era perdagangan, itu adalah merupakan sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Timur Tengah adalah sebuah kawasan yang paling banyak membeli persenjataan akibat terjadinya berbagai konflik yang sangat kompleks.

Dapat dikatakan bahwa, lembaga lobi semacam itu lebih bersifat ekonomi. Kepentingan ekonomi ini selalu berusaha dipertahankan melalui usaha – usaha yang disebut penciptaan ideologi konflik yang juga mendasari Teori Realis. ( teori ini meyakini politik internasional sebagai “ *struggle for power* ” ) .

Mengingat industri militer mendatangkan keuntungan besar bagi kinerja perekonomian, maka pemerintah dan Kongres Amerika Serikat pada akhirnya sangat sulit melepaskan diri dari besarnya pengaruh lobi MIC. Demi kepentingan ekonomi agar modal produksi bisa kembali dan mendapatkan untung yang sebesar – besaryaserta untuk kepentingan politik, khususnya pada Perang dingin, senjata yang diproduksi di Amerika Serikat sebagai negara yang berteknologi maju selanjutnya diekspor ke negara – negara yang membutuhkan, baik karena mereka

---

<sup>25</sup> Lebih lanjut lihat Harwanto Dahlan, *Military Industrial Complex Amerika Serikat, Laporan Penelitian*, Fisipol UMY, 1995 bagian pengantar.

<sup>26</sup> Walter S. Jones, *The Logic of International Relations*, Seventh Edition, harper Collins Publisher, new York, 1991, hal. 409.

sedang berperang atau tidak. Ekspor senjata ini tidak mensyaratkan adanya perang; sebuah kondisi persaingan atau pun perang urat syaraf sudah cukup untuk mendorong ekspor persenjataan yang mencapai jumlah milyaran dolar dan menjangkau seluruh dunia dengan tidak mengenal negara kaya atau negara miskin.

Sejak 1974, Arab Saudi dan Amerika Serikat membuat suatu persetujuan yang menetapkan bahwa 50 % surplus neraca pembayaran Saudi ditanamkan dalam investasi jangka panjang di Amerika Serikat dan 87 % surplus uang tunai Saudi diletakkan dalam pasaran saham jangka panjang di Amerika Serikat. Dengan bunga petro dolarnya yang ditanam di Amerika Serikat tersebut Saudi dapat membeli perlengkapan militer dari Amerika Serikat. Selama 1973 – 1980 pembelian perlengkapan militer Arab Saudi dari Amerika Serikat berjumlah 34 milyar dolar. Pada tahun 1980-an terus meningkatkan penjualan peralatan militernya ke Arab Saudi, di antaranya pesawat tempur F- 15, AWACS yang mempunyai sistem radar super canggih serta pembangunan prasarana militer berupa pangkalan laut dan darat yang bernilai milyaran dolar.<sup>27</sup>

Kawasan Timur Tengah yang memiliki potensi konflik amat tinggi menerima suplai senjata mencapai sekitar 50 % dari seluruh suplai senjata ke negara – negara Dunia Ketiga. Pada tahun 1974, negara – negara Timur Tengah menyerap sekitar 57 % dari seluruh senjata yang diekspor ke seluruh dunia. Antara 1977 – 1986, Timur Tengah menyerap 40 % . Amerika menikmati kenaikan yang luar biasa : dari hanya sekitar 1 milyar dolar pada tahun 1970, pada tahun 1974 AS mengapalkan senjata ke Timur Tengah sebanyak 9 x lipat, dan mencapai lebih dari 10 milyar dolar per tahun pada tahun 1980-an.<sup>28</sup>

Pada dasa warsa 1980-an, hubungan Amerika Serikat dengan negara – negara Timur Tengah semakin erat. Ketergantungan Saudi Arabia pada Amerika Serikat dalam bidang persenjataan maupun keamanan nasionalnya makin jauh. Kehadiran sejumlah pesawat AWACS di wilayah udara Saudi dengan pilot – pilot Amerika Serikat untuk menjaga keamanan nasional dan keutuhan wilayah Saudi

<sup>27</sup> *Analisa*, Tahun XI, No. 10, Oktober 1982, hal. 983 – 984, dalam Kusuma, *Op. Cit.*, hal. 55 – 56.

<sup>28</sup> "The Middle East" *Congresional Quarterly*, 7<sup>th</sup> edition, Washington D.C., 1990, hal 71. dalam Jatmika, *Op. Cit.*, hal 183.

setelah terpecahnya revolusi Iran merupakan bukti betapa jauh komitmen Amerika Serikat pada Saudi. Ditinjau dari sisi lain, betapa tergantungnya Saudi pada Washington, karena untuk mengelola senjata – senjata mutakhir, Saudi harus mengirimkan sejumlah perwira dan pilot ke Amerika Serikat maupun menerima instruktur – instruktur militer Amerika Serikat ke wilayahnya.

Kebijakan perang terhadap Irak merupakan kebijakan yang tidak terlepas dari motif penjualan senjata atau alat perang lainnya baik terhadap negara – negara di Timur Tengah maupun negara – negara berkembang lainnya di dunia.

Amerika Serikat tidak hanya merupakan eksportir persenjataan terbesar di Timur Tengah tapi juga terbesar di dunia. Amerika Serikat juga terus melanjutkan penjualan senjata canggih ke Israel, termasuk 52 buah pesawat jet tempur F-16 dan 6 helikopter penyerang Apache tahun 2001,<sup>29</sup> meski kenyataan menunjukkan senjata itu telah digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM di Palestina.

### 3.3 Bidang Militer

Invasi Amerika Serikat ke Irak nampaknya tak terlepas dari orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk “menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk kemakmuran negerinya”. Lingkungan internasional yang kondusif ini, tidak lain adalah absennya ancaman negara lain yang dicirikan dengan adanya permusuhan (*hostility*) yang disebabkan perbedaan ideologi yang dianut dan kemampuan (*capability*) dari negara yang bersangkutan untuk mewujudkan serta mengembangkan ideologinya. Sementara itu, “kemakmuran negerinya” adalah berhubungan dengan bergerakaknya industri yang dijamin oleh akses pada sumber energi dan bahan mentah, sekaligus menguntungkan produk – produk Amerika Serikat di pasar dunia.<sup>30</sup>

Bahkan, prinsip *the end justifies the means* secara terbuka diisyaratkan oleh Franklin D. Roosevelt :

<sup>29</sup> “Amerika Serikat Eksportir Persenjataan Terbesar di Dunia”, *Kompas*, 27 Mei 2003, hal. 34.

<sup>30</sup> Menurut Richard Falk, dalam BG Burhanuddin, “AS Biang Negara Teroris?”, *Pelita* 1 April 2003, hal. 4.

*“Anakku, diijinkan bagimu di saat yang sangat berbahaya  
untuk berjalan bersama iblis hingga kau melintas jembatan*

*...31*

Ungkapan keji inilah rupanya yang memberi inspirasi Bush untuk tidak ragu – ragu dan berambisi menginvasi Irak. Memang, kalau kita lihat dari orientasi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dari tahun ke tahun tetap sama, namun yang berubah adalah cara ( *means* ) yang dipakai.

Kebijakan ganda Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sangat kontras. Hal itu terlihat jelas dari sikap Amerika Serikat yang berbeda sangat tajam antara Irak dan Israel. Dalam kasus Irak, selama satu dekade terakhir Amerika Serikat dan Inggris telah menghancurkan kehidupan warga sipil Irak. Mereka begitu keras terhadap Saddam Hussein, sebaliknya Amerika adalah pendukung utama pendudukan militer Israel atas Palestina yang telah berlangsung selama 35 tahun.<sup>32</sup>

Sehubungan kebiadaban Amerika Serikat dan sekutunya terhadap rakyat Irak saat ini, berarti AS kini sedang mengukuhkan dirinya sebagai biang terorisme negara ( *state terrorism* ). Dalam *state terrorism*, motif paling dominan adalah politik dan ekonomi, yakni untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan, dan kekayaan seperti yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini.<sup>33</sup>

Yang paling mencemaskan dalam kejahatan ini yakni adanya upaya untuk membungkus *act of terror* dengan hukum sebagai justifikasi. Seperti Israel yang berkali – kali mendapat pembelaan “ hukum “ oleh Amerika Serikat atas *state terrorism* yang dilakukan terhadap palestina dalam forum – forum PBB, yang puncaknya penggunaan hak veto. Amerika Serikat yang mengaku memerangi terorisme, malahan mendukung aksi teror Israel ke Palestina.

Pembenaran secara hukum itu memiliki tempat, karena ada relativitas makna terorisme. Mengejar teroris hingga menukik ke jantung paling dalam dari simbol kekuasaan bangsa dan negara Palestina, hanyalah alibi Israel guna

<sup>31</sup> *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Chomsky, dalam *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Lebih lanjut lihat, *Loc. Cit.*

mematahkan dan menghancurkan kekuatan militer yang dianggap dapat mengancam kepentingannya. Label teroris lebih dulu ditempelkan pada Palestina, lalu dibangun hegemoni makna secara mondial atas label itu, sehingga tindakan terorisme negara yang paling brutal dapat dicarikan pembedanya secara hukum. Begitu juga karena Irak dianggap memiliki kekuatan militer yang bisa jadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat, maka Bush memutuskan untuk menyerang Irak meski tanpa dukungan PBB.<sup>34</sup>

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dilihat dari aspek militer, mengalami dua fase. Fase pertama, Irak sebagai sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah dan fase kedua, Irak sebagai musuh Amerika Serikat. Fase pertama, Irak mendapat dukungan dari Amerika Serikat dalam menghadapi Iran saat Perang Irak- Iran pada tahun 1980 – 1988. Dukungan Amerika Serikat ini dilatarbelakangi oleh potensi – potensi yang dimiliki Irak pada masa itu, yang salah satunya adalah terus meningkatnya militer menjadi kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Meningkatnya kekuatan militer Irak ini, tidak lepas dari peranan Amerika Serikat yang memasok persenjataan militer beserta perlengkapannya selama Perang Irak – Iran berlangsung.

Persekutuan antara Amerika Serikat – Irak ini kemudian berakhir setelah invasi Irak ke Kuwait. Pada masa ini hubungan Amerika Serikat memasuki fase kedua, yaitu munculnya konflik antara Amerika Serikat dan Irak. Perubahan posisi Irak dari sekutu menjadi musuh ini karena adanya lobi Israel yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah.

Terhentinya hubungan baik antara Amerika Serikat dan Irak ini bukan berarti terhentinya pula politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak di bidang militer. Amerika Serikat merasa dan dianggap bertanggung jawab atas meningkatnya kekuatan militer Irak, sehingga Amerika Serikat berkewajiban untuk melemahkan atau pun menghancurkan kekuatan militer Irak tersebut. Karena dengan kekuatan militer yang dimilikinya, Irak dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara – negara lain di kawasan Teluk terutama bagi negara – negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat.

<sup>34</sup> Menurut William D. Purdue, dalam *Loc. Cit.*

Peresmian kekuatan militer Amerika Serikat di Teluk menjadi Armada V secara permanen,<sup>35</sup> mengukuhkan nilai strategis kawasan ini bagi Amerika Serikat. Pembentukan Armada V ini didasarkan pada beberapa konsep yang dianut Amerika Serikat di kawasan Teluk saat ini. Konsep ini, pertama, harus ada kekuatan militer Barat secara abadi di kawasan Teluk untuk menjamin keamanan jalur lalu lintas kapal tanker minyak. Kedua, mengendalikan sendiri keamanan di kawasan Teluk, tanpa harus melibatkan mitra lain. Ketiga, mendepak sejauh mungkin kekuatan musuh seperti Irak dan Iran dari daerah sensitif di Teluk. Keempat, mengaitkan keamanan Teluk dengan keamanan nasional Amerika Serikat dengan cara mengadakan perjanjian – perjanjian bilateral keamanan dengan negara – negara setempat, seperti yang telah dilakukan dengan Kuwait, Bahrain, dan Qatar.

Agresi militer Amerika Serikat ke Irak sebenarnya hanya merupakan salah satu langkah mutakhir dari suatu kecenderungan hegemoni Amerika Serikat yang sudah mulai dirintis sejak usainya Perang Dunia II. Pada saat itu Amerika Serikat memegang hegemoni dunia karena tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ekonomi dan politiknya. Hegemoni ini mulai digoyahkan Uni Sovyet dan RRC, sehingga hegemoni militer harus “dibagi” Amerika Serikat dan negara itu. Sementara itu, hegemoni ekonomi juga harus “dibagi” dengan negara – negara Eropa dan Jepang. Sejak itu Amerika Serikat berupaya memperoleh kembali “hegemoni” militer dan ekonomi melalui dua cara utama : secara unilateral dan militeristik atau secara diplomasi damai melalui jalur multilateral. Sejarah politik luar negeri Amerika Serikat sejak itu diwarnai tarik – menarik antara dua strategi ini.<sup>36</sup>

Namun, satu hal tetap konsisten, yaitu visi “mesianis” yang dijadikan sebagai legitimasi terhadap posisi hegemon tersebut. Berbagai doktrin politik luar negeri yang dikeluarkan oleh presiden – presiden Amerika Serikat mulai dari Truman sampai George W. Bush menunjukkan kesamaan ciri dalam hal cara pandang “mesianis” yang menempatkan Amerika Serikat Sebagai *the benevolent*

<sup>35</sup> Jatmika, *Op. Cit.*, hal. 198 –199.

<sup>36</sup> Smita Notosusanto, “Hegemon” dalam *Tempo*, 6 April 2003, hal. 102.



*hegemon*—“ penyelamat “ dunia dari segala bentuk “ kejahatan “ , baik komunisme, proteksionisme, tirani, narkotik, maupun baru – baru ini terorisme. Untuk mencapai tujuan ini, cara unilateralis – militer sering menjadi pilihan, termasuk strategi operasi rahasia oleh CIA- ataupun strategi yang melibatkan partisipasi yang melibatkan pasukan dan persenjataan Amerika Serikat secara terbuka, seperti di Vietnam, Korea, dan dalam era pasca Perang Dingin, di bekas Yugoslavia, dan di Teluk Persia.

Agresi Bush ke Irak didasarkan pada doktrin Bush yang diumumkan pada Februari 2003 dan membuka lembaran baru dalam strategi unilateralis militer Amerika Serikat karena untuk pertama kalinya Bush memasukkan kategori “ teroris “ ke dalam kategori “ tirani atau diktator “ yang selama ini menjadi musuh bagi kebebasan dan demokrasi. Irak memang sudah lama masuk kategori “ tirani “ dan disinyalir memiliki senjata pemusnah massa yang dapat digunakan oleh teroris internasional seperti Usama Bin Ladin.<sup>37</sup>

Inovasi lain dari doktrin Bush adalah dilegitimasinya doktrin *pre-emptive strike* secara terang – terangan. Meskipun cara – cara unilateralis militer sudah menjadi “ menu utama “ presiden – presiden Amerika Serikat, terutama sejak masa Reagan, dan justru makin memuncak saat masa Clinton, belum pernah doktrin *pre-emptive strike* diakui dan diadvokasi secara aktif seperti masa Bush sekarang. Menurut doktrin ini, agresi *pre-emptive* diakui dalam hukum internasional karena negara memiliki hak “ bela diri “ lebih dulu sebelum diserang pihak musuh. Bush menekankan bahwa pilihan serangan “ *pre-emptive* “ tidak menutup kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan “ komunitas internasional “, namun, “Amerika Serikat tidak akan ragu untuk bertindak sendiri –bila diperlukan –guna melaksanakan hak bela diri Amerika Serikat melalui seranagn *pre-emptive*.

Doktrin *pre-emptive strike* mengasumsikan kekuatan Amerika Serikat sebagai hegemon, seperti dianjurkan oleh dokumen “ *Defense Planning Guide* “ yang dirancang oleh Paul D. Wolfowitz pada 1992. Posisi Wolfowitz sebagai

---

<sup>37</sup> *Loc. Cit.*

arsitek agresi Amerika Serikat ke Irak sekarang dapat menjelaskan kuatnya asumsi hegemonis Amerika Serikat.<sup>38</sup>

Serbuan ke Irak merupakan babak baru bagi sejarah perang. Dalam serbuan yang diberi nama Operasi Pembebasan Irak ( *Operation Iraqi Freedom* ) itu, untuk pertama kalinya Amerika menerapkan strategi *pre-emptive*. Begitu juga, langkah – langkah yang diambil tampak jelas mengikuti irama sekuensial tiga tahap—galang dukungan domestik, jika tidak bisa internasional; serangan menentukan pada sasaran – sasaran strategis ( *centre of gravity* ); dan berjanji untuk segera meninggalkan tempat. Gagal untuk memperoleh dukungan internasional, tak ada pilihan lain, kecanggihan senjata menjadi andalan untuk efektifitas serangan militer dan menghindari korban yang tidak perlu.<sup>39</sup>

Trauma yang dialami oleh rakyat Amerika Serikat dan dunia akibat serangan teroris 11 September 2001 menumbuhkan *complacency* atau keterlengahan terhadap kecenderungan agresif Amerika Serikat sebagai hegemon. Sikap “ tidak peduli “ rakyat Amerika Serikat terhadap isu politik luar negeri dan kecenderungan untuk menjadi ‘golput ‘ dalam setiap pemilu memperkuat potensi militer agresif Amerika Serikat sebagai hegemon. Sebagian rakyat Amerika Serikat seolah baru dibangunkan dari tidur ketika bush mengumumkan rencananya untuk menyerang Irak. Namun, gelombang protes massa terhadap kebijakan Bush tidak mampu menghentikan agresi militer Amerika Serikat ke Irak karena keseluruhan sistem politik Amerika Serikat sudah direayasa sedemikian rupa untuk mendukung semua upaya Amerika Serikat sebagai hegemon.<sup>40</sup>

### 3.4 Strategi Keamanan

Para perancang kebijakan luar negeri Amerika Serikat tampaknya masih kuat memegang Teori Domino dan Strategi Pembendungan ( *containment strategy* ). Teori ini dikenal menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, baik ketika Perang Dingin maupun masa sesudahnya, misalnya, para pemegang

<sup>38</sup> *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Kusnanto Anggoro, “ Belenggu Perang “, *Kompas*, 24 Maret 2003, hal. 4.

<sup>40</sup> *Loc. Cit.*

keputusan luar negeri Amerika Serikat masih sangat percaya, kalau satu negara atau kawasan jatuh ke tangan musuh maka negara sekitarnya tinggal menunggu giliran. Karenanya Amerika Serikat harus mencegah meluasnya pengaruh musuh tersebut dengan kebijakan pembendungan. Misalnya kalau Mesir jatuh ke tangan kaum Muslim militan, maka cepat atau lambat kawasan Afrika Utara akan jatuh pula. Kalau Saddam Hussein dibiarkan menguasai Kuwait, maka semenanjung Arab akan berada di bawah pengaruh Saddam. Kalau Revolusi Iran tidak dibendung, maka kawasan Teluk akan jatuh ke dalam dominasi Iran.<sup>41</sup>

Penerapan Teori Domino akhirnya juga meluas ke kawasan Timur Tengah, yang menurut Eisenhower, ketika itu, sedang mengalami *vacum of power* karena ditinggal Inggris sebagai super power sehingga Amerika Serikat perlu segera melakukan tindakan kontrol dan dominasi persekutuan Barat. Di depan Kongres Eisenhower berpidato :

*"...the existing power vacuum must be filled by United States before it is filled by Russia".<sup>42</sup>*

Prinsip dasar strategi Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia ( Timur Tengah ) adalah untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan yang dikehendaki, di satu sisi untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat terhadap negara - negara sahabatnya, dan di sisi lain melancarkan akses minyak pada harga yang stabil. Amerika Serikat menaikkan Iran di bawah Shah Reza Pahlevi sebagai pilar kekuatan regional yang diharapkan. Kemudian mendukung Saddam Hussein dalam perangnya dengan pemerintah revolusioner Iran untuk membendung ancaman pemerintahan Khomeini. Kedua pendekatan terbukti membahayakan. Dalam kasus Shah, strategi Amerika Serikat untuk stabilitas lepas ketika ia digulingkan. Dan, dalam kasus Saddam Hussein, dukungan Amerika Serikat mengakibatkan peningkatan senjata konvensional secara massif.

<sup>41</sup> Kompas, 7 Agustus 1996, dalam Jatmika, *Op. Cit.* hal. 193.

<sup>42</sup> Lebih lanjut lihat., Jatmika, *Op. Cit.*, hal. 196.

Pada dasa warsa 1950-an, politik Amerika Serikat dipengaruhi oleh strategi “ *massive retaliation* “ yang berarti bahwa jalan terbaik bagi Amerika Serikat dan sekutu – sekutunya untuk mengalahkan lawan adalah langkah militer ekstrim, yaitu : serangan nuklir massif atau ancaman serangan nuklir massif. Pandangan yang dominan di Washington dan keamanan Amerika Serikat menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu panggung konfrontasi nuklir dengan Uni Sovyet, seandainya hal tersebut terjadi.

Pada dasa warsa 1960-an, strategi retaliasi massif mengalami revisi dan diubah menjadi strategi “ *flexible response* “ yang mengakui bahwa situasi konflik internasional, terutama konflik antara dua negara super power sesungguhnya melewati tahap – tahap tertentu, yakni ddari negosiasi yang didasarkan atas posisi yang kuat sampai tahap yang yang paling kritis. Dengan demikian, strategi “ *flexible response* “ memberikan berbagai pilihan dimana penggunaan kekuatan militer dapat dikombinasikan denagn cara – cara politik dan ekonomi, serta jalur ideologis.

Pada dasa warsa 1970-an, Amerika Serikat merubah strategi “ *flexible response* “ menjadi “ *realistic deterrence* “. Perbedaan antara keduanya dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Malvin Lavid sebagai berikut : yang pertama lebih bersifat responsif dan reaktif, sedangkan yang kedua positif dan aktif. Jika pada strategi yang pertama menitikberatkan pada “ *containment* “ dan akomodasi , maka strategi yang kedua menekankan keterlibatan kekuatan AS dalam konflik Timur Tengah secara terarah serta perundingan yang didasarkan pada posisi yang kuat.<sup>43</sup>

Memasuki dasa warsa 1990-an, strategi “ *realistic deterrence* “ mengalami perubahan mendasar setelah Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Sovyet. Amerika Serikat pasca Perang Dingin meletakkan strategi politik global dengan menggariskan suatu definisi kepentingan nasional.

Perubahan – perubahan doktrin politik – militer Amerika Serikat, pada gilirannya ikut merubah persepsi kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur

---

<sup>43</sup> Penulis mengambil penjelasan dari Amien Rais, Sulvi Indriati, (*Skripsi* ), *Op. Cit.*, hal. 31 – 32; lihat juga Jatmika, *Op. Cit.*, hal. 200.

Tengah. Amerika Serikat melihat Timur Tengah sebagai kawasan penting dan khusus, oleh karena kepentingan Amerika Serikat di Teluk Persia, Samudera Indonesia, dan Afrika banyak ditentukan oleh posisi Amerika Serikat di Timur Tengah.

Bubarnya Uni Sovyet, yang *nota bene* merupakan lawan Ideologi Barat, telah menempatkan Amerika Serikat sebagai kekuatan ekstra regional utama yang mampu memainkan kartu – kartu politik, strategi dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Hal ini diperkuat oleh kemenangan Amerika Serikat dalam melakukan perang menekan Irak. Dampak daripada kemenangan ini membuat Amerika Serikat semakin leluasa untuk melakukan pengaturan keamanan, dengan melakukan pendekatan yang oleh Presiden Bush<sup>44</sup>, dinyatakan sebagai “*the new world order ( in the Middle East)*”.

Namun, jika kita lihat aspek tatanan baru tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi Amerika Serikat tersebut sebenarnya tidak memperkenalkan hal yang baru,<sup>45</sup> sebab Amerika Serikat tidak mengubah pola – pola lama dalam sikap politiknya di kawasan Timur Tengah.

Amerika Serikat memang harus berhati – hati dalam usahanya merencanakan sistem keamanan Teluk dan Timur Tengah yang dapat menyalurkan kepentingan – kepentingannya. Masalahnya, bila sistem atau pengaturan keamanan itu kelihatan didominasi oleh Amerika Serikat, negara – negara Arab yang selama ini sudah masuk kantung Amerika Serikat dapat menghadapi bahaya dari dalam. Bahaya itu berupa radikalisme rakyat Arab yang, bagaimanapun, tetap tidak ingin melihat kolonialisme Barat dalam bentuk lain.<sup>46</sup>

Walaupun James Baker, Menlu Amerika Serikat, berkali – kali menegaskan bahwa Washington tidak akan memaksakan “*Pax Americana*” di

---

<sup>44</sup> Untuk lebih lanjut lihat, *National Security Strategy of The United States*, The White house, Washington : US Government Printing Office, August, 1991, hal. V. 1-4, 27-28, dalam M. Riefqi Muna, “Masalah Keamanan Regional di Teluk Parsi : Kompleksitas dan Peranan Kekuatan Ekstra Regional” dalam *Jurnal Ilmu Politik No. 12 1993, Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>45</sup> *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> Amien Rais, *Op. Cit.*, hal. 21.

Timur Tengah, tetapi banyak negara Arab yang sangat skeptis, bahkan tidak mempercayai keterangan Baker tersebut.<sup>47</sup>

Amerika Serikat memandang bahwa Irak merupakan ancaman bagi kepentingannya. Sehingga Amerika Serikat tidak ingin melihat Irak kembali kuat seperti sebelum Perang Teluk 1991 yang tentu saja mengkhawatirkan negara – negara tetangganya. Untuk itu, pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Amerika Serikat menerapkan suatu kebijakan pembendungan rangkap ( *Dual Containment Policy* ) pada tahun 1993. Bersama Iran, Irak dipersepsikan oleh Amerika Serikat sebagai ancaman stabilitas kawasan yang mempunyai kekuatan militer besar dan disegani, sekaligus mempunyai ambisi besar untuk dapat menguasai atau mendominasi kawasan Teluk.

Dalam pendekatan ini, Washington tidak mengutamakan akan kebutuhan suatu perimbangan di kawasan yang vital ini. Sebaliknya, Amerika Serikat berupaya dengan negara sekutunya di kawasan untuk menjamin keseimbangan tanpa bergantung baik dengan Irak dan Iran.

Konsep kebijakan pembendungan rangkap Amerika Serikat tidak akan lagi memainkan pada keseimbangan Irak dan Iran. Kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan, Mesir, Israel, Arab, Saudi, Turki, dan negara GCC ( *The Gulf Cooperation Council* ) akan mengizinkan Washington untuk “ melawan rezim Irak dan Iran “. Kita tidak akan bergantung pada salah satu negara untuk melawan negara lainnya.<sup>48</sup>

Kebijakan pembendungan rangkap merupakan cara yang bersifat temporer untuk mengisolasi dua negara, Irak dan Iran. Terhadap Irak, kebijakan pembendungan rangkap meliputi menegakkan semua sanksi ekonomi internasional dan pembendungan militer, termasuk penerapan zona larangan terbang di selatan Irak dan untuk melindungi suku Kurdi di bagian Utara. Sedangkan terhadap Iran, kebijakan pembendungan rangkap meliputi mobilisasi masyarakat internasional untuk mengisolasi Iran, dan secara bersamaan memberi sanksi ekonomi terbatas. Implementasi kebijakan ini terhadap Iran, adalah

---

<sup>47</sup> *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Martin Indyk seperti dikutip oleh F. Gregory Gause III dalam *Council on Foreign Relations*, 1995, hal. 149, Kusuma, ( *Skripsi* ), *Op. Cit.* , hal. 56.

diterapkannya *Iran Libya Sanction Act* ( ILSA ) oleh Kongres yang melarang perusahaan luar negeri untuk menginvestasikan lebih dari 40 juta dollar Amerika bagi pembangunan sumber – sumber energi di Iran atau Libya.

Kebijakan ini akan mampu dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, berakhirnya Perang Dingin, dengan sendirinya mengurangi pemikiran strategis yang utama. Amerika Serikat tidak lagi khawatir terhadap usaha – usaha Uni Sovyet untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah dengan mengambil keuntungan dari dukungan Amerika Serikat terhadap satu negara untuk membangun hubungan dengan yang lainnya.

Kedua, dalam dekade terakhir ini, perimbangan kekuatan regional antara Irak dan Iran tidak dapat dipungkiri lagi berada pada tingkat yang rendah kemampuan militernya. Kemenangan Irak atas Iran secara substansial mereduksi kemampuan ofensif Iran. Sedangkan kekalahan Irak pada “ Operasi Badai Gurun ” secara signifikan mengurangi kemampuan ofensifnya dan senjata pemusnah massalnya di bawah pengawasan yang ketat.

Ketiga, sebagai akibat dari invasi Irak ke Kuwait, negara – negara GCC masuk ke dalam perjanjian keamanan dengan Washington. Perjanjian ini akan memberikan kekuatan militer Amerika Serikat dengan kekuatannya mengurangi ancaman di Teluk Persia baik oleh Iran maupun Irak.

Keempat, kecenderungan masalah perbatasan terlihat positif. Washington menjalin hubungan yang kuat dengan kekuatan regional lainnya, seperti Mesir, Israel, Turki dan Arab Saudi. Kemajuan perundingan Arab – Israel menguatkan posisi Amerika Serikat di dunia Arab dan memperkuat antara sekutu regionalnya. Peningkatan isolasi terhadap Irak dan Iran untuk sementara mengurangi kemampuannya memanfaatkan konflik Arab – Israel untuk menaikkan ambisi regionalnya.

Dalam rangka merealisasikan kebijakan itu, Amerika Serikat menggunakan PBB untuk melegitimasi tindakannya, sekaligus menyembuyikan kepentingannya yang terselubung. Upaya – upaya itu berkaitan dengan

merekayasa resolusi PBB, antara lain menerapkan embargo ekonomi<sup>49</sup>, masalah penerapan zona larangan terbang dan tim inspeksi senjata UNSCOM.

Agresi Amerika Serikat ke Irak saat ini, merupakan bagian dari agenda penaklukan AS atas seluruh kawasan Timur Tengah. Menurut sebuah dokument intelijen yang konon bersumber dari Pentagon, ada tujuh negara Timur Tengah yang akan menjadi target mendatang, yakni Suriah, Iran, Uni Emirat Arab, Yaman, Somalia, Sudan, dan Aljazair.<sup>50</sup>

Di masa – masa mendatang Timur Tengah tampaknya memang masih akan diliputi situasi kacau yang sengaja direkayasa oleh negara lebih kuat yang punya kepentingan. Ini untuk memperkuat cengkeraman hegemoninya dalam upaya mengamankan berbagai kepentingan strategis, baik politik, ekonomi maupun militer. Bahkan, kecongkakan Amerika Serikat tidak hanya terlihat nyata dalam isu ini melainkan juga dalam agenda percobaan mesin – mesin perangnya di negara lain seperti yang selama ini kerap dipamerkan di Timur Tengah.<sup>51</sup>

Dari sekian banyak sepak terjang Amerika Serikat yang arogan itu, siapa pun dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat sudah kehilangan sensitivitas kemanusiaan sekalipun ia mengaku sebagai pendekar HAM. Dan, dari kehancuran Irak akibat Perang Teluk II serta segala implikasi sesudahnya seperti embargo yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan pada rakyat, Irak sejauh itu belum pernah menghirup ‘nafas panjang’. Tapi, dalam keadaan seperti itu Amerika Serikat malah tega melancarkan agresi yang tidak seimbang.

Selama ini, Amerika Serikat menempuh tiga cara. Cara tersebut adalah serangan langsung untuk membunuh pemimpin musuh melalui agen – agen CIA, mendukung pemberontakan bersenjata atau kudeta, dan menggusur pemimpin musuh dengan menggunakan kekuatan militer dari luar.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Asumsinya adalah kalau secara ekonomi sudah ditekan, maka pengembangan militer dan persenjataan sulit untuk dilakukan secara maksimal.

<sup>50</sup> M. Solihat, “Kemerosotan Wibawa PBB”, dalam *Republika*, 3 April 2003, hal. 5.

<sup>51</sup> *Loc. Cit.*

<sup>52</sup> Menurut Stephen T. Hosmer, dalam Maruli Tobing, “Saddam Hussein Mulai Transformasikan Perang”, *Kompas*, 26 Maret 2003 hal.1 dan 11.



Invasi militer<sup>53</sup> merupakan pendekatan yang paling tepat untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat dalam jangka panjang. Sebab, di sini bukan hanya pemimpin yang musuh yang menjadi target, tetapi seluruh elemen pendukung rezim lama juga dapat dibersihkan.

Dalam menyikapi perkembangan politik dunia yang makin dirasa makin mengancam kepentingan Amerika Serikat, Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengatur tatanan global. Hal ini dirumuskan dalam sebuah rancangan yang memosisikan Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar (*unipolar moment*)<sup>54</sup>, yaitu yang dikenal dengan *Grand Strategy*.

*Grand Strategy* baru Amerika Serikat yang dicanangkan sejak berakhirnya Perang Dingin, sebetulnya mempunyai tujuh elemen<sup>55</sup>. Lima dari elemen tersebut adalah pertama, mempertahankan dunia unipolar, dalam hal ini Amerika Serikat merupakan kekuatan yang tiadaandingannya. Dengan runtuhnya Uni Sovyet, Amerika Serikat mencegah munculnya kompetitor baru di Eropa dan Asia. Kedua, pengakuan bahwa terorisme merupakan ancaman baru. Ketiga, konsep pencegahan (*deterrence*) Perang Dingin sudah ketinggalan jaman. Saat ini, pencegahan, kedaulatan, dan perimbangan kekuatan harus berjalan bersama. Hal itu terjadi karena, ancaman sekarang ini bukan negara adikuasa tapi jaringan teroris transnasional. Keempat, perlunya pemaknaan ulang arti kedaulatan, karena, kelompok-kelompok teroris tidak mampu ditangkal, Amerika Serikat harus disiapkan untuk melakukan intervensi di mana – mana. Kelima, Amerika Serikat perlu memainkan peran langsung dan leluasa untuk memusnahkan ancaman.

Doktrin Bush, itulah landasan resmi strategi keamanan nasional pemerintah Amerika Serikat sekarang. Tapi itu pula yang melahirkan kegelisahan bangsa – bangsa di Dunia Ketiga. Sebab, hakekat doktrin ini “mendahului perang, sebelum musuh mengadakan ancaman”.

---

<sup>53</sup> *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Istilah ini yang oleh seorang kolumnis politik Charles Krauthammer, dimaknai sebagai suatu periode dimana sebuah ( negara ) adikuasa, AS, berada paling depan dan berdiri di atas semua kekuatan dunia lainnya.

<sup>55</sup> *Foreign Affairs*, September/Oktober 2002, dalam *Kompas*, 13 April 2003, hal. 36.

Dalam pidatonya di West Point, Juni 2002, George W. Bush mengatakan, perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan dengan cara defensif. Amerika Serikat harus menghadapi langsung ancaman itu dengan memindahkan pertempuran di kandang musuh dan menghancurkan rencana jahat mereka.<sup>56</sup>

Doktrin Bush menyebut tiga agen yang mungkin menggunakan senjata maut di wilayah Amerika Serikat maupun terhadap kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Masing – masing adalah organisasi teroris global, negara yang pemerintahannya lemah yang memberi tempat bagi teroris, dan negara yang dipimpin para pelaku kriminal.<sup>57</sup>

Semangat Doktrin Bush sendiri paralel dengan apa yang disarankan buku *Operations Against Enemy Leaders*. Dalam buku itu disebutkan, serangan terhadap pemimpin musuh ditujukan untuk memaksa mengubah kebijakan dan perilaku politiknya, membuat musuh jera dan tidak mengulangi perilaku tersebut di masa depan, menggusur rezim yang mempunyai potensi membahayakan kepentingan Amerika Serikat, melumpuhkan kemampuan musuh melancarkan perang dan aktivitas terorisme internasional.<sup>58</sup>

### **3.5 Saddam Hussein Sebagai Penghambat Kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah**

Keputusan atau kebijakan Amerika Serikat dalam menganggap Saddam Hussein sebagai penghambat ataupun penghalang pencapaian kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah merupakan bagian dari proses kebijakan Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak. Dalam politik, memang hanya kepentingan yang paling abadi, hal ini juga terlihat dalam konteks hubungan antara Irak dengan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sama – sama ingin mencapai kepentingannya masing – masing yaitu ingin menguasai kawasan. Kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini sering dihalangi oleh sosok Saddam Hussein yang keras kepala.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>57</sup> *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 11.

Berbicara tentang politik dan pemerintahan Irak, maka tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh Saddam Hussein. Begitu juga dalam rangka menguasai Irak dan bahkan kawasan Timur Tengah Saddam Hussein harus dapat ditaklukkan terlebih dahulu, karena Irak adalah sebuah negara yang sepenuhnya didominasi oleh Saddam Hussein dan kroninya.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 1979, Saddam telah mendominasi proses pengambilan kebijakan luar negeri Irak. Peran yang dimainkan oleh Saddam dalam kancah politik regional maupun internasional banyak dipengaruhi oleh ideologi Partai Baath dan pengaruh Pan-Arab-nya yang bersifat nasionalistik, sehingga Saddam dengan berbagai gebrakannya nampak sangat agresif dan ambisius untuk menjadi pemimpin kawasan. Hal ini juga ditunjukkan Saddam terhadap negara Barat, khususnya Amerika Serikat.

Keinginan Saddam Hussein menjadi pemimpin kawasan membuat Amerika Serikat mempunyai persepsi bahwa Saddam Hussein adalah orang yang tidak dapat diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat menganggap bahwa Saddam Hussein adalah penghambat atau penghalang kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dianggapnya sangat strategis tersebut.

Titik balik dari kejayaan Saddam Hussein adalah ketika dia menduduki Kuwait dan menjadikannya sebagai propinsi Irak ke 19 pada tanggal 2 Agustus 1990. Setelah peristiwa ini negara-negara Barat secara terbuka menganggapnya sebagai musuh. Serta menempuh berbagai cara untuk menumbangkannya.

Saddam Hussein adalah sosok yang sangat anti Amerika Serikat dan tidak mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Saddam Hussein bahkan cenderung menentang kepentingan Amerika Serikat, singkatnya logika Saddam dengan kepentingan Amerika Serikat bertolak belakang.

Sebagai Negara Anggota GNB, Irak juga mempunyai peran dalam percaturan politik dunia ketiga terhadap negara maju dalam hal ini Amerika Serikat, dimana logika kepentingan negara dunia ketiga juga bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Disamping itu posisi Irak sebagai negara anggota OPEC juga sangat berperan dalam menentukan produksi, distribusi serta harga

minyak dunia, karena Irak mempunyai banyak persediaan minyak. Dengan latar belakang Irak mempunyai sumber daya alam yang melimpah, Amerika Serikat sangat berkeinginan untuk mengajak Irak bekerja sama, namun Saddam Hussein tidak mau untuk kooperatif dengan Amerika Serikat, sehingga mendorong Amerika Serikat untuk menjadikan Irak sebagai musuh.

Sejak akhir perang Teluk, Saddam semakin berpaling ke kekuatan ekstra regional, seperti Perancis, China dan Rusia, untuk mempromosikan pengakhiran sanksi PBB dan isolasi diplomatik atas Irak pada bulan Nopember 1997, misalnya Saddam dalam waktu singkat menarik tuntutan untuk penghentian inspeksi UNSCOM ketika Perancis dan Rusia memperingatkannya bahwa hal ini dapat menunda pencabutan sanksi tersebut. Baghdad juga telah menjanjikan kontrak dan keuntungan ekonomi lainnya bagi perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang akan membantu pengakhiran sanksi PBB tersebut.<sup>59</sup>

Sebagai orang penting, bahkan bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di Irak, Saddam dikenal sebagai orang yang ambisius. Keambisiusannya itu dapat dibuktikan dengan serbuan ke Iran yang dianggapnya sebagai “ Jalan Pintas ” untuk mewujudkan impiannya.

Salah satu latar belakang Saddam untuk melakukan penyerbuan ke Iran adalah berkaitan dengan keinginannya untuk menjadi “ Polisi ” di kawasan Teluk Parsi menggantikan kedudukan Shah Iran yang terguling pada bulan Pebruari 1979. Selain itu kesempatan Saddam untuk menduduki kursi lowong kepemimpinan Arab agaknya semakin terbuka lebar dengan kematian Presiden Mesir Anwar Sadat.

Berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk melindungi negara Israel, Irak justru menjadi ancaman terbesar bagi Israel, dan ini dapat dilihat sebagai benturan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Irak yang ingin menjadi pemimpin kawasan, untuk menjaga keamanan dan eksistensi negara Israel. Amerika Serikat jelas menganggap Irak sebagai negara yang harus

---

<sup>59</sup> Mohammad Satari, H. Almuzzammil Yusuf, *Perang Irak – AS: Hegemoni Baru Amerika Serikat di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, kerjasama COMES dengan Jim Malaysia, Jakarta, 2003, hal. 35.

dikuasai, sehingga ancaman terhadap Israel dan kepentingan Amerika Serikat lainnya dapat dikurangi.

Dengan adanya karakteristik Saddam Hussein yang kaku, agresif ambisius dan cenderung tidak mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bersikeras untuk melengserkan pemerintahan Saddam dengan maksud pemerintahan selanjutnya dapat diajak kerja sama secara lebih kooperatif sehingga menjadikan kepentingan Amerika Serikat dapat dicapai, akibat tidak adanya penghambat.

### 3.6 Upaya Amerika Serikat Untuk Menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein

Untuk menjamin kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, berbagai upaya dilakukan Amerika Serikat. Salah satu upaya yang bersifat monumental dan signifikan adalah kebijakan Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Dalam usahanya tersebut Amerika melakukan berbagai tindakan yang bersifat melemahkan posisi Irak atau Saddam Hussein.

Perang teluk II tidak lebih merupakan perang kekuatan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengeroyok Irak. Perang Teluk II yang berkobar sejak 17 Januari 1990 menghadapkan Irak versus Amerika Serikat dan sekutu Barat serta negara Arab yang sebelumnya mendukung Irak pada Perang Teluk I.

Sejak meruyaknya krisis Teluk pada 2 Agustus 1990, DK PBB telah mengesahkan 12 resolusi mulai dari kecaman, pengerahan pasukan multinasional, blokade ekonomi, sampai persetujuan penggunaan kekuatan militer. Gencarnya PBB dalam mengeluarkan resolusi tidaklah mengherankan karena PBB selama ini telah menjadi alat hegemoni Amerika Serikat.<sup>60</sup> Amerika Serikat memanfaatkan seluruh resolusi DK PBB sebagai payung untuk mengoptimalkan pencapaian

---

<sup>60</sup> Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri : Mereka Melawan Amerika*, PUZAM, Jakarta, 2003, hal. 102.

strategi globalnya. Hal itu terutama dicapai dengan pembebasan Kuwait sekaligus netralisasi ancaman Irak sebagai dalih.

Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk melemahkan Irak adalah dengan menjaga komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan oposisi Irak. Amerika Serikat terus mengadakan tekanan terhadap Irak. Pada bulan November 1998, Presiden Clinton menerima oposisi Irak dan menjanjikan akan bekerja sama dengan “ sebuah pemerintahan baru “ di Baghdad. Penasehat Keamanan Nasional Samuel Berger menyebutkan pernyataan presiden itu dengan mengatakan bahwa pemerintah Amerika berupaya “ memperkuat oposisi Irak “ karena kebijakan pengendalian tidak dapat dipertahankan dan karena kelanjutan kekuasaan Saddam di kursi kepresidenan begitu berbahaya dengan kepentingan Amerika Serikat.<sup>61</sup>

Setelah berakhirnya Operasi Badai gurun, Koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat berupaya mengkoersi Irak agar dapat menaati berbagai resolusi PBB, termasuk Resolusi DK PBB No. 687, yang mendesak Baghdad menghancurkan program *Nuclear Biological Chemical* (NBC)-nya. Berdasarkan ketentuan resolusi ini, Irak akan menginventarisasi program dan penimbunan persenjataan kimia dan biologinya serta seluruh bahan yang terkait dengan persenjataan nuklir dan rudal balistik.

Sebagai hasil akhir upaya koersi tersebut adalah pengiriman inspektur UNSCOM ke Irak. Melalui para inspektur tersebut, Washington menemukan berbagai informasi tentang program NBC Irak. Selain itu, inspektur PBB mengawasi penghancuran material nuklir, Kimia, dan yang terkait dengan rudal dalam jumlah besar. Agaknya yang paling penting adalah kehadiran inspektur dan monitoring terus menerus dapat membuat lebih mempersulit Saddam dalam melanjutkan proses produksi senjata kimia dan biologi serta membangun kembali program – program nuklir dan rudalnya.

Selain membentuk tim inspeksi senjata melalui mekanisme PBB, untuk melemahkan atau menggeser pemerintahan Saddam Amerika Serikat juga

---

<sup>61</sup> Mohammad Safari, H. Almuzzamil Yusuf, *Perang Irak – AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, Kerja Sama antara COMES dengan Jim Malaysia, Jakarta, 2003, hal. 47.

membuat *Safe Haven* bagi suku Kurdi ( 1991 – 1992 ). Latar belakang kebijakan ini adalah segera setelah Operasi badai Gurun, suku Kurdi Irak memberontak terhadap rejim Baath. Pada 22 Maret 1991, rejim ini mulai melakukan serangan balasan atas pemberontakan ini. Angkatan Darat Irak menyerang para pemberontak dan warga sipil di Irak Utara yang menyebabkan jatuh korban dalam jumlah besar dan penderitaan di antara suku Kurdi Irak.<sup>62</sup>

Untuk meringankan krisis ini, Amerika Serikat mengirim pasukan pada bulan April 1991 untuk menciptakan “ *safe haven* ” agar para pengungsi kembali ke kampung halaman mereka. Resolusi DK PBB No. 688 memberi kewenangan dalam menggunakan kekuatan untuk melindungi upaya pertolongan di wilayah utara Kurdi.

Dibentuknya Zone Larangan Terbang di wilayah Selatan pada bulan Agustus 1992 – sekarang, adalah upaya Amerika Serikat guna menekan pemerintahan Irak juga. Seperti suku Kurdi, kelompok Syiah telah bangkit pasca berakhirnya Operasi Badai Gurun. Seperti yang dilakukan terhadap suku Kurdi, Saddam secara brutal menindas pemberontakan ini.

Amerika Serikat mengorganisir sebuah koalisi terbatas untuk mendukung dan berpartisipasi dalam operasi penegakan atas wilayah zone yang sudah dideklarasikan. Pejabat Amerika Serikat membenarkan operasi yang disebut *Southern Watch* ini di bawah Resolusi DK PBB No. 688, yang melarang pemerintahan Irak menindas rakyatnya sendiri. Sebagian besar aset udara yang digunakan untuk menegakkan *Southern Watch* terbang dari basis militer di Teluk Persia.

Langkah – langkah yang diambil Amerika Serikat untuk menguasai atau menaklukkan Irak juga melalui pemberian sanksi embargo ekonomi terhadap Irak, sehingga ekonomi Irak sulit untuk berkembang dan bahkan mengalami kemacetan. Dampak dari embargo ini adalah penderitaan yang mendalam di kalangan rakyat Irak sendiri. Kesulitan – kesulitan yang dirasakan rakyat Irak diharapkan dapat membuat pemerintah Irak mau untuk tunduk atau bekerja sama dengan Amerika Serikat atau negara Barat lainnya. Asumsi yang dipakai oleh

---

<sup>62</sup> Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hal. 62.

Amerika Serikat adalah bahwa dengan adanya embargo ekonomi secara otomatis akan memperlemah kekuatan pertahanan dan militer Irak sehingga sulit menjadi negara yang kuat secara militer dan pada akhirnya tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain di kawasan maupun dunia.

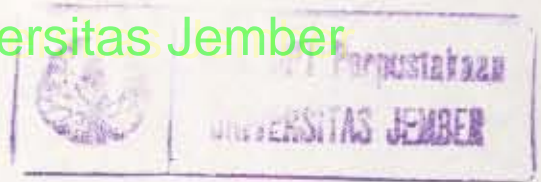
Langkah Amerika Serikat yang paling monumental adalah serangan Amerika Serikat ke Irak. Serangan ini adalah hal yang sudah dapat diduga jika dilihat dari perspektif politik Amerika Serikat yang mengedepankan kepentingan. Hal itu dapat dilihat sejak keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1441 yang dikeluarkan pada 8 November 2002.<sup>63</sup> Resolusi ini menjadi “pintu masuk” bagi Amerika Serikat untuk menyerang Irak secara besar – besaran dan menggulingkan Saddam Hussein dari kursi kekuasaannya. Resolusi ini memberikan wewenang yang tak pernah ada sebelumnya pada tim inspeksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap situs – situs yang dicurigai, serta bertanya pada para ahli persenjataan Irak dalam upaya mengakhiri dugaan program senjata kimia, biologi, dan nuklir yang dimiliki Irak.

Meskipun Resolusi itu tidak memberikan mandat otomatis kepada Amerika Serikat untuk menyerang Irak jika terjadi pelanggaran Resolusi – pelanggaran harus dilaporkan oleh Tim Inspeksi ke DK PBB—tetapi sangat mungkin, Resolusi itu digunakan senjata ampuh, mengingat peluang terjadinya pelanggaran oleh Irak tetap terbuka. Kini terbukti, Resolusi 1441 hanya digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengamankan serangan Amerika Serikat, setelah seluruh persenjataan berbahaya Irak, diyakini Amerika Serikat sudah musnah. Amerika Serikat kemudian bertindak tanpa memperdulikan Resolusi 1441, dengan langsung memberikan ultimatum 2 x 24 jam kepada Saddam Hussein.

Serangan Amerika Serikat yang dimulai pada tanggal 20 Maret 2003 adalah merupakan upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan pada akhirnya untuk menancapkan kepentingan atau hegemoninya di kawasan atau dunia. Kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak adalah fakta upaya Amerika Serikat dalam rangka melemahkan posisi Irak sehingga akan dapat dikuasai secara politik maupun ekonomi.

<sup>63</sup> Adian Husaini, *Habis Irak, Siapa Lagi ?*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003, hal. 15.





## BAB IV

### FAKTOR – FAKTOR AMERIKA SERIKAT MENGGULINGKAN

#### PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN

Alasan Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan gempuran terhadap Irak tahun 1990 – 1991 jelas karena Irak menginvasi Kuwait. Pada tanggal 20 Maret 2003, Amerika Serikat dan pasukan koalisinya kembali mengadakan serangan militer ke Irak dengan alasan yang terkesan dicari – cari. Amerika Serikat menganggap Iran, Irak, dan Korea Utara sedang mencoba mengembangkan senjata penghancur massa dan mensponsori terorisme. Ketiga negara tersebut disebut oleh Amerika Serikat sebagai *axis of evil* dan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan serangan militer terhadap Irak. Dalam konteks ini, apalagi negara yang bersangkutan tidak demokratis, sehingga dengan alasan penyebaran nilai demokrasi pula Amerika Serikat lebih memantapkan diri untuk mengadakan agresi militer. Dalam hal ini, akan dijelaskan faktor utama invasi Amerika Serikat ke Irak.

#### 4.1 Faktor Politik

Invasi Amerika Serikat ke Irak adalah sebuah keputusan politik. Dalam konteks ini, demokratisasi dipakai alasan oleh pengambil kebijakan politik. Agenda yang tersembunyi dalam aksi tersebut tetap memerlukan pemahanan dan argumen analitis. Apakah benar invasi itu sebagai tujuan atautkah itu merupakan cara untuk mencapai tujuan. Invasi tersebut merupakan interaksi dalam sistem. Namun, apa pun mekanismenya, kepentingan adalah tetap mewarnai keputusan invasi tersebut.

##### 4.1.1 Menjaga Eksistensi dan Keamanan Negara Zionis Israel

Israel adalah sebuah negara kecil di pinggiran Timur Laut Tengah. Di seputar negara yang mengaku sebagai tempat tinggal orang – orang Yahudi ini,

ada sejumlah negara Arab. Di sebelah Utara ada Libanon, di Timur ada Jordania dan Suriah, di Barat Daya ada Mesir.

Israel mempunyai luas sekitar separoh Belanda. Lebih dari setengahnya adalah padang pasir. Jarak antar kota – kota penting sangat dekat. Antara Tel Aviv ( Barat ) dan Jerusalem ( Timur ) hanya berjarak 40 mil, dan dari Tel Aviv ke Haifa ( Utara ) atau Beersheba ( Selatan ) berjarak 60 mil.<sup>1</sup>

Negara Israel resmi berdiri sejak proklamasi kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Dengan kemerdekaan ini, cita – cita orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mendirikan negara Yahudi tercapai. Mereka telah melaksanakan “ amanat “ yang disampaikan Theodor Herzl dalam tulisannya *Der Judenstaat* ( Negara Yahudi ) sejak 1896.<sup>2</sup>

Berdirinya Negara Israel tidak terlepas dari usaha Zionisme. Biasanya istilah zionisme lekat hubungannya dengan nama Theodor Herzl ( 1860 – 1904 ). Dialah yang telah menyusun doktrin zionisme sejak 1882, di Wina. Dia pula yang kemudian mengkongkretkan doktrin itu secara sistematis. Setahun setelah itu ( 1897 ), diadakan Kongres Yahudi Sedunia di Basel yang antara lain memutuskan akan dibentuknya negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itu Zionisme menjadi gerakan politik.

Dilihat letak geografisnya, Israel berbeda dengan negara – negara lain di wilayah Timur Tengah. Israel adalah negara Yahudi dikelilingi oleh negara dengan mayoritas Muslim. Orang Israel kebudayaannya bergaya hidup Barat, namun hidup di tengah masyarakat dengan kebudayaan Timur. Mereka adalah imigran atau turunan imigran, sementara tetangganya adalah penghuni turun temurun yang mendiami desa atau kampung selama ribuan tahun.

Dengan berdirinya Israel, zionisme tidak lagi menjadi gerakan keagamaan. Bahkan mereka semakin sewenang – wenang terhadap orang yang bukan Yahudi. Israel melakukan kebijakan dalam negeri secara diskriminatif dan

---

<sup>1</sup> Lebih jauh lihat Borthwick, dalam Riza Sihbudi ( et.al. ), *Profil Negara – Negara Timur Tengah*, Buku Satu, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal.102; perlu diketahui pula, sebenarnya daerah atau wilayah Israel masih menjadi perdebatan atau perselisihan sampai sekarang dan merupakan sumber konflik yang berkepanjangan.

<sup>2</sup> dalam *Loc. Cit.*

rasis. Walaupun demikian, berbagai gelombang imigran berdatangan ke Palestina. Gelombang imigrasi massal yang biasa disebut sebagai *aliyah* ini berdatangan dari berbagai negara : Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Aden, Jerman, dan negara – negara Afrika. *Aliyah* kian mendapat angin setelah Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothchild, salah seorang tokoh zionis. Surat itu berisi pemberitahuan dukungan Pemerintah Inggris kepada keinginan gerakan zionis untuk mendirikan negara di Palestina. Surat yang dikirim tanggal 2 November 1917 itu kemudian dikenal dengan sebutan **Deklarasi Balfour**.

Sejarah kedatangan bangsa Yahudi ke daerah Amerika, akan sangat berkaitan erat dengan awal terbukanya kehidupan benua ini, dan pada dasarnya, bagian besar bangsa Yahudi di sini adalah berasal dari bangsa Portugal dan Spanyol dan kelompok “ Marranos “ yang berhijrah ke daerah ini semenjak abad XVII. Terbukti dengan pembentukan kesatuan Yahudi di wilayah Meriland tahun 1632 dan di daerah New Amsterdam tahun 1654 yang kemudian berubah menjadi nama New York.<sup>3</sup>

Keberadaan bangsa Yahudi di Amerika pada awalnya merupakan bangsa Yahudi yang kecil dan tidak diperhitungkan, namun ketika mulai muncul gerakan keras Nazi di Jerman, maka posisi bangsa Yahudi Amerika menjadi semakin kuat karena pusat pergerakan Zionis kemudian dipindahkan dari Jerman ke Amerika.

Berawal dari Perang Dunia I, hubungan politik dan dagang serta diplomasi antara Amerika dan wilayah Timur Tengah menjadi semakin tinggi dan erat, hal ini disebabkan semakin tingginya kebutuhan minyak Amerika yang menggantungkan pada penggaliannya di daerah Timur Tengah.

Kondisi bangsa Yahudi pasca Perang Dunia II, pada tahun sekitar 1920-an, mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, sampai terkristalnya semua perjuangan bangsa Yahudi, menggelindingnya buku putih yang terkenal pada tahun 1939.

---

<sup>3</sup> Lebih lanjut lihat, H. Usep Romli H. M., H. Achmad Setiyaji, Zainurrofiq, *Zionis Israel di Balik Invasi AS ke Irak : Upaya Menciptakan Israel Raya*, Mujahid Press, Bandung, 2003, hal. 71.

Dalam perjalanan politiknya, Israel merangkul Amerika. Keinginan dihargai oleh Amerika ini, membawa Israel untuk memproyeksikan diri bukan hanya aset moral, tetapi juga aset operasional. Para pejabat Israel selalu khawatir kalau masyarakat Amerika berpaling dari mereka. Namun perkembangan selanjutnya, Perhatian Amerika Serikat terhadap Israel, telah melewati batas kewajaran, Israel menjadi sekutu bahkan anak emasnya.

Sejak Israel masuk Palestina atas dukungan Inggris—kemudian Amerika Serikat—dengan cara mencaplok, merampok, merampas, mengusir, menyiksa, dan membunuh warga Arab di Palestina, pecalah krisis Arab – Israel yang hingga kini masih berkembang semakin rumit dan runyam. Apalagi, dengan semakin kuatnya posisi Israel dan terus terjepitnya posisi Arab untuk menggolkan usulan – usulan penyelesaian karena desakan konsep perdamaian hasil rekayasa pihak – pihak yang berkepentingan ( Amerika Serikat dan mungkin Inggris ). Konflik ini pun telah berkembang menjadi konflik multidimensional.

Memang, tidak ada suatu konflik yang begitu pelik dan lama membara dibandingkan konflik Arab – Israel. Dalam catatan sejarah kontemporer, sudah sejak akhir abad XIX konflik timbul dan tidak pernah terpecahkan secara adil. Bahkan, pada awal abad XXI hingga kini belum tercapai juga formula pemecahan bagi perdamaian yang langgeng, sekalipun proses perdamaian tidak pernah henti – hentinya ditempuh. Palestina pun menjadi tempat lintasan sejarah ledakan dunia Islam dan nasionalisme duni Arab melawan peradaban Barat yang menggunakan zionisme sebagai kendaraan ( atau sebaliknya ) untuk mencapai segala macam kepentingannya, dan menjadikan Timur Tengah sebagai daerah konflik menyejarah dan paling lama.

Konflik paling krusial pad jaman ini yang melibatkan bangsa Arab dan Israel itu semula berakar dari kepentingan Israel sendiri yang ingin memiliki *national territory* bagi bangunan *national home*-nya itu. Keinginan itu timbul karena bangsa Yahudi telah lelah berdiaspora ke seluruh dunia. Mereka ingin punya rumah sendiri untuk pulang. Upaya untuk menggolkan kepentingan tersebut telah memakan waktu selama berabad – abad. *National territory* itu pada awalnya akan disediakan di Amerika Latin oleh Inggris, berdekatan dengan

Amerika Serikat. Namun, rencana ini batal atas desakan Yahudi ortodoks yang menginginkan kegemilangan Israel masa lalu di Mesir.<sup>4</sup>

Setelah memperhatikan berbagai pertimbangan, disimpulkan bahwa kemungkinan untuk mendirikan rumah nasional Yahudi di Mesir sangatlah tipis karena akan mengganggu kedaulatan wilayah Mesir yang telah begitu mapan. Mereka khawatir akan menimbulkan perlawanan dan penolakan yang keras bukan saja dari dunia Islam, tetapi dari Dunia Ketiga—khususnya Asia-Afrika. Akhirnya pilihan jatuh pada Palestina yang pada waktu itu masih menjadi tanah sengketa di antara beberapa monarki Arab.

Upaya peperangan atau setiap manuver politik apa pun dalam konteks politik Timur Tengah sesungguhnya merupakan hasil rancangan bersama antara Israel dan Amerika Serikat. Jika bangsa Arab melakukan perlawanan terhadap Israel, pada hakekatnya itu merupakan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Semakin jauh perjalanan perkembangan, terasa semakin tidak mudah untuk benar – benar menyelesaikan konflik Arab Israel. Alasannya, kedua negara itu ( Amerika Serikat dan Israel ) sengaja ingin menjadikan konflik tersebut sebagai sarana untuk menguasai berbagai sumber daya yang terdapat di Timur Tengah yang dimiliki negara – negara Timur Tengah.<sup>5</sup>

Apa yang menjadi agenda “ abadi “ Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, akan selalu diperjuangkan oleh Amerika Serikat dengan segala cara baik itu serangan militer maupun cara – cara damai atau diplomasi. Invasi Amerika Serikat ke Irak ( 2003 ) tidak terlepas dari pencapaian kepentingan global Amerika Serikat. Salah satu cara yang dipakai adalah bagaimana Amerika Serikat mengamankan eksistensi Negara Zionis Israel di kawasan Timur Tengah.

Melemahkan kekuatan militer Irak dan menjatuhkan kekuasaan Saddam merupakan obsesi Amerika Serikat<sup>6</sup>. Amerika Serikat tidak akan toleran terhadap kekuatan yang menandingi Israel sepanjang masih ada kekuatan lobi Yahudi di Amerika Serikat. Israel dan Amerika Serikat tidak akan pernah tenang

<sup>4</sup> Mohammad Shoelhi, *Demi harga Diri : Mereka Melawan Amerika*, Puzam, Jakarta, 2003, hal. 22.

<sup>5</sup> Jamal Abdul Nasser, dalam *Ibid.*, hal 22- 23.

<sup>6</sup> Riza Sihbudi, dalam Shoelhi, *Op. Cit.* hal. 108.

selama Irak masih kuat dan menampilkan ancaman. Sementara itu, mengajak Irak untuk bersikap bersahabat tidaklah mungkin. Irak selalu konsisten menolak setiap tipu daya Amerika Serikat sekalipun dengan begitu Irak harus merelakan pusat reaktor nuklirnya di Asirak menjadi target gempuran pesawat tempur Israel. Dengan hancurnya reaktor nuklir tersebut, Irak tidak lagi menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan kekuatan militer di Timur Tengah. Serangan itu mendapat dukungan penuh Amerika Serikat yang mengerahkan sejumlah pesawat AWACS – nya untuk memandu misi operasi pengeboman tersebut.

Di sisi lain, Israel yang mendapat dukungan Inggris dan Amerika Serikat merasa di atas angin tidak pernah segan – segan untuk bersikap paling benar dalam segala sepak terjangnya mendirikan dan mempertahankan negara Israel. Namun, meskipun merasa harga diri dan martabatnya diinjak – injak Israel dan para pendukungnya, negara – negara Arab tidak dapat berbuat banyak untuk membela diri.

Hubungan Amerika Serikat – Israel bisa terjalin sangat erat karena lobi Yahudi sangat kuat pengaruhnya di Amerika Serikat. Para pelobi Yahudi masuk dalam jaringan birokrasi dan memiliki sumber dana yang besar dan sangat menentukan dalam arah politik Amerika Serikat. Mereka itulah yang berhasil membuat para penguasa di Washington tak mampu lagi berpikir dengan bimbingan hati nurani. Keberpihakan Amerika Serikat ini sebenarnya terasa aneh sebab kalau diperhitungkan secara cermat, sebenarnya kepentingan Amerika Serikat jauh lebih banyak diuntungkan oleh dunia Arab.

Tanpa bermaksud menambah – nambahkan perilaku Amerika Serikat yang menyimpang, kehadiran pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat di Arab Saudi untuk melindungi mereka dari kemungkinan penyerbuan Irak, menghadapi invasi Irak ke Kuwait, dunia Islam diamputasi. Pengerahan pasukan multinasional itu bukan lagi bagi kepentingan negara – negara di kawasan itu, melainkan untuk tujuan mengamankan kebutuhan minyak Barat dari

kawasan Teluk sekaligus melindungi Israel dari ancaman negara tetangganya ( Irak ). Dengan demikian, semua itu hanya untuk kepentingan sepihak.<sup>7</sup>

Sementara itu, kala Perang Irak – Iran berkecamuk dengan sengitnya, Amerika Serikat merupakan salah satu pemasok- senjata utama bagi rezim Baghdad yang memperkuat kemampuan militer Irak hingga sanggup menghadapi Iran. Amerika Serikat mengharapkan mereka dapat memanfaatkan rezim Saddam Hussein untuk mengimbangi kekuasaan revolusi Islam Ayatullah Khomeini di Iran.

Dalam hal ini, Washington bersikap mendua ( *double standard* ). Amerika Serikat lebih mengutamakan kepentingannya semata – mata guna menjamin keselamatan Israel, pengamanan kebutuhan minyaknya, dan untuk mengekang meluasnya pengaruh revolusi Islam Iran di Timur Tengah dan dunia Islam.<sup>8</sup>

Mengingat Irak adalah negara yang kuat secara militer dan mempunyai pemimpin yang tidak mau kompromi atau kerja sama dengan Amerika Serikat, dan cenderung merupakan ancaman bagi Israel, maka agenda menggulingkan pemerintahan Saddam adalah salah satu bagian penting Amerika Serikat dalam usahanya mengurangi ancaman Israel dari Irak. Di samping itu pula, keberadaan Irak dengan pemerintahan Saddam Hussein sangat membahayakan posisi Israel, karena Saddam sendiri bersikeras ingin mendominasi di kawasan Timur Tengah dan ini berlawanan dengan kepentingan Amerika Serikat maupun Israel. Selain itu, Amerika Serikat ingin meminimalisasi kekhawatiran terhadap perkembangan sistem senjata modern Irak seperti senjata nuklir, biologi, kimia ( nubika ) yang ditopang teknologi maju. Kepemilikan dan penguasaan sistem senjata canggih Irak yang menakutkan Amerika Serikat itu jika tidak dihentikan akan mengancam kelangsungan hidup “ Amerika Serikat kecil di Timur Tengah “ ( Israel ).

Di balik agenda penyerangan terhadap Irak, Amerika Serikat memiliki motif politik strategis yang digalang dalam rangka mengamankan kepentingan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 7.

Amerika Serikat yang dicangkokkan secara kontinyu di Israel atau di kawasan yang lebih luas lagi, yaitu Timur Tengah dan bahkan ingin menjadi kekuatan unipolar dalam konteks dunia internasional.

Politik strategis yang paling utama adalah inginnya Amerika Serikat menjadi benteng utama penjaga keselamatan negeri Zionis agar terbebas dari ancaman serius yang sering dihembuskan oleh Irak. Karena itu, Amerika Serikat berkepentingan menghancurkan Irak. Jatuhnya rezim Saddam Hussein akan digantikan dengan rezim boneka yang mempunyai loyalitas tinggi kepada Amerika Serikat serta dapat diajak kerja sama oleh Israel. Hal tersebut tentu saja akan membuat negara Zionis itu merasa lebih aman.<sup>9</sup>

Dengan meluluhlantakkan Irak serta menjajahnya secara langsung, maka otomatis Israel akan terbebas dari ancaman Irak, yang kekuatan politik dan militernya masih sangat ditakuti oleh Israel. Selain itu, tentu akan menambah *bargaining* politiknya terhadap Negara Timur Tengah agar dapat terus memaksakan semua rencana mereka terhadap umat Islam.

Menurut rencana, bila Amerika Serikat membombardir Irak dan masyarakat internasional menjadi tegang menyaksikan perang dan penghancuran Irak tersebut, maka Israel akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina.<sup>10</sup> Dengan demikian, tak ada yang akan memeriksa dan mengutuknya ketika semua media elektronik dan cetak sibuk mengekspos Perang Irak. Bahkan sebelum Perang Irak terjadi, Israel sudah berani melakukan pembantaian di Jenin. Hal itu mereka lakukan untuk menekan rakyat dan pejuang Palestina agar menyerah dan tunduk kepada Israel.

Semua keputusan, ancaman dan tekanan Amerika Serikat terhadap Irak sebenarnya merupakan provokasi Zionis Yahudi yang terus menghembuskan perang di telinga Bush. Dengan lobi – lobi yang sangat intensif di tengah semua anggota kabinet Bush. Sehingga, kepentingan Yahudi dan Israel lebih kentara daripada kepentingan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sendiri rela

---

<sup>9</sup> Mohammad Safari, H. Almuzammil Yusuh, (editor ), *Perang Iraq – AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, Kerja sama antara COMES dengan Jim Malaysia, Jakarta, 2003, hal. 160.

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*



mendapat kecaman dari masyarakat internasional demi membela kepentingan Yahudi dan Israel.

Motivasi Amerika Serikat di balik invasi militer ke Irak juga demi kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan yang kerap tidak stabil itu Amerika Serikat membutuhkan teman ( baca : Israel ) yang juga punya kepentingan sama. Karena alasan itu, Amerika Serikat selalu berupaya melindungi Israel, apalagi saat ia sedang merasa resah di bawah bayang – bayang Irak.<sup>11</sup>

Dua negara terkuat di Teluk, yakni Irak dan Iran, mempunyai persepsi yang hampir sama tentang Israel. Kedua negara ini berada dalam hubungan yang tidak stabil, tetapi masing – masing melihat Israel sebagai negara yang berfungsi sebagai ujung tombak kekuatan imperalisme Barat. Oleh sebab itu, Amerika Serikat sebagai kekuatan Barat yang paling dekat dengan Israel selalu berusaha agar bahaya terhadap Israel yang datang dari Teluk dapat diredam dan bila mungkin dieliminasi. Seluruh strategi Amerika Serikat di kawasan Teluk harus dilihat dalam konteks persepsi Amerika Serikat tersebut.<sup>12</sup>

#### 4.1.2 Penataan Ulang Wilayah Arab

Hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau dunia Arab adalah merupakan bentuk kolonialisme Amerika Serikat. Hubungan internasional yang terjadi antara negara – negara Timur Tengah dengan negara Barat khususnya Amerika Serikat secara sekilas dan retorika merupakan suatu bentuk interdependensi namun kalau kita analisa lebih jauh lagi hubungan yang terjadi adalah hubungan eksploitatif.

Untuk menunjukkan hegemoni politik Amerika Serikat di wilayah itu, upaya mendominasi wilayah Teluk dengan menyerang Irak merupakan agenda Amerika Serikat. Washington khawatir terhadap pengaruh politik negara – negara

<sup>11</sup> M. Solihat, " AS dan Pilihan 'Jalan Perang'" , *Republika*, 22 Maret 2003, hal. 5.

<sup>12</sup> Untuk lebih lanjut lihat M. Amien Rais, " Problematika Perdamaian Timur Tengah ", dalam *Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah*, Hasil kerja Sama Departemen Luar Negeri dengan UGM, 1993, hal. 64.

lain yang mendominasi wilayah tersebut, sebagaimana Irak yang cenderung melawan kepentingan Amerika Serikat.

Dengan kata lain, menghancurkan Irak merupakan prioritas utama Amerika Serikat agar semua target dan tujuannya, baik ekonomi maupun politik, bisa tercapai terutama dalam menata kembali wilayah Timur Tengah. Hal ini bukan merupakan rahasia lagi, karena secara tegas kongres Amerika Serikat sudah menyetujui untuk menata kembali politik Timur Tengah setelah berhasil melumpuhkan Irak.<sup>13</sup>

Menurut pandangan Amerika Serikat, kemungkinan besar Arab Saudi akan dipecah menjadi beberapa negara bagian dengan merubah sistem kenegaraan dan rezim yang berkuasa. Setelah Arab Saudi dirubah dan Irak ada dalam genggaman Amerika Serikat, maka untuk negara – negara Teluk lainnya akan sangat mudah bagi Amerika Serikat untuk membentuknya sesuai dengan kepentingan politik Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Arab Saudi sedang menghadapi tekanan yang sangat berat dari Amerika Serikat. Bukan saja tekanan dari politik dengan propaganda media Barat yang selalu memojokkan dengan dalih HAM dan kebebasan perempuan. Tapi juga, Amerika Serikat menginginkan agar Arab Saudi membebaskan perempuan negeri itu agar dapat berpakaian sesuka mereka dan keluar rumah tanpa aturan pemerintah serta bisa bergaul selayaknya perempuan di tempat dan negara – negara lain. Selain itu, dari segi demokrasi, Arab Saudi terus mendapat sorotan yang sangat tajam karena dianggap ‘alergi’ dalam menjalankan demokrasi.

Begitu juga nasib negara Jordania. Kedekatannya dengan Israel selama ini tak menghalangi Amerika Serikat untuk menjalankan semua program perubahan di negara tersebut. Bahkan lebih dari itu, nampaknya Jordania harus menerima dengan lapang dada semua program Sharon mengenai masalah pengusiran semua warga Palestina ke Jordania.<sup>14</sup> Program ini mendapatkan momennya yang tepat.

---

<sup>13</sup> Safari & Yusuf, *Op. Cit.* hal. 162.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 163.

Terpilihnya Sharon disebabkan program kampanyenya menarik penduduk Yahudi. Program utamanya adalah pengusiran Palestina ke Jordania dengan istilah “ negara alternatif Palestina “. Menurutnya, dari segi strategi perdamaian di Israel, opsi itu merupakan solusi yang paling tepat.

Bagi Jordania, tidak bisa menolak semua rencana itu, karena Amerika Serikat sudah memberikan lampu peringatan kepada Jordania dan ancaman untuk menjadikannya sebagai Irak kedua kalau tak membantu kepentingan Israel dan Amerika Serikat.<sup>15</sup>

Begitu juga ada skenario pengusiran Arafat dari Palestina setelah Irak mampu dikuasai. Hal ini tidak dilakukan sebelum Irak dikuasai karena ditakutkan akan mendapatkan antipati dunia terhadap Amerika Serikat dan menjadi tekanan yang luar biasa kepada Amerika Serikat agar menyelesaikan terlebih dahulu masalah Palestina. Rencananya, akan diganti dengan pemerintahan boneka bentukan koalisi Amerika Serikat – Israel. Rencana ini akan sangat tergantung dari keberhasilan Amerika Serikat dan Israel menjinakkan Irak dan Negara Arab lainnya.

Amerika Serikat pasca invasi Irak berencana membentuk pemerintahan transisi yang sebenarnya adalah pemerintahan boneka. Ada tiga langkah yang mengerucut di antara mereka. Pertama, Irak akan diatur oleh militer. Kedua, masa transisi dengan gubernur militer Amerika Serikat akan berkuasa berdampingan dengan pemimpin sipil yang disepakai internasional. Tahap ketiga, pemerintahan akan diserahkan kepada rezim yang disukai dan berada dalam pemeliharaan Amerika Serikat.<sup>16</sup>

Kita harus mengakui bahwa dengan adanya perang akhirnya merubah peta politik dunia. Itu pula yang terjadi dengan invasi pasukan gabungan pimpinan Amerika Serikat ke Irak. Bukan hanya itu, invasi tersebut juga telah merubah tatanan dunia.<sup>17</sup> Ini akibat dari doktrin Bush dalam strategi keamanan barunya. Ini adalah bentuk lain dari imperialisme baru dan bukan kepemimpinan baru yang memberikan perlindungan bagi negara – negara lemah. Hal itu, sungguh berbeda

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 163 – 164.

<sup>16</sup> “ Irak Pasca Invasi AS : Di Ujung Ketidakpastian “, *Kompas*, 13 April 2003, hal. 25.

<sup>17</sup> Trias Kuncahyono, “ Ambisi Neo – Imperialisme AS “, *Kompas*, 13 April 2003, hal. 36.

dengan orientasi strategis lama Amerika Serikat—realisme perimbangan kekuatan dan multilateralisme liberal—mengesankan kematangan kekuatan dunia. Amerika Serikat dalam mengusahakan stabilitas dan mengejar kepentingannya tidak secara fundamental membahayakan posisi negara lain seperti sekarang ini setelah keluarnya strategi keamanan nasional baru.<sup>18</sup>

Serangan Amerika Serikat ke Irak kali ini ( 2003 ), juga didasai atas rencana Amerika Serikat untuk *repositioning* legitimasi kehadiran kekuatan militernya di Timur Tengah. Dalam Perang Teluk 1991, Amerika Serikat sebenarnya mampu menggusur Saddam Hussein dari kursi kekuasaannya, namun hal itu tidak dilakukan, kemungkinan karena adanya dua pertimbangan : (1) Saddam masih dibutuhkan untuk dijadikan sebagai “ hantu “ dengan tujuan “ menakut – nakuti “ negara – negara Arab lainnya, sehingga kehadiran militer Amerika Serikat di sejumlah negara itu mendapatkan legitimasi dan pembiayaannya, (2) Saddam tetap merupakan kekuatan efektif untuk menumpas ancaman “ Islam Fundamentalis “. Ini sejalan dengan teori “ *the least of two evils* “ yang digunakan Amerika Serikat untuk menekan perkembangan kelompok – kelompok Islam radikal, meskipun harus menyokong rezim otoriter.<sup>19</sup>

Motif lain Amerika Serikat dalam invasi ke Irak adalah didasarkan pada satu teori yakni Amerika Serikat ingin membuat Irak menjadi sekian keping negara dan memperlakukan masing – masing seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, atau Uni Emirat Arab, sehingga tidak ada lagi negara Arab yang menjadi *super power* di kawasannya.<sup>20</sup>

Begitu juga Amerika Serikat merancang sejumlah kudeta di negara – negara Timur Tengah untuk menggulingkan rezim di Mesir, Iran, dan Irak. Namun, semuanya gagal ( kecuali di Irak ). Amerika Serikat biasanya menggunakan krisis, seperti dalam Perang Teluk terakhir untuk memperoleh basis temporer yang menandakan kehadiran permanennya. Bahkan, Amerika Serikat pernah mengirim marinirnya ke Libanon dan membombardir Beirut dengan banyak bom. Namun,

<sup>18</sup> Lebih jauh lihat, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Adian Husaini, *Habis Iraq Siapa Lagi ? : Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003, hal. 23 – 24.

<sup>20</sup> “ Perang Untuk Swastanisasi Minyak Irak “, *Republika* 3 April 2003.

pengiriman marinir skala besar untuk merubah pemerintahan negara Arab baru pertama kali di Irak.<sup>21</sup>

Agresi Amerika Serikat ke Irak ini merupakan bagian dari Agenda penaklukan Amerika Serikat atas seluruh kawasan Timur Tengah. Sebenarnya ada tujuan negara Timur Tengah yang akan menjadi target mendatang yakni Suriah, Iran, Uni Emirat Arab, Yaman, Somalia, Sudan dan Aljasair.<sup>22</sup>

Di masa – masa mendatang, Timur Tengah tampaknya akan tetap diliputi situasi kacau yang sengaja direkayasa oleh negara lebih kuat yang punya kepentingan. Ini untuk memperkuat cengkeraman hegemoninya dalam upaya mengamankan berbagai kepentingan strategis baik politik, ekonomi maupun militer.

Setelah terjadi invasi militer terhadap Irak oleh Amerika Serikat, pihak yang banyak berkepentingan ( Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat dan PBB ) terhadap Timur Tengah atau Irak mengajukan resolusi yang dinamakan dengan *Road Map Peace* ( Peta Perdamaian )<sup>23</sup>. Peta Damai tersebut adalah prakarsa baru bagi penyelesaian perdamaian Israel – Palestina.<sup>24</sup> Tujuan dasar dari Peta Damai ini adalah mengakhiri dua setengah tahun kekerasan Palestina – Israel.<sup>25</sup> Peta Damai juga menjabarkan langkah – langkah yang memungkinkan bangsa Palestina dan Israel mencapai perdamaian yang langgeng.<sup>26</sup>

Dalam menindaklanjuti rencana tersebut, Presiden George W. Bush mencari dukungan Arab dan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) pertama dengan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Perdana Menteri Palestina Abu Mahzen.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> M. Solihat, “Kemerosotan Wibawa PBB”, *Republika* 3 April 2003 hal. 5.

<sup>23</sup> Peta Damai ini sebetulnya sudah direncanakan drafnya jauh sebelum terjadinya serangan Amerika Serikat ke Irak, draf yang mulanya dirancang Amerika Serikat itu telah dikirim oleh David Sutterfield kepada Ariel Sharon pada 15 Oktober 2002. Namun setelah mendapat banyak revisi dari Israel baru draf itu diumumkan. Oleh karena itu, kesuksesan skenario ini sangat tergantung dari Israel.

<sup>24</sup> “Palestina dalam Angan – angan”, *Tempo*, 18 Mei 2003, hal 130.

<sup>25</sup> Dalam *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> *Kompas*, 6 Juni 2003, hal. 2.

<sup>27</sup> *Loc. Cit.*

Fase – fase Peta Damai<sup>28</sup> sesuai dengan rancangan yang ditawarkan Amerika Serikat adalah sebagai berikut : **Fase I** : 2003 - Penguasa Palestina untuk mengakhiri teror dan kekerasan. Negara – negara Arab akan menghentikan pendanaan terhadap teroris yang melakukan penyerangan di Israel. Palestina mengadakan reformasi politik dan mengadakan pemilihan. Sedangkan Israel harus menarik diri dari wilayah yang didudukinya sebelum September 2003, dan membekukan perluasan permukiman; **Fase II** : Desember 2003 – Pembentukan negara Palestina yang independen; konferensi internasional yang pertama untuk mendukung pemulihan ekonomi Palestina; **Fase III** : 2004 – 2005 – Konferensi kedua; Persetujuan status permanen dan akhir dari konflik. Persetujuan tentang perbatasan terakhir, Jerusalem, pengungsi, dan permukiman kembali.

#### 4.1.3 Demokratisasi di Irak

Irak pada awalnya merupakan salah satu daerah yang terencil dari Imperium Uthmaniah. Negara ini dapat dikategorikan sebagai negara yang kurang maju bila dibandingkan dengan negara – negara Arab lainnya yang berbatasan dengan Laut Mediteranian. Peralihan kekuasaan Uthmaniah ke Inggris yang kemudian beralih kepada pemerintahan pribumi—atau dengan kata lain, kemerdekaan negara Irak –tidak dapat segera merubah faktor – faktor ini.

Dalam budayanya, rakyat Irak lebih menghormati seorang pemimpin berdasarkan garis keturunan yang dimiliki. Sistem inilah juga telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat Irak sehingga terjadi kudeta yang pertama kali oleh Partai Baath pada 1936. Kudeta inilah yang telah membuat suatu pola pemerintahan Irak yaitu adanya dominasi militer yang sangat kuat. Dalam pemerintahan Irak telah berkali – kali terjadi kudeta. Tujuan dari kudeta ini adalah untuk menjatuhkan kabinet yang ada, bukan untuk menjatuhkan keluarga kerajaan.

Pemerintahan Saddam dimulai pada awal tahun 1970-an ketika ia masih sebagai orang kuat di belakang layar ( di belakang Presiden Bakr ). Selama beberapa tahun ia mempertahankan posisi yang tidak menonjol sebagai wakil ketua komando regional Partai Baath dan juga menjadi wakil ketua Dewan

---

<sup>28</sup> *Loc. Cit*

Komando Revolusioner. Pada tanggal 17 Juli 1979, tepatnya pada saat peringatan ulang tahun kesebelas pemerintahan Baath di Irak, Saddam menggantikan Bakr sebagai Presiden yang mengundurkan diri karena alasan – alasan kesehatan.<sup>29</sup>

Di bawah Saddam terdapat suatu tanda – tanda bahwa Irak mengalami situasi politik yang stabil. Akan tetapi pada tahun 1980 sempat terjadi ketegangan antara Irak dengan Suriah, Iran, Libya. Gencatan senjata telah memperbaiki citra pemerintah, dan memperbesar dukungan rakyat kepadanya.

Pemerintahan Saddam telah membawa perubahan yang sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan negara Irak. Program reformasi yang dikeluarkan Saddam membawa angin segar dalam perpolitikan di negeri *Fertile Crescent* ini, dimana ia memberikan izin atas pendirian partai – partai politik yang berposisi kepada Partai Baath.

Tindakan ini dimaksudkan tidak lain karena semua bangsa Irak, yang terdiri atas berbagai macam latar belakang etnis, ideologi, serta agama, telah bekerja sama dalam perang, dan oleh karena itu berhak untuk memainkan suatu peranan yang terlembaga dalam proses pengambilan keputusan. Pembentukan adanya partai – partai politik itu dipertegas dengan dikeluarkannya undang – undang oleh Majelis Nasional April 1989. Namun demikian, tidak dapat diharapkan timbulnya sebuah sistem liberal sebagaimana di Barat.

Sejak Saddam berkuasa di Irak, sistem pemerintahan Irak dapat dikatakan sangat tergantung dari pemikiran Saddam dan ideologi Partai Baathnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintahan Irak di bawah Saddam adalah sebuah pemerintahan yang jauh dari demokrasi atau bahkan dikenal sangat otoriter dan kejam, mengabaikan HAM, dan tidak memberikan peluang terhadap kebebasan.

Sejarah mencatat bahwa sosok Saddam, dulunya mempunyai latar belakang sejarah yang ‘ hitam ‘. Pada usia 22 tahun, ia sudah terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap pemimpin Irak pada waktu itu ( Abdel Qarem Kasim ).

---

<sup>29</sup> Riza Sihbudi, ( et.al. ), *Profil Negara – negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 66.

Pada usianya 31 tahun, yaitu tepatnya tahun 1968, Saddam bersama sejumlah kader Partai Sosialis Baath lainnya mengambil alih kekuasaan di Irak. Kekuasaan politik waktu itu benar – benar berada di tangan Saddam, meskipun saat itu ia hanya menjabat sebagai Wakil Presiden dan Wakil Ketua Dewan Komando Revolusioner ( RCC ).<sup>30</sup>

Satu hal lagi yang perlu diketahui adalah sikap Saddam yang mengklaim dirinya sendiri sebagai “ keturunan “ Nebukadnezzar, raja Mesopotamia yang pernah menguasai Babilonia ( tahun 605 – 562 S.M. ) dan tidak segan – segan membangun kembali “ kemegahan kota Babilonia “ dengan mengeluarkan miliaran dolar Amerika Serikat padahal negerinya sedang di ambang kebangkrutan.

Nepotisme yang dilakukan Saddam semakin mengurangi nilai plusnya di mata masyarakat internasional. Hal ini terbukti ketika ia melakukan perombakan secara besar – besaran di tubuh pemerintahannya, dengan cara mengangkat Barzan Hussein, adik kandungnya, sebagai Kepala Keamanan dan Dinas Intelijen. Tidak hanya itu saja, ia juga menunjuk keponakannya, Jenderal A. Khiralah Talfah sebagai menteri Pertahanan. Tak ketinggalan pula seorang famili dekatnya, Saddoun Shaker, yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Saddam, wajar jika kemudian mendapat julukan, “ diktator paling bengis “ di kawasan Timur Tengah. Ia tidak segan – segan membasmi siapa pun baik itu lawan maupun kawan yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Pertama, tahun 1979 misalnya, setelah mendepak pamannya sendiri yaitu Presiden Hassan Al-Bakr, ia juga menghukum mati sejumlah kawannya di Dewan Komando Revolusi yang tidak menyetujui beberapa kebijakan politiknya. Padahal, lima di antara orang – orang yang dieksekusi itu merupakan anggota senior RCC yang pada tahun 1968 bersama Saddam mengambil alih kekuasaan. Contoh yang kedua terlihat saat perang Teluk Parsi telah berakhir. Ia membantai sekitar 5.000 warga suku Kurdi Irak dengan menggunakan senjata kimia. Ia bahkan menuduh orang – orang Kurdi yang tidak berdosa itu sebagai “

---

<sup>30</sup> Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syaah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1989, hal. 125.



pengkhianat “ karena bersimpati kepada Iran. Dari sini dapat kita lihat bahwa konsep “ *zero sum* “ telah berlaku, yaitu dimana seseorang akan memusnahkan lawannya dan tidak akan pernah membiarkan “ musuh “ nya berjalan beriringan atau sejajar.

Apa yang diuraikan di atas adalah gambaran bagaimana pemerintahan Irak yang tidak demokratis dan menjadi kecaman dunia internasional, termasuk juga Amerika Serikat yang mengaku sebagai negara yang paling demokratis dan paling menghargai HAM. Sehingga apa yang terjadi di Irak, oleh Amerika Serikat dijadikan dasar untuk mengadakan serangan militer. Namun ini bersifat retorika.

Demokratisasi di Irak yang dikumandangkan Amerika Serikat—yang akhirnya sampai pada jatuhnya pemerintahan Irak di bawah Saddam Hussein ( 9 April 2003 ), memperjelas tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya dalam invasi ke Irak. Hal ini menjadi awal pemahaman kita dalam tulisan ini bahwa bagaimana suatu sistem pemerintahan yang tidak demokratis dipakai alasan dalam pencapaian tujuan oleh negara lain.

Dalam prinsip politik luar negeri Amerika Serikat, demokrasi adalah merupakan salah satu nilai yang harus dikembangkan ke seluruh dunia demi perdamaian dunia internasional. Tapi, itu hanya pada tataran idealisme. Kita dapat melihat bagaimana pemerintahan monarki Arab Saudi yang tidak demokratis tidak pernah digubris Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat cenderung membiarkannya dalam kondisi *status quo* demi memelihara kepentingannya. Dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi dasar pijakan dalam konteks semacam ini bagi Amerika Serikat adalah kepentingan prioritas Amerika Serikat sendiri.

Walaupun, Amerika Serikat berkeinginan mengadakan demokratisasi di Irak, jelas akan menjadi problem tersendiri, sebab, komposisi masyarakat Irak terbesar adalah kelompok Syiah, hampir 58 %, kelompok Sunni 17 %, dan Kurdi 20 %. Kalau orang Syiah yang menjadi penguasa, pasti tidak disukai Amerika Serikat.<sup>31</sup>

Bagi Amerika Serikat, satu negara Syiah saja, yaitu Iran, sudah tidak pernah bersahabat dengan Amerika Serikat, apalagi jika muncul negara Syiah,

<sup>31</sup> “ Irak Pasca Invasi AS : Di Ujung Ketidakpastian “, *Kompas*, 13 April 2003, hal. 25.

yaitu Irak. Demikian pula kalau Kurdi sebagai mayoritas kedua yang menang pemilu.

Demokratisasi yang diwacanakan Amerika Serikat adalah tidak lebih dari pembenaran yang dipakai Amerika Serikat untuk menutupi *hidden agenda* yang ada. Lebih – lebih transisi demokrasi yang dilakukan tidak semudah yang dibayangkan. Memang, wacana demokrasi menjadi tren ketika negara otoriter telah jatuh. Tapi kalau kita simak lebih jauh pemahaman konsep demokrasi secara teoritis, itu akan sulit dilakukan mengingat semua itu perlu waktu dan proses. Suatu tatanan demokrasi baru bisa bertahan jika ditopang oleh adanya fondasi sosial dan ekonomi yang kuat dan fondasi politik yang kuat pula.<sup>32</sup> Demokrasi tidak akan mudah berkembang dalam realitas politik aktual. Demokrasi baru bisa “ disemaikan “ jika telah tersedia “ lahan “ yang memang kondusif bagi pertumbuhannya. Demokrasi seringkali menimbulkan kekecewaan.<sup>33</sup> Bahkan, Dorothy Pickles, berani menegaskan bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna.<sup>34</sup>

Oleh berbagai kalangan, demokrasi dipahami secara kontekstual. Kontekstual dalam hal ini berarti demokrasi untuk siapa, demokrasi di mana, dan kapan, serta dalam keadaan apa.<sup>35</sup> Konsepsi demokrasi rakyat klasik memandang demokrasi sebagai hubungan yang khas antara kemauan rakyat dan pemecahan isu – isu politik.<sup>36</sup>

Demokrasi harus dipahami secara konseptual dulu sehingga wacana transisi demokrasi di Irak dapat dipahami dan dapat dievaluasi secara obyektif dan komprehensif. Pengertian pokok demokrasi adalah bahwa adanya penyelenggaraan masyarakat yang bersaing, individualis dan berorientasi pasar, dan terselenggaranya negara liberal.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Larry Diamond, dalam M. Rusli Karim, “ Peluang dan hambatan Demokratisasi “, *Analisis CSIS*, tahun XXVI, No. 1, Januari – Maret, Jakarta, 1998, hal. 5.

<sup>33</sup> C. B. Macpherson, dalam *Ibid.* hal. 6.

<sup>34</sup> Dorothy Pickles, dalam *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Torbjorn Tannsjo, dalam *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Macpherson, dalam *Loc. Cit.*

W. Ross Yates mengajukan enam ciri khas demokrasi : toleransi terhadap orang lain, perasaan *fairplay*, optimisme terhadap hakikat manusia, persamaan kesempatan, orang yang terdidik, kebebasan dan milik.<sup>38</sup>

Dari berbagai pandangan tentang demokrasi, sebenarnya teori demokrasi dapat disederhanakan menjadi empat corak : individualisme, utilitarianisme ( atau teori kepentingan ), teori hak dan kewajiban, dan kolektivisme demokratis.<sup>39</sup>

Sistem politik di Dunia Ketiga pada umumnya untuk mudahnya dimasukkan ke dalam kelompok otoritarian. Persamaan dan kekhasan, sebagai dua unsur pokok demokrasi, pada umumnya sulit didapatkan di negara – negara yang belum maju atau sedang berkembang.

Dalam kaus demokratisasi Irak, adalah awal pijakan untuk melangkah menuju transisi demokrasi karena kalau ingin membawa Irak pada proses itu harus disediakan “ lahan “ untuk itu, sehingga transisi bisa berjalan. Namun, dengan penjelasan secara sekilas konsepsi demokrasi tersebut, dimensi demokratisasi menjadi pesimisme. Oleh karena itu, proses yang akan terjadi di Irak hanyalah ( dalam jangka pendek ) ketidakpastian transisi demokrasi.

## 4.2 Faktor Ekonomi

Dimensi ekonomi sering menjadi faktor preventif di samping juga bisa menjadi sebab bagi terjadinya perang, serta bisa menjadi alasan bagi terwujudnya aliansi perdamaian. Pada dua atau tiga dekade lalu, soal minyak dan pengaruh penting minyak terhadap hubungan internasional adalah bukti paling tepat. Bahkan dalam kasus Timur Tengah, kendati konflik Arab – Israel mulanya tidak didasarkan pada isu ekonomi, ternyata pada akhirnya faktor ekonomi pun menjadi pengaruh penting. Dalam kasus serangan Amerika Serikat ke Irak, isu ekonomi tidak bisa dilepaskan dan bahkan menjadi target strategis banyak negara tidak hanya Amerika Serikat.

---

<sup>38</sup> W. Ross Yates, dalam *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> J. Roland Pennock, dalam *Ibid.*, hal 7.

#### 4.2.1 Menguasai Industri Minyak Dunia

Agenda perang menghancurkan Irak untuk yang kesekian kalinya ini adalah salah satu cara untuk kembali menyegarkan kebuntuan – kebuntuan yang dialami Amerika Serikat dalam upaya menguasai ladang minyak Irak. Irak mempunyai cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Sumbangan minyak Irak hampir 40 % lebih merupakan pasokan kebutuhan minyak Amerika Serikat. Apalagi menurut data statistik, angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat paling tinggi dicapai saat Perang Teluk II berlangsung. Pencapaian inilah yang ingin diulang Amerika Serikat.<sup>40</sup>

**Tabel 1 : Cadangan Minyak Dunia**

Negara	Cadangan / miliar barel	Persentase
Amerika	30,4	2,9
Arab Saudi	262,64	24,8
Venezuela	77,7	7,3
Irak	112,5	10,7
Kuwait	96,5	9,3
Qatar	15,2	1,9
Rusia	50	4,6
Indonesia	10	0,07

Sumber : OPEC<sup>41</sup>

Target dan tujuan Amerika Serikat menguasai industri minyak dunia merupakan target prioritas Amerika Serikat. Hal ini mereka lakukan adalah untuk mencari solusi dari ancaman kebangkrutan ekonomi yang semakin melemah. Dengan langkah ini Amerika Serikat memprediksi bahwa dengan melakukan intervensi dan menguasai secara langsung negara – negara yang kaya sumber daya minyak, maka mereka akan selamat dari ancaman krisis tersebut.

<sup>40</sup> Shoelhi, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>41</sup> Elba Damhuri, *Di Balik Invasi AS ke Irak*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta 2003, hal.17.

Intervensi atau penjajahan secara langsung kepada Irak akan mempermudah Amerika Serikat menguasai sumber daya alamnya. Dengan begitu, Amerika Serikat dengan mudah dapat mempermainkan harga minyak dunia. Selama ini, penentuan harga minyak masih dikuasai oleh OPEC, bukan oleh satu negara tertentu.<sup>42</sup>

Di sisi lain, *bargaining* politik Amerika Serikat juga akan semakin kuat, karena semua tahu bahwa minyak merupakan kekuatan yang sangat vital dan dominan dalam kancah pergumulan politik dunia untuk berebut pengaruh. Nampaknya, kekuatan minyak akan terus berlanjut sampai 100 tahun ke depan. Hasil penelitian yang mencoba mencari energi alternatif pengganti minyak ternyata belum terbukti efektifitasnya.

Sebagaimana perang terhadap Afghanistan, yang memberangus Thaliban dan al-Qaidah dan menggantinya dengan pemerintahan “ boneka “ , serangan Amerika Serikat ke Irak adalah demi kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat, misalnya, sebagaimana diketahui, di Afghanistan terdapat laut Kazvia yang kaya minyak dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, Afghanistan merupakan negara yang dekat dengan pusat bisnis di Asia Timur.

Bila Amerika Serikat sudah menguasai minyak Irak, maka hal itu akan membawa preseden buruk terhadap negara – negara Teluk lainnya, karena Amerika Serikat akan membuat negara – negara penghasil minyak itu jatuh miskin melalui kendali dan kekuasaan dalam menentukan harga dan pasokan minyak. Pada posisi ini, yang paling dirugikan adalah Arab Saudi.

Dengan kata lain, bila Amerika Serikat dapat menguasai industri minyak Irak, maka Amerika Serikat bisa keluar dari krisis ekonomi yang melanda negerinya, disamping dapat menguasai dunia internasional sekaligus. Selain itu, penguasaan minyak Irak di bawah kendali Amerika Serikat akan menjadi pukulan telak bagi negara – negara besar lainnya seperti Rusia, Cina, Perancis dan Jerman. Dengan demikian, maka Amerika Serikat akan keluar lagi sebagai “ pemenang “ dalam perang dingin kali ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Safari, Yusuf, ( editor ), *Op. Cit.*, hal 157 – 158.

<sup>43</sup> *Ibid.* hal, 159

Motivasi Amerika Serikat menyerang Irak adalah disebabkan faktor minyak<sup>44</sup>. Tampaknya, ini motif yang paling banyak dipercaya oleh para pengamat politik internasional. Ini sejalan dengan garis kebijakan politik Amerika Serikat yang lebih banyak bersifat pragmatis—untuk mengejar “*national interests*”-nya—dengan mengusung jargon – jargon idealis, semisal penegakan demokrasi, HAM, pemberantasan terorisme, pemusnahan senjata pemusnah massal, dan sebagainya.

Dengan potensi minyak yang besar, “logis” jika Amerika Serikat ambisius, mengingat negara ini memiliki ketegantungan yang sangat tinggi terhadap minyak. Kini, Amerika Serikat mengimpor sekitar 11 juta barel per hari (selisih kebutuhan minyak sebanyak 19 juta barrel dan produksinya hanya 8 juta barrel per hari).<sup>45</sup>

Keberhasilan Amerika Serikat dalam menjajah dan menguasai Irak akan menciptakan hegemoni baru Amerika Serikat terhadap seluruh kekuatan berbagai negara di dunia, karena selama ini, hanya negara Amerika Serikat saja yang memiliki basis dan pangkalan militer di hampir setiap negara di dunia, termasuk di negara – negara besar dan maju. Sebuah pangkalan militer, yang dilengkapi dengan peralatan perang canggih, dapat dengan mudah dipakai untuk mengintervensi sebuah negara tertentu yang menentang keinginan dan kepentingan politiknya.

Dari hitungan ekonomi, jika Amerika Serikat meraih ladang minyak di Irak, Amerika Serikat akan mampu meraih sedikitnya 4 triliun dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Biaya perang yang hanya 200 miliar dolar Amerika Serikat, sebetulnya tidak menjadi persoalan jika melihat keuntungan besar yang ada di depan mata.

Sebagai sebuah negara industri besar dan berteknologi tinggi serta memiliki perusahaan – perusahaan multinasional yang hebat, Amerika mampu menguasai sumber – sumber minyak dunia. Mereka juga sempat mengatur tata niaga dan harga minyak dunia sebelum akhirnya OPEC terbentuk. Mengontrol

---

<sup>44</sup> Adian Husaini, *Op Cit.*, hal.18 – 19.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 19.

harga minyak jelas merupakan sikap wajar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Kebutuhan Amerika Serikat akan minyak per hari adalah 20 juta barel dan Amerika hanya memenuhi 40 %-nya., sementara cadangan minyak Amerika Serikat saat ini sekitar 30,4 miliar barel yang merupakan 3 % dari total cadangan minyak dunia.<sup>46</sup> Coba bandingkan dengan Irak yang memiliki cadangan 112 miliar barel.

Pada sisi lain, konsumsi minyak Amerika Serikat rata – rata sekitar 4.000 liter per kapita, sedangkan rata – rata konsumsi dunia 600 liter per kapita. Penduduk Amerika Serikat yang sekitar 280 juta orang memiliki kendaraan lebih dari 100 juta yang dilayani oleh 176 ribu SPBU ( Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ). Sebagai perbandingan, Indonesia hanya memiliki 2.500 SPBU.<sup>47</sup>

Saat ini, harga minyak tidak bisa lagi dikontrol Amerika Serikat dan Inggris yang mana kedua negara itu sangat tergantung pada minyak. Karenanya, mereka pun mencari jalan lain untuk mengatasi persoalan minyak dalam negerinya dengan mendongkel Saddam. Sanksi PBB selama ini dirasakan tidak membuat Saddam lepas dari jabatannya. Pada sisi lain, pemerintahan Bush pun menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan di Irak.

Tingginya harga minyak dunia jelas merusak ekonomi Amerika Serikat yang memang sangat tergantung pada minyak asing, termasuk juga Inggris. Jika harga minyak murah dan bisa dikontrol, hal itu bisa menjadi kebaikan tersendiri bagi perekonomian Amerika Serikat—yang terus ingin melebarkan sayapnya sebagai pemimpin ekonomi dunia.

Analisis minyak Barat mengemukakan bahwa dengan teknologi minyak yang dimiliki Amerika Serikat, produksi minyak Irak bisa mencapai 5 juta bph, lebih besar 3 juta bph dari produksi sekarang. Suplai ke pasar pun kian melimpah. Para ekonom memprediksi bahwa setelah serangan ke Irak sukses, harga minyak

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 15.

<sup>47</sup> Elba Damhuri, *Di Balik Invasi AS ke Irak*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003, hal. 16.

dunia akan turun dari kisaran 30 – 34 dolar Amerika Serikat per barel menjadi 15 – 20 dolar Amerika Serikat per barel.<sup>48</sup>

Jadi, motivasi yang paling kuat dan rasional Amerika menyerang Irak adalah minyak, *war for oil*.<sup>49</sup> Soal minyak ini jelas bukan saja membicarakan kandungan minyak yang ada di Irak, melainkan juga meliputi cadangan besar yang berada di perbatasan Irak.

Dengan menguasai Irak, Amerika berharap bisa memprivatisasi perusahaan minyak setempat dan kemudian dibeli oleh perusahaan – perusahaan mereka sendiri. Bukan rahasia lagi, privatisasi perusahaan – perusahaan minyak dan energi di dunia merupakan rezeki nomplok bagi kepentingan minyak Amerika yang dapat menarik keuntungan triliunan dolar Amerika Serikat.

Sebetulnya, berbagai pendekatan sudah dilakukan Amerika Serikat agar Irak tidak perlu melawan negara adidaya itu dengan minyaknya. Amerika sudah secara baik – baik meminta Irak untuk berkoalisi dengan perusahaan – perusahaan multinasional Amerika untuk mengoperasikan ladang – ladang minyak mereka, namun Saddam Hussein malah memberikannya kepada Perancis, Rusia, dan Cina, serta di dalamnya Indonesia ( Pertamina ).<sup>50</sup>

Irak sangat memahami betul betapa Amerika sangat tergantung pada minyak mentah. Irak juga mengerti betapa perusahaan – perusahaan minyak sangat rakus dan memiliki ambisi besar untuk bisa menguasai ladang – ladang minyak mereka. Sebagai jawabannya, Irak malah mengundang Perancis dan negara – negara lainnya untuk berinvestasi di ladang minyaknya.

Motif utama invasi militer Amerika Serikat ke Irak kali ini adalah minyak sehingga logis kalau Irak bukan tujuan terakhir. Iran, Arab Saudi, dan Libya punya minyak cukup besar, dan kalau dikuasai Amerika Serikat, paling tidak 60 % minyak dunia ada di situ semua. Minyak punya beberapa aspek, selain sumber energi industri yang belum tergantikan, juga alat menjaga stabilitas ekonomi dunia.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>49</sup> Kurtubi, dalam *Ibid.*, hal 24.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 28 - 29.

<sup>51</sup> "Irak Pasca – Invasi : Di Ujung Ketidakpastian", *Kompas*, 13 April 2003, hal. 25.



Kalau Amerika Serikat menguasai seluruh potensi minyak di Timur Tengah, ditambah minyaknya di Alaska, berarti Amerika Serikat sudah menguasai 80 % cadangan minyak dunia. Organisasi Negara – negara Pengekspor Minyak ( OPEC ) saat ini hanya menguasai 50 – 60 %. Kalau sekarang Amerika Serikat sudah menguasai Irak, berarti dia menguasai Irak, Arab Saudi, dan Kuwait. Itu sudah cukup bagi Amerika Serikat untuk bisa mengatur harga dan suplai minyak ke Barat.<sup>52</sup>

Ambisi atas penguasaan minyak ini sebetulnya sudah dinyatakan secara eksplisit oleh Washington sebelum agresi dilakukan. Di antaranya, Amerika Serikat mengancam akan menghentikan kontrak – kontrak pengoperasian dan pengelolaan minyak di Irak jika tidak mendukung agresi.<sup>53</sup>

Karena Irak ( Saddam ) tidak mau diajak kerja sama dalam hal minyak oleh Amerika Serikat, maka tujuan Amerika Serikat dalam invasi ke Irak adalah agar Irak tidak memegang kendali atas cadangan minyak di kawasan itu. Namun, setelah sukses menghancurkan pemerintahan Saddam dan memiliki kontrol akan Irak, berarti Amerika Serikat mempunyai kekuasaan atas cadangan dan produksi minyak terbesar di dunia. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat memiliki kontrol penuh atas sistem ekonomi global. Dengan demikian, Amerika Serikat berpeluang untuk mendikte kuota eksplorasi dan pengalokasiannya.

Invasi Amerika Serikat ke Irak bukan terkait dengan senjata pemusnah massal, tetapi perang untuk memperoleh kendali atas minyak. Hal ini juga sejalan dengan visi ambisius sekelompok kecil elit pendukung pemerintahan Bush untuk menguasai dunia lewat kendali atas sumber energi strategis,<sup>54</sup> sehingga, alasan melucuti senjata pemusnah massal, menjatuhkan rezim otoriter atau alasan mencegah terorisme semakin kelihatan kalau itu hanya sebuah kedok.

Bahkan, sebenarnya W. Bush hanya diperalat oleh berbagai kepentingan di sekelilingnya namun Bush juga memperoleh manfaat dengan

---

<sup>52</sup> *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Elba Damhuri, *Op.Cit.*, hal. 43.

<sup>54</sup> Ivan A Hadar, “ Militerisme Amerika Serikat “, *Kompas*, 31 Maret 2003, hal. 4.

berharap meraih kemenangan di Pemilu berikutnya serta sejumlah konsesi.<sup>55</sup> Dan target mereka adalah menguasai 80 % cadangan minyak dunia.<sup>56</sup>

Kendati pasokan minyak Amerika Serikat dari Arab Saudi dan Kuwait serta sejumlah negara produsen minyak lain untuk sementara dapat memenuhi kebutuhan konsumsi minyak Amerika Serikat, namun untuk jangka panjang hal itu masih belum sanggup memenuhi rasa aman Amerika Serikat. Itu sebabnya, sejak sepuluh tahun terakhir Amerika Serikat sangat geregetan untuk mengusir Saddam Hussein dari singgasana kekuasaan Irak, karena Saddam dianggap menjadi penghalang ambisinya.<sup>57</sup>



---

<sup>55</sup> Analisa Maswadi Rauf, "Terorisme, Senjata Pemusnah Kedok AS Untuk Merampok", *Pelita*, 9 April 2003, hal. 5.

<sup>56</sup> *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Solihat, *Loc. Cit.*

BAB V

KESIMPULAN



Irak adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang tidak demokratis, sedangkan Amerika Serikat sebagai negara yang senantiasa membanggakan diri sebagai “ *the champion of democracy* “ ( juara demokrasi ). Amerika Serikat kerap kali melakukan berbagai tindakan politik luar negeri dari sekedar kecaman diplomatik hingga berwujud tindakan militer, dengan mengatasnamakan penegakkan demokrasi ke seluruh dunia.

Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak yang monumental sejak tahun 1970-an tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh perpolitikan di Irak dan kawasan Timur Tengah pada umumnya, sehingga masuk akal Amerika Serikat ingin mempunyai pengaruh di kawasan dan bahkan dunia sangat berkepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, karena Saddam Hussein tidak kooperatif dan bahkan cenderung memusuhi Barat terutama Amerika Serikat.

Invasi Amerika Serikat dan pasukan koalisinya ke Irak, yakni menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein yang memakai kedok demokrasi atau senjata pemusnah massal, ternyata ada *hidden motives* dalam hal itu. Ada pun tujuan utama Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak adalah adanya faktor politik dan ekonomi. Faktor politik yaitu ingin mengadakan suatu perubahan rejim pemerintahan Irak menuju pemerintahan yang lebih kooperatif, menjaga keamanan, eksistensi, dan kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah dan ingin mengadakan penataan ulang wilayah Arab agar lebih mudah menancapkan hegemoni barunya di kawasan Timur Tengah yang merupakan wilayah kaya sumber minyak.

Motivasi ekonomi dari serangan Amerika Serikat ke Irak tersebut juga adanya keinginan Amerika Serikat untuk menguasai industri minyak dunia, sehingga kepentingan strategis Amerika Serikat dapat dengan mudah

dilaksanakan. Dengan menguasai Irak, baik minyak maupun pemerintahannya, Amerika Serikat akan menjadi negara yang dominan di kawasan itu, dan pada akhirnya sistem tatanan dunia internasional akan tergantung dari dominasi dan peran Amerika Serikat, terutama lewat penguasaan akan sumber daya alam ( minyak ) dan penentuan harganya secara internasional.

Dengan adanya rekayasa Amerika Serikat dengan Israel, negara – negara di kawasan Timur Tengah akan menjadi sangat tergantung baik secara politik maupun ekonomi terhadap Amerika Serikat, sehingga apa yang disebut sebagai ketergantungan Dunia Ketiga terhadap negara maju dalam hal ini Amerika Serikat akan nampak dalam konteks kawasan Timur Tengah. Kalau kita lihat sekilas, nampaknya yang terjadi adalah kerja sama saling menguntungkan dan terjadi interdependensi, tapi, setelah dianalisa lebih jauh, yang terjadi justru eksploitasi dan hubungan yang tidak seimbang.

Irak yang merupakan negara kaya minyak kedua di dunia yaitu setelah Arab Saudi, merupakan negara yang sangat penting bagi Amerika Serikat demi pemenuhan akan minyak untuk industrinya. Minyak, bagi Amerika Serikat adalah hal yang sangat vital dan mempunyai nilai tersendiri.

Di samping itu, minyak adalah merupakan aset ekonomi dunia yang dapat menentukan stabilitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi bagi negara – negara di dunia terutama negara penghasil minyak dan negara industri. Kebutuhan Amerika Serikat yang sedemikian besar akan minyak maka membuat AmerikaSerikat memndang aset ,inyak sebagai suatu aset strategis yang harus dikuasainya dengan jalan apa pun termasuk penggunaan cara – cara militer seperti yang dilakukan terhadap Irak pada tahun 2003 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMADI, H. ABU, **Psikologi sosial**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- ANONIM, **Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah**, Hasil Kerja Sama Deplu dan UGM, 1993.
- BUDIMAN, ARIF, **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- DAHLAN, HARWANTO, **Military Industrial Complex Amerika Serikat**, ( Laporan Penelitian ), Fisipol UMY, Yogyakarta, 1995.
- DAMHURI, ELBA, **Di Balik Invasi AS ke Irak**, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003.
- FRANKEL, J., **Hubungan Internasional**, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- HABIB, A. HASNAN **Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional**, CSIS, Jakarta, 1997.
- HERMAWAN, YULIUS P., **Perkembangan Studi Hubungan Internasional : Karakteristik Interdisipliner dan Eurosentris dalam Disiplin Hubungan Internasional**, PACIS, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- HUNTINGTON, SAMUEL P., **The Tird Wave**, University of Oklahoma Press, Norman, 1991.
- HUSAINI, ADIAN, **Habis Iraq Siapa Lagi ? : Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika**, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003.
- \_\_\_\_\_, **Gelombang Demokrasi Ketiga**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991.
- JA'FAR, FATHUDDIN, **Dunia Islam Versus Tata Dunia Baru**, LPPD Khairul Ummah, Jakarta, 1994.
- JATMIKA, SIDIK, **AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat**, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.
- JONES, WALTER S., **The Logic of International Relations**, Sevent Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1991.

- MAS'OED, MOHTAR, **Negara, Kapital dan Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- MORGENTHAU, HANS J. , **Politik Antar Bangsa, Buku Ketiga** , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.
- NASUTION, DAHLAN, **Politik Internasional : Konsep dan Teori**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
- ROMLI, USEF H, H. M., SETIYAJI, H. ACHMAD, ZAINURROFIQ, **Zionis Israel di Balik Invasi AS ke Irak : Upaya Menciptakan Israel Raya**, Mujahid Press, Bandung, 2003.
- SAFARI, MOHAMMAD, YUSUF, H. ALMUZZAMMIL, ( Editors ), **Perang Iraq – AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya**, Kerja Sama antara COMES dengan Jim Malaysia, Jakarta, 2003.
- SHOELHI, MOHAMMAD, **Demi Harga Diri : Mereka Melawan Amerika**, Pustaka Zaman, Jakarta, 2003.
- SIHBUDI, M. RIZA, **Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah**, Penerbit Mizan, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, **Profil Negara – Negara Timur Tengah**, Buku Satu, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, **Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemon Amerika Serikat**, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, **Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington**, Mizan, Bandung, 1992.
- SIHBUDI, M. RIZA, BASYAR, M. HAMDAN, ZULKARNAEN, HAPPY BONE, **Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah**, PT. ERESKO, Bandung, 1993.
- SIMON, ROGER, **Gagasan – gagasan Politik Gramsci**, INSIST Bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- SPIEGEL, STEVEN L., **World Politics in the New Era**, Los Angeles : Harcourt Bacra, College Publishers, UCLA, 1995.
- SURIASUMANTRI, JUJUN S., **Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

- SUDARSONO, JUWONO, et. al, **Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan**, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.
- SUPRAPTO, R., **Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi, dan Perilaku**, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- WASITO, HERMAWAN, **Pengantar Metodologi Penelitian**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- WELCH, SUSAN, et. al, **American Government**, West / Wods Worth International Publishing Company, New York, 1998.
- YUSUF, SUFRI, **Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

**Surat Kabar**

*Media Indonesia*, 29 April 1996

*Merdeka*, 22 Pebruari 1991

*Kompas*, 12 Agustus 1991

\_\_\_\_\_, 6 September 1996

\_\_\_\_\_, 27 Januari 1998

\_\_\_\_\_, 5 Pebruari 2003

\_\_\_\_\_, 7 Pebruari 2003

\_\_\_\_\_, 13 Pebruari 2003

\_\_\_\_\_, 7 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 24 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 26 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 28 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 31 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 11 April 2003

\_\_\_\_\_, 13 April 2003

\_\_\_\_\_, 26 April 2003

\_\_\_\_\_, 27 Mei 2003

\_\_\_\_\_, 6 Juni 2003

*Pelita*, 25 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 1 April 2003

\_\_\_\_\_, 9 April 2003

*Republika*, 22 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 23 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 31 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 3 April 2003

*Surya*, 25 April 2003

#### **Majalah**

*Tempo*, 30 Maret 2003

\_\_\_\_\_, 6 April 2003

\_\_\_\_\_, 18 Mei 2003

#### **Jurnal**

*Analisis CSIS XXIII*, No. 6, November – Desember 1994.

*Analisis CSIS XXIV*, No. 3, Mei – Juni, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, XXVI, No. 6 November – Desember, Jakarta, 1997.

\_\_\_\_\_, XXIV, No. 1 Januari – Maret, Jakarta, 1998.

*Jurnal Ilmu Politik* 8, AIPI dan LIPI dengan PT Gramedia Pustaka Utama, 1991

\_\_\_\_\_, 12, AIPI dan LIPI dengan PT Gramedia Pustaka Utama, 1993

\_\_\_\_\_, 14, AIPI dan LIPI dengan PT Gramedia Pustaka Utama, 1993



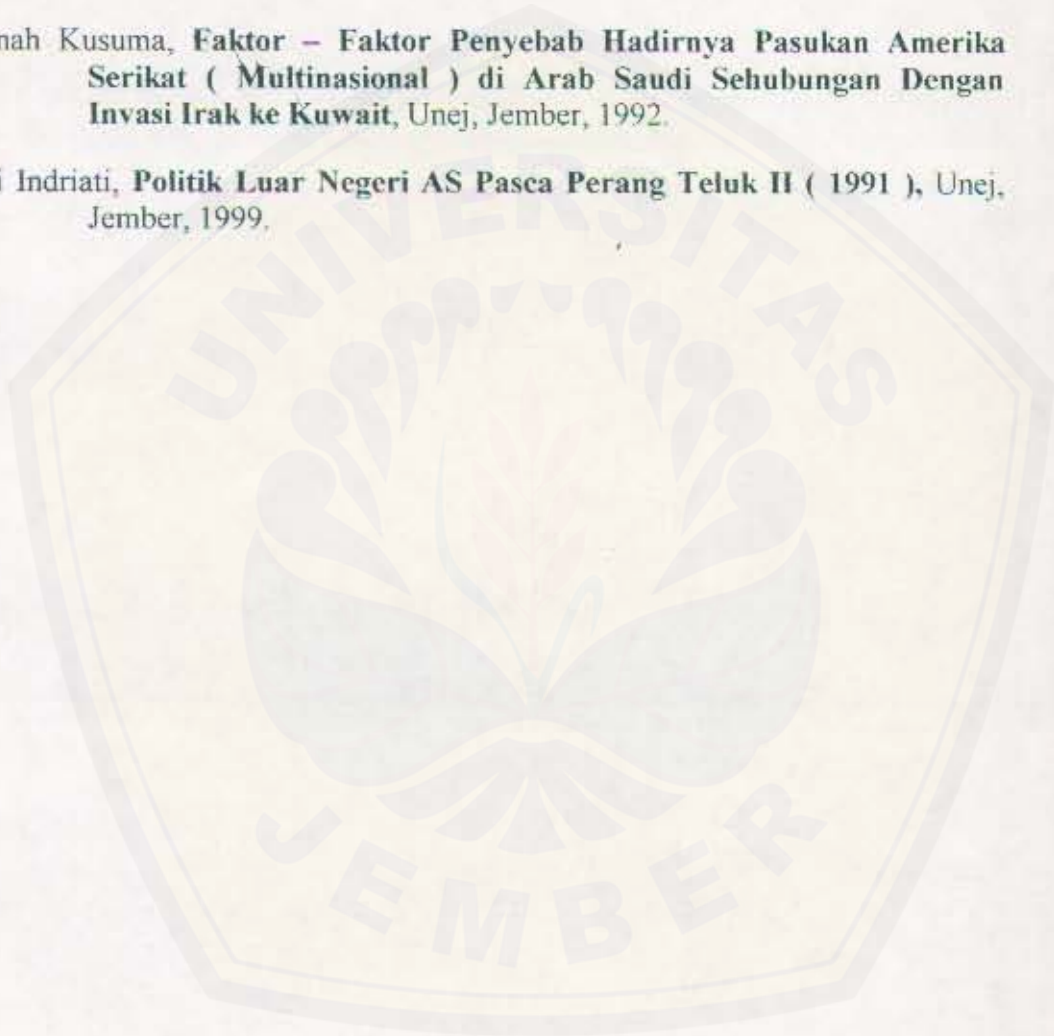
*Global, Jurnal Politik Internasional* 2, Kerja Sama UI - PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

*Political Science Quarterly*, Vol. 99, No. 2, 1984.

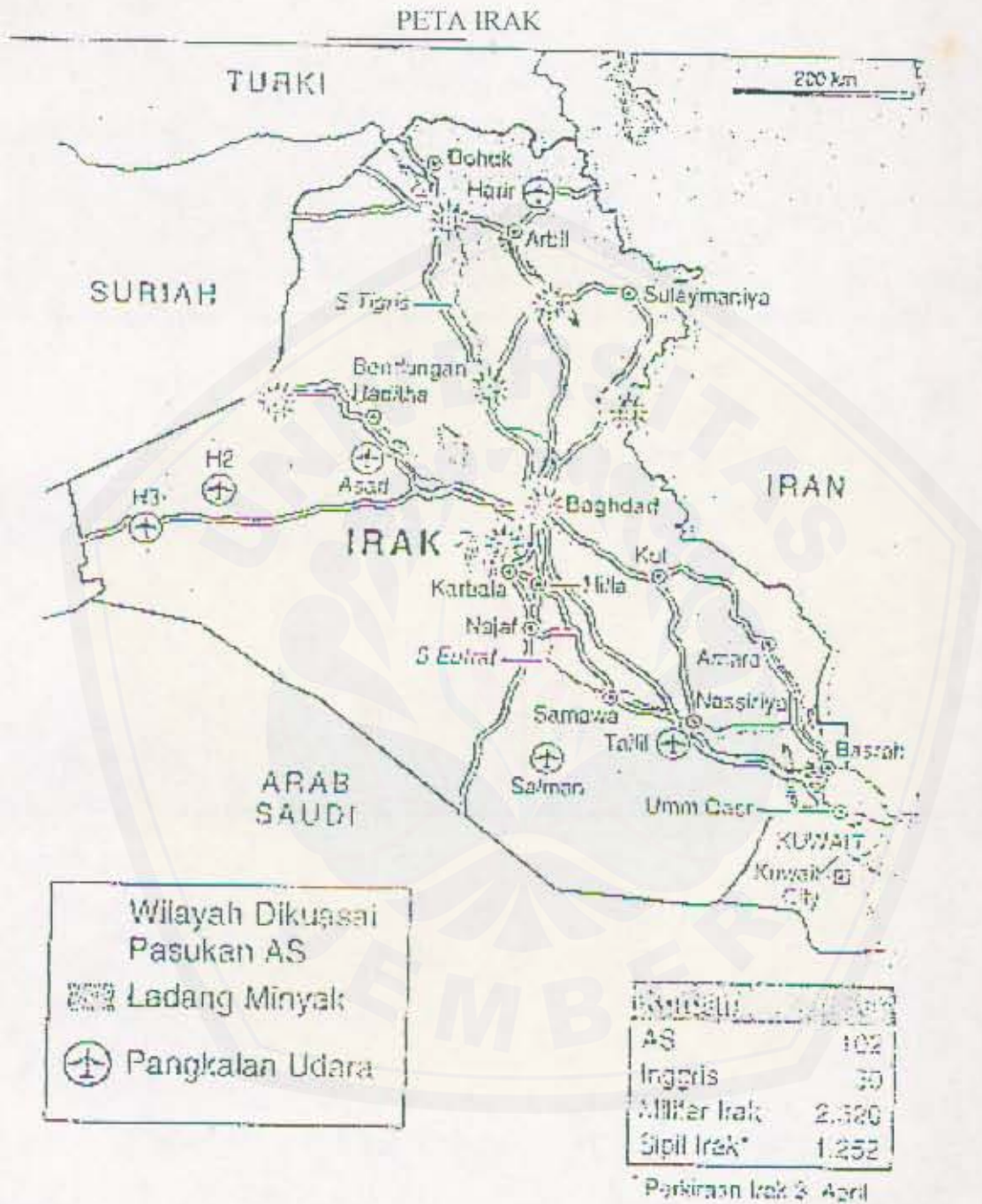
### Skripsi

Aminah Kusuma, **Faktor – Faktor Penyebab Hadirnya Pasukan Amerika Serikat ( Multinasional ) di Arab Saudi Sehubungan Dengan Invasi Irak ke Kuwait**, Unej, Jember, 1992.

Sulvi Indriati, **Politik Luar Negeri AS Pasca Perang Teluk II ( 1991 )**, Unej, Jember, 1999.



Lampiran I



REUTERS

Sumber: Global Security.org<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kompas, 11 April 2003, hal. 1.

Lampiran 2

**Profile IRAQ**

**A. Country Overview**

Head of Government: Saddam Hussein al-Takriti

Deputy Prime Minister: Tariq Aziz

Independence: October 3, 1932

Population (7/01E): 23.3 million

Location/Size: Middle East/168,709 square miles, slightly more than twice the size of Idaho.

Major Cities: Baghdad (capital), Basra, Mosul, Karbala, Kirkuk.

Languages: Arabic, Kurdish.

Ethnic Groups: Arab 75-80%, Kurdish 15-20%, Turkmen, Assyrian, or other 5%.

Religions: 97% Muslim (Shi'a 60-65%, Sunni 32-37%), Christian or other (3%).

Defense (2001E): Army (375,000); Air Force (30,000); Navy (2,000). Iraq is believed to have 2,200 main battle tanks and over 300 combat aircraft (of which as few as 100 may be serviceable); Paramilitary Forces (42,000-44,000, including Security Troops, Border Guards, and "Saddam's Fedayeen")

**B. Economic Overview**

Currency: Iraqi Dinar (ID).

Unofficial Exchange Rate (9/02E): US\$1 = ID1,990 (note: the official rate is US\$1 = ID 0.3).

Gross Domestic Product (at market exchange rates) (2002E): \$28.6 billion.

Gross Domestic Product (at purchasing power parity rates) (2002E): \$15.5 billion (around one-third of 1989's econon-dc output).

Real GDP Growth Rate (2001E): 3.2% (2002E): (-3%)-1.5% (2003F): 1.9%-6%.

Inflation Rate (consumer prices) (2001E): 28.1% (2002E): 24.6%, (2003F): 17.6%.

Major Export Products (2002): Crude oil and oil products (regulated by the United Nations) Major Import Products (2002): Food, medicine, consumer goods (regulated by the United Nations).

Merchandise Exports (2001E): \$15.8 billion.

Merchandise Imports (2001E): \$11.0 billion.

Merchandise Trade Balance (2001E): \$4.8 billion.

Current Account Balance (2001E): \$0.9 billion.

Oil Export Revenues (2002E): \$13.1 billion (includes \$3 billion or so in smuggling).

Oil Export Revenues/Total Export Revenues (2002E): 95% or more.

Total External Debt (2001E): \$62.2 billion.

## C. Energy Overview

Minister of Oil: Amir Muhammad Rashid al-Ubaydi.

Proven Oil Reserves (1/1/02E): 112.5 billion barrels (around 75 billion barrels of which has not yet been developed; potential reserves are as high as 200 billion barrels.

Oil Production (January-July 2002E): 1.99 million barrels per day (bbl/d), of which 1.97 million bbl/d is crude oil (note: Iraqi oil production was 2.45 million bbl/d in 2001).

Oil Production Capacity, Maximum Sustainable (10/02E): 2.83.0 million bbl/d.

Oil Export Routes: Kirkuk-Ceyhan pipeline; Mina al-Bakr port; to Jordan and Turkey via truck; reportedly to Syria via the FdrkukBaniyas pipeline; smuggling by boat along the Gulf coast.

Oil Consumption (2002E): 460,000 barrels per day (bbl/d).

Net Oil Exports (January-July 2002E): 1.5 million bbl/d.

U.S. Oil Imports from Iraq (January -July 2002E): 566,000 bbl/d (down from 795,000 bbl/d during 2001).

Crude Oil Refining Capacity (1/1/02E): 417,500 bbl/d (according to the *Oil and Gas Journal*).

Natural Gas Reserves (1/1/02E): 109.8 trillion cubic feet (Tcf).

Natural Gas Production/Consumption (2000E): 111 billion cubic feet (Bcf).

Electricity Generation Capacity (2000E): 9.5 gigawatts (90% thermal).

Electricity Production (2000E): 27.3 billion kilowatthours

## D. Environmental Overview

Total Energy Consumption (2000E): 1.09 quadrillion Btu\* (0.3% of world total energy consumption).

Energy-Related Carbon Emissions (2000E): 20.2 million metric tons of carbon (0.3% of world total carbon emissions).

Per Capita Energy Consumption (1999E): 51.7 million Btu (vs U.S. value of 355.8 million Btu).

Per Capita Carbon Emissions (2000E): 0.88 metric tons of carbon (vs U.S. value of 5.6 metric tons of carbon).

Energy Intensity (1999E): 14,895 Btu/\$1995 (vs U.S. value of 11, 138 Btu/\$1995) \*\*

Carbon Intensity (1999E): 0.28 metric tons of carbon/thousand \$1995 (vs U.S. value of 0.18 metric tons/thousand \$1995)\*\*

Sectoral Share of Energy Consumption (1998E): Transportation (56.9%), Industrial (33.9%), Residential (9.2%), Commercial (0.0%).

Sectoral Share of Carbon Emissions (1998E): Transportation (61.1%), Industrial (28.9%), Residential (9.9%), Commercial (0.0%).

Fuel Share of Energy Consumption (2000E): Oil (88.6%), Natural Gas (10.6%).

Fuel Share of Carbon Emissions (2000E): Oil (90.4%), Natural Gas (10.6%).

Renewable Energy Consumption (1998E): 7 trillion Btu\* (0% increase from 1997).

Number of People per Motor Vehicle (1998): 17.8 (vs U.S. value of 1.3).

Status in Climate Change Negotiations: Iraq is not a signatory to the United Nations Framework Convention on Climate Change or to the Kyoto Protocol.

Major Environmental Issues: Government water control projects have drained most of the inhabited marsh areas east of An Nasiriyah by drying up or diverting the feeder streams and rivers; a once sizable population of Shi'a Muslims, who have inhabited these areas for thousands of years, has been displaced; furthermore, the destruction of the natural habitat poses serious threats to the area's wildlife populations; inadequate supplies of potable water; development of Tigris-Euphrates Rivers system contingent upon agreements with upstream riparian Turkey; air and water pollution; soil degradation (salination) and erosion; desertification.

Major International Environmental Agreements: A party to the Law of the Sea and the Nuclear Test Ban. Has signed, but not ratified, Environmental Modification.

\*The total energy consumption statistic includes petroleum, dry natural gas, coal, net hydro, nuclear, geothermal, solar, wind, wood and waste electric power. The renewable energy consumption statistic is based on International Energy Agency (IEA) data and includes hydropower, solar, wind, tide, geothermal, solid biomass and animal products, biomass gas and liquids, industrial and municipal wastes. Sectoral shares of energy consumption and carbon emissions are also based on IEA data.

\*\*GDP based on EIA International Energy Annual 2000.

## **E. Oil And Gas Industry**

Major Companies: The Oil Ministry oversees the nationalized oil industry through the *Iraq National Oil Company* (INOC). Autonomous companies under

INOC include the State Company for Oil Projects (SCOP) - design and engineering of upstream and downstream projects; *Oil Exploration Company (OEC)* -exploration;

*Northern Oil Company (NOC)* and *Southern Oil Company (SOC)* -upstream activities in northern/central and southern Iraq, respectively; *State Organization for Oil Marketing (SOMO)* -crude oil sales and OPEC relations; *Iraqi Oil Tankers Company (IOTC)*; and various departments within the Ministry of Oil which run Iraq's internal pipeline systems, distribute oil products, operate downstream natural gas/LPG projects and gas bottling plants. In August 2001, Iraqi oil minister Rashid announced that a new state oil company ("Oil Projects Company") would be created to oversee development of new Iraqi discoveries.

Major Oil Fields (proven reserves - billion barrels, 2001E): Majnoon (12.1-20.0), West Qurna (11.3-15.0), East Baghdad (11+), Kirkuk (10+), Rumaila (10+), Nahr bin Umar (6+), Rattawi (3.1), Halfaya (2.5.4.6), Nassiriya (2-2.6), Suba-Luhais (2.2), Tuba (1.5), Khurmala (1.0), Gharaf (1.0-1.1), Rafidain (0.7), Amara (0.5).

Oil Refineries (crude refining capacity bbl/d, 2001E): Baiji (150,000), Basra (140,000), Daura (100,000), Khanakin (12,000), Haditha (7,000), Mufflah (4,500), Qayarah (2,000) (Note: Iraq reportedly is constructing several 10,000-bbl/d mobil refineries).

Major Ports: Mina al-Bakr (1.2 million bbl/d current capacity), Khor al-Amaya, Khor al- Zubair, Umm Qasr.

Major Pipelines (current capacity): *Kirkuk-Ceyhan (Dortyol) Pipeline* - 0.9 million bbl/d (optimal capacity on the two lines to Ceyhan is potentially around 1.5-1.6 million bbl/d); *Iraq-Saudi Arabia Pipeline (IPSA1, 2)* - possibly 1.65 million bbl/d (closed by Saudi Arabia in 1990); *Banias Tripoli Pipeline* - possibly 0.3 million bbl/d (closed by Syria in 1982); *Iraq Strategic Pipeline* - less than 1.4 million bbl/d (reversible, internal transportation only).

\*) SUMBER: "<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html>"  
<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html><sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Mohammad Safari, H. Almuzzammil Yusuf, *Perang Iraq – AS : Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, COMES Kerja sama dengan Jim Malaysia, Jakarta, 2003, hal. 223 – 227.



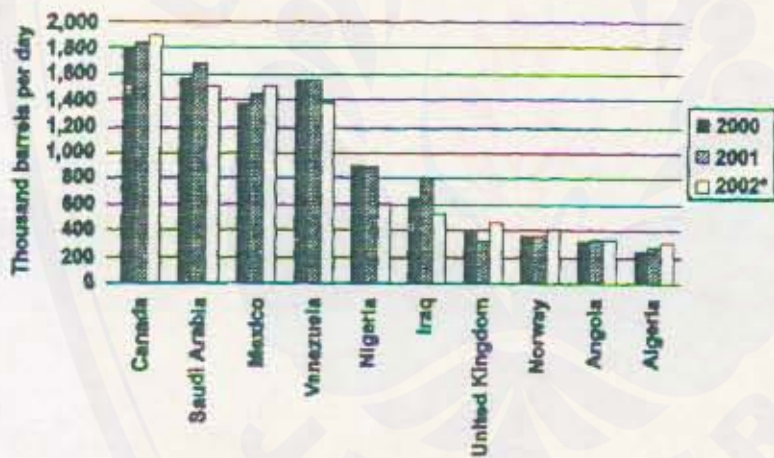
Lampiran 3

Data Pengekspor Minyak ke USA

U.S. Oil Imports - Top 10 Countries of Origin

The 8-month average for 2002 shows that the United States has imported less oil from OPEC nations (shown in red type on the graph) than in the previous 2 years. The "Top 10" account for nearly 80% of all oil imports in each year shown.

2002 Top 10 Countries from which the United States Imports Oil (thousand barrels per day)



\*Eight-month average for 2002.

\*) Sumber : Energy Information Administration, *Monthly Energy Review*, October 2002, Table 3.3. dalam "<http://www.ott.doe.gov/facts/archives/fotw246.shtml>" <http://www.ott.doe.gov/facts/archives/fotw246.shtml><sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 228.

## Lampiran 4

### Nama-nama Perusahaan yang Berminat Bisnis Minyak di Irak

#### - Ladang minyak Al Ahdab, di selatan Irak

Kontrak berdasarkan sistem bagi hasil (production sharing agreement/PSA) PSA dengan CNPC (Cina) tahun 1997.

#### - Amara, di selatan

Kontrak berdasarkan sistem produksi dan pengembangan (development and production contract/DPQ) dengan PetroVietnam tahun 2002. -

#### - Bai Hassan, di Utara

Tatneft (Rusia) dan Zarubezhneft (Rusia) telah melakukan kontrak untuk pengeboran minyak.

#### - East Baghdad, di tengah Irak

Sejumlah perusahaan minyak internasional dikatakan sangat berminat untuk pengembangan kapasitas produksi.

#### - Gharraf, di selatan

Perusahaan TPAO (Turki) merupakan calon pemenang utama.

#### - Halfaya, di selatan

BHP (Australia) bersaing dengan CNPC, perusahaan Korsel, ONGC (India) dan ENI (Italia).

#### - KifL, tengah

ETAP (Tunisia) telah menyatakan minat.

#### - Kirkuk, di utara

Tatneft, Zarubezhneft, TPAO Petrom (Rumania) telah melakukan kontrak pengeboran.

#### - Lulhais dan Subba, di selatan

TNK (Rusia) dan Machinoirport (Rusia), Lundin (Swedia) dan CNPC menyatakan minat.

#### - Majnoon, di selatan

Kontrak PSA dimulai tahun 1998 dengan TotalFinaElf (Perancis), belum ditandatangani.

#### - Nahr bin Umar, di selatan

PSA dimulai tahun 1998 dengan TotalFinaElf namun belum ditandatangani. Zarubezhneft menyatakan minat pada ladang itu.

**- Nassiriyah, di selatan**

ENI dan Repsol (Spanyol) menyatakan minat.

**- Ladang minyak Rumalla Utara dan Rumaila Selatan, di selatan**

Tatneft, Zarubezhneft dan Lukoil (Rusia) melakukan kontrak perbaikan.

**- Nur, di selatan**

Kontrak DPC tahun 2001 dengan Syrian Petroleum Company (SPQ).

**- Ratawi, di selatan**

Shell (Inggris-Belanda) adalah calon pemenang utama tender. Penentangannya, termasuk perusahaan Malaysia (Petronas) dan Nexen (Kanada).

**- Saddam, di utara**

Tatneft dan Zarubezhneft telah melakukan kontrak pengeboran.

**- Tuba, di selatan.**

Konsorsium terdiri dari Sonatrach (Aljazair), ONGC dan Reliance yang bersaing menghadapi Pertamina (Indonesia).

**- West Qurna, di selatan.**

Irak telah membatalkan kontrak PSA--yang ditandatangani tahun 1997--pada Desember 2002 terhadap konsorsium Rusia yang dipimpin Lukoil. Rusia melakukan protes dan Lukoil masih memegang hak atas ladang itu.

Keterangan: Kontrak-kontrak itu adalah jauh sebelum invasi dimulai.

Sumber: AFP<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Kompas, 13 April 2003, hal. 32.

**Lampiran 5**

**Asal dan Nama Perusahaan yang Mengantongi Kesepakatan Bisnis Minyak di Irak**

**1. Rusia**

Bashneft

Lukoil

Mashinoimport

Slavneft

Stroyexport

Tatneft

Zarubezhneft

**2. Cina**

CNPC

**3. Perancis**

TotalFinaElf

**4. Lainnya**

BHP (Australia)

Bow (Kanada)

Can Oxy (Kanada)

ENI (Italia)

ONGC (India)

Japex (Jepang)

Pertamina (Indonesia)

Petronas (Malaysia)

PetroVietnam (Vietnam)

Repsol (Spanyol)

Shelf (Belanda)

Sonatrach (Aljazair)

---

TPAO (Turki)

Keterangan: Sernua perusahaan itu telah sepakat mengembangkan ladang minyak di Irak untuk mengeksploitasi cadangan minyak Irak sebesar 64,8 miliar barrel. Beberapa kesepakatan telah dilaksanakan, namun atas seizin PB6.

Sumber: Deutsche Bank<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*



UNIVERSITAS JEMBER  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto  
Kotak Pos 198 - Telp: (0331) 338261, 333860, atau 330224 Pes. 307-308  
Fax: (0331) 338261, E-mail : [lib.unj@jember.wasantara.net.id](mailto:lib.unj@jember.wasantara.net.id)  
Jember 68121

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR  
NOMOR : **360/J25.5.1/TU.3/2003**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **I JRO SABA**  
NIM : **99.1005**  
Jur/Program : **Hub. Internasional**  
Fakultas : **FISIP**  
Angkatan : **1999**

Terhitung mulai bulan **12 Juni 2003** sampai bulan **17 Juni 2003** telah melaksanakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai berikut : **Kebijakan Amerika Serikat Dalam Menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein di Irak**

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Stempel
12-06-2003	X			
13-06-2003		X		
16-06-2003		X		
17-06-2003				
17-06-2003				

